



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 1 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR

TAHUN 2005-2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 1 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2005 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah jangka panjang yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang mempunyai karakteristik tersendiri;
- b. bahwa untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, maka perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan Undang - Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

5. Undang

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;

Kepada

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 4 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2005 – 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur;
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur;

5. Rencana

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut RTRW Provinsi adalah rencana umum tata ruang yang berfungsi sebagai kebijakan matra ruang pembangunan daerah.
9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD Provinsi adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Agrobisnis adalah sebuah sistem yang utuh dan saling terkait diantara seluruh kegiatan ekonomi, terdiri atas sub sistem agribisnis hulu, sub sistem agribisnis budidaya (pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, perikanan serta kehutanan), sub sistem Agrobisnis hilir, dan sub sistem jasa penunjang agrobisnis.

Pasal 2

Sistematika RPJPD Provinsi terdiri dari:

- a. Pendahuluan;
- b. Kondisi Umum;
- c. Analisis Isu Isu Strategis;
- d. Visi, Misi dan Strategi Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
- e. Arah Pembangunan dan Periodisasi RPJPD;
- f. Pendanaan Pembangunan Daerah;
- g. Penutup.

Pasal 3

- (1) Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari latar belakang; maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan.
- (2) Kondisi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari kondisi saat ini; modal dasar dan potensi; gambaran tata ruang dan posisi Jawa Timur dalam konstelasi nasional.
- (3) Analisis Isu Isu Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah analisa tentang ancaman krisis pangan; krisis energi; globalisasi dan perdagangan bebas; kemiskinan, kesenjangan, pengangguran dan kualitas SDM; serta perubahan iklim dan pemanasan global.

Pasal 4

- (1) Visi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah pusat agrobisnis terkemuka, berdaya saing global dan berkelanjutan menuju Jawa Timur makmur dan berakhlak.
- (2) Keberhasilan pencapaian visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Dalam rangka mencapai visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan misi Pembangunan yang terdiri dari :

- a. mengembangkan perekonomian modern jawa timur berbasis agro;
- b. mewujudkan SDM yang handal, berakhlak mulia dan berbudaya;
- c. mewujudkan kemudahan memperoleh akses untuk meningkatkan kualitas hidup;
- d. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan buatan;
- e. mengembangkan infrastruktur bernilai tambah tinggi;
- f. mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik;

Pasal 6

- (1) Strategi utama pembangunan Jawa Timur dalam jangka panjang dilaksanakan melalui pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan infrastruktur.
- (2) Pelaksanaan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasari oleh reformasi birokrasi, supremasi hukum dan stabilitas politik.

Pasal

Pasal 7

Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e diarahkan pada masing-masing Misi sebagai berikut :

- a. **Misi pertama**, mengembangkan perekonomian modern berbasis agrobisnis diarahkan pada transformasi sistem agrobisnis; pengembangan sistem informasi agrobisnis; pengembangan sumberdaya agrobisnis; pembinaan sumberdaya manusia; pembangunan fasilitas penelitian dan pengembangan pertanian; penguatan struktur perekonomian; penguatan struktur industri; optimalisasi perdagangan; pemberdayaan koperasi dan UMKM; optimalisasi peran lembaga keuangan dan perbankan; percepatan investasi; serta pengembangan pariwisata;
- b. **Misi kedua**, mewujudkan SDM yang handal, berakhlak mulia dan berbudaya diarahkan pada pembangunan pendidikan; pembangunan kehidupan beragama; pengembangan kebudayaan; pembangunan pemuda dan olah raga; pemberdayaan perempuan; serta pembangunan dan pemantapan jatidiri bangsa;
- c. **Misi ketiga**, mewujudkan kemudahan memperoleh akses untuk meningkatkan kualitas hidup diarahkan pada pembangunan kesehatan; pembangunan kependudukan; pembangunan ketenagakerjaan; pembangunan kesejahteraan sosial; serta penanggulangan kemiskinan;
- d. **Misi keempat**, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan buatan diarahkan pada pengembangan keanekaragaman pemanfaatan sumber daya alam dan buatan; pengembangan energi; pendayagunaan sumber daya alam; pendayagunaan sumber daya alam tak-terbarukan; pengembangan potensi sumber daya kelautan; serta penanganan kebencanaan;
- e. **Misi kelima**, mengembangkan infrastruktur bernilai tambah tinggi diarahkan pada pembangunan transportasi; pengelolaan sumber daya air; perumahan dan permukiman; pengembangan wilayah; serta penyelenggaraan penataan ruang;
- f. **Misi Keenam**, mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik diarahkan pada pembangunan hukum; penyelenggaraan pemerintahan; pembangunan politik; pembangunan komunikasi dan informasi; pembangunan keamanan dan ketertiban; serta pembangunan keuangan daerah.

Pasal 8

Periodisasi pelaksanaan RPJPD Provinsi terbagi dalam empat tahapan, yaitu :

- a. Tahap Pertama (2005-2009);
- b. Tahap Kedua (2010-2014);

c. Tahap

- c. Tahap Ketiga (2015-2019);
- d. Tahap Keempat (2020-2024).

BAB II
PROGRAM PEMBANGUNAN
PROVINSI JAWA TIMUR

Pasal 9

- (1) Program Pembangunan Provinsi Jawa Timur periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD Provinsi dan RTRWP yang merupakan satu kesatuan dokumen sistem perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Penjabaran dari RPJPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) RTRWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebijakan yang berfungsi sebagai matra ruang RPJPD Provinsi untuk penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Timur dalam perodesasi yang telah ditentukan.

Pasal 10

- (1) RPJPD Provinsi menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Timur yang memuat Visi, Misi dan Program Gubernur.
- (2) RPJMD Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur, Gubernur yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD Provinsi untuk tahun pertama periode Pemerintahan Gubernur berikutnya.
- (2) RKPD Provinsi yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode Pemerintahan Gubernur berikutnya.

Pasal 12

- (1) RPJPD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota yang memuat visi, misi dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota.

(2) RPJPD

- (2) RPJPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota yang memuat visi, misi dan program Bupati/Walikota.
- (3) RPJMD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Provinsi.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (3) RPJPD Provinsi dapat ditinjau kembali setiap 5 tahun.

BAB IV PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 23 April 2009

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

PENJELASAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2009
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2005 – 2025

I. UMUM

Sebagai salah satu instrumen manajemen pembangunan daerah, keberadaan RPJPD Provinsi merupakan arahan umum pemangku kepentingan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Jawa Timur yang lebih baik.

Perwujudan kesejahteraan sosial itu sendiri memungkinkan pencapaiannya melalui pembangunan ekonomi secara berkelanjutan dan berkeadilan yang dilandaskan oleh pengetahuan yang memadai, tata kelola yang baik, kepastian hukum, penegakan hukum, stabilitas politik dan kerukunan sosial yang memungkinkan berlangsungnya peradaban saling asah, asih dan asuh.

Sumberdaya ekonomi yang dikuasai sebagian besar masyarakat Jawa Timur adalah sumberdaya agrobisnis, yaitu sumberdaya agrobisnis yang berbasis tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan kehutanan. Oleh karena itu, cara yang paling efektif untuk mengembangkan Jawa Timur adalah melalui pengembangan agrobisnis. Pengembangan agrobisnis yang dimaksud bukan hanya pengembangan pertanian primer, tetapi juga mencakup subsistem agrobisnis hulu, yaitu industri-industri yang menghasilkan sarana produksi bagi pertanian primer seperti industri pembibitan/pembenihan, industri agro-otomotif, industri agro-kimia, dan subsistem agrobisnis hilir, yaitu industri-industri yang mengolah hasil pertanian primer menjadi produk olahan beserta kegiatan perdagangannya maupun subsistem pendukungnya seperti pendidikan perbangkan, dan jasa-jasa lainnya untuk mendukung pengembangan agrobisnis.

Pengembangan agrobisnis yang dimaksud ini juga tidak hanya pada pemanfaatan kelimpahan sumberdaya yang ada atau mengandalkan keunggulan komparatif sebagaimana sekarang ini, tetapi secara bertahap akan terus dikembangkan dari agrobisnis yang didorong oleh modal kearah agrobisnis yang didorong oleh inovasi. Dengan perkataan lain dalam 20 tahun mendatang, keunggulan komparatif agrobisnis di seluruh Jawa Timur diharapkan dapat ditransformasikan menjadi keunggulan bersaing melalui penembangan mutu sumberdaya, teknologi, kelembagaan dan organisasi ekonomi lokal yang telah ada pada masa masyarakat disetiap daerah, (bukan menggantikannya dengan sesuatu yang benar-benar baru).

produk

Dengan transformasi agrobisnis seperti ini, kemampuan rakyat untuk menghasilkan produk-produk agrobisnis yang saat ini masih didominasi oleh produk-produk agrobisnis yang bersifat *natural resources and unskill labor based*, secara bertahap beralih kepada produk yang bersifat *capital and skill labor based* dan kemudian kepada produk yang bersifat *knowledge and skill labor based*. Dengan transformasi produk agrobisnis yang demikian, maka produk-produk agrobisnis yang dihasilkan masyarakat Jawa Timur diharapkan akan dapat mampu bersaing dan memasuki segmen pasar yang lebih luas dipasar internasional. Pengembangan produk yang demikian juga akan memperbesar manfaat ekonomi yang dinikmati oleh masyarakat Jawa Timur secara keseluruhan.

Selanjutnya, agar pengembangan *platform* bersama yang memungkinkan berlangsungnya peradaban saling asah, asih dan asuh sebagaimana disebut sebelumnya, diharapkan akan menjadi kokoh bila dilandasi dengan nilai-nilai yang disepakati bersama dalam berbangsa, yaitu Pancasila, kepercayaan yang mengakar pada agama-agama yang dianut oleh masyarakat, dan etika yang tumbuh dan menjadi norma masyarakat.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Naskah Peraturan Daerah ini terdiri dari 8 Pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian beserta penjelasannya, dan lampiran yang memuat materi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025.

Kurun waktu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah 20 (dua puluh) tahun. RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 diharapkan dapat berfungsi sebagai dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang mengakomodasi berbagai aspirasi yang ada dan digunakan sebagai pedoman, arah pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 tahun, dan dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

huruf a

Perekonomian modern diartikan ekonomi yang dibangun dengan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya yang lebih kreatif baik dari sisi pembiayaan maupun strategis pembangunan.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Tata Kelola Pemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan interaksi yang konstruktif diantara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Program pembangunan adalah uraian secara umum tentang arah kebijakan pembangunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Maksud dari RPJPD Kabupaten/Kota mengacu kepada RPJPD Provinsi bukan membatasi kewenangan Kabupaten/Kota, tetapi agar terdapat acuan yang jelas, sinergi dan keterkaitan dari setiap perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota berdasarkan kewenangan otonomi yang dimilikinya berdasarkan *platform* RPJPD Provinsi. RPJPD Kabupaten/Kota dijabarkan lebih lanjut oleh Bupati/Walikota berdasarkan visi dan misi Bupati/Walikota yang diformulasikan dalam bentuk RPJMD Kabupaten/Kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Provinsi dilakukan oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan RPJPD Provinsi dari masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

DAFTAR ISI LAMPIRAN

BAB I	PENDAHULUAN	Hal
	A. Latar Belakang	I-1
	B. Maksud dan Tujuan	I-2
	C. Sistematika Penyusunan	I-2
BAB II	KONDISI UMUM	
	A. Kondisi Saat Ini	II-4
	1. Sosial Budaya	II-4
	2. Ekonomi	II-7
	3. Sarana Prasarana Wilayah	II-9
	B. Modal Dasar dan Potens	II-13
	C. Gambaran Tata Ruang Wilayah	II-13
	D. Posisi Jawa Timur dalam Konstelasi Nasional	II-18
BAB III	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	
	A. Ancaman Krisis Pangan	III-21
	B. Krisis Energi	III-22
	C. Globalisasi dan Perdagangan Bebas	III-23
	D. Kemiskinan, Kesenjangan, Pengangguran dan Kualitas SDM	III-24
	E. Perubahan Iklim dan Pemanasan Global	III-26
BAB IV	VISI, MISI DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2005 – 2025	
	A. Visi	IV-27
	B. Misi	IV-29
	C. Strategi	IV-30
BAB V	ARAH PEMBANGUNAN DAN PERIODESASI RPJPD	
	A. Arah Pembangunan	V-32
	1. Arah Kebijakan Misi Mengembangkan Perekonomian Modern Berbasis Agrobisnis	V-32
	a. Transformasi Sistem Agrobisnis	V-32
	b. Pengembangan Sistem Informasi Agrobisnis	V-33

c.	Pengembangan Sumberdaya Agrobisnis	V-33
d.	Pembinaan Sumberdaya Manusia	V-34
e.	Pembangunan Fasilitas Penelitian dan Pengembangan Pertanian	V-34
f.	Penguatan Struktur Perekonomian	V-34
g.	Penguatan Struktur Industri	V-35
h.	Optimalisasi Perdagangan	V-35
i.	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	V-36
j.	Optimalisasi Peran Lembaga Keuangan dan Perbankan	V-36
k.	Percepatan Investasi	V-37
l.	Pengembangan Pariwisata	V-38
2.	Arah Kebijakan Misi Mewujudkan SDM yang Handal, Berakhlak Mulia dan Berbudaya	V-38
a.	Pembangunan Pendidikan	V-38
b.	Pembangunan Kehidupan Beragama	V-39
c.	Pengembangan Kebudayaan	V-39
d.	Pembangunan Pemuda	V-40
e.	Pemberdayaan Perempuan	V-40
f.	Pembangunan dan Pematapan Jatidiri Bangsa ..	V-41
3.	Arah Kebijakan Misi Mewujudkan Kemudahan Memperoleh Akses untuk Meningkatkan Kualitas Hidup	V-41
a.	Pembangunan Kesehatan	V-41
b.	Pembangunan Kependudukan	V-42
c.	Pembangunan Ketenagakerjaan	V-43
d.	Pembangunan Kesejahteraan Sosial	V-43
e.	Penanggulangan Kemiskinan	V-44
4.	Arah Kebijakan Misi Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Buatan	V-45
a.	Pengembangan Keanekaragaman Hayati	V-45
b.	Pengembangan Energi	V-45
c.	Pendayagunaan Sumberdaya Alam Terbarukan ..	V-46
d.	Pendayagunaan Sumberdaya Alam Tak-Terbarukan	V-46
e.	Pengembangan Potensi Sumber Daya Kelautan ...	V-47
f.	Penanganan Kebencanaan	V-48

5. Arah Kebijakan Misi Mengembangkan Infrastruktur Bernilai Tambah Tinggi	V-49
a. Pembangunan Transportasi	V-49
b. Pengelolaan Sumberdaya Air	V-49
c. Perumahan dan Permukiman	V-50
d. Pengembangan Wilayah	V-50
e. Penyelenggaraan Penataan Ruang	V-51
6. Arah Kebijakan Misi Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	V-52
a. Pembangunan Hukum	V-52
b. Penyelenggaraan Pemerintahan	V-52
c. Pembangunan Politik	V-53
d. Pembangunan Komunikasi dan Informasi	V-54
e. Pembangunan Keamanan dan Ketertiban	V-54
f. Pembangunan Keuangan Daerah	V-55
B. Periodesasi RPJPD	V-55
1. Tahap Pertama (2005 – 2009)	V-56
2. Tahap Kedua (2010 – 2014)	V-57
3. Tahap Ketiga (2015 – 2019)	V-60
4. Tahap Keempat (2020 – 2024)	V-61
BAB VI PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	VI-104
A. Arah Kebijakan Pendanaan Pembangunan Daerah	VI-104
B. Strategi Pendanaan Pembangunan Daerah	VI-104
BAB VII PENUTUP	VI-114
A. KAIDAH	VI-114
B. PRASYARAT	VI-115

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

TANGGAL : 23 APRIL 2009

NOMOR : 1 TAHUN 2009

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2005 – 2025**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025 adalah dokumen perencanaan yang substansinya memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, bertahap dan sistimatis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan Kabupaten/Kota dalam kurun waktu 20 tahun yang akan datang.

RPJPD Provinsi Jawa Timur memiliki karakteristik sebagai berikut: *pertama* lebih memfokuskan pada identifikasi dan penanganan isu-isu strategik dengan sasaran yang dinamis; *kedua* memberikan arah pembangunan selama 20 Tahun kedepan; *ketiga* lebih berorientasi pada tindakan antisipatif.

RPJPD Provinsi Jawa Timur dimaksudkan untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat yang penyusunannya memperhatikan dinamika perubahan masyarakat melalui pendekatan : teknokratik, politik, partisipatif, atas - bawah (*top-down*), dan bawah - atas (*bottom-up*). Dengan demikian perencanaan yang disusun merupakan kesepakatan bersama, menjadi acuan melaksanakan pembangunan secara berkesinambungan.

B. Maksud dan Tujuan

B. Maksud dan Tujuan

B.1. Maksud

Maksud disusunnya RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 adalah untuk memberikan arahan dan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama.

B.2. Tujuan

Tujuan disusunnya RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 adalah :

1. Menjamin terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar daerah, antar pusat dan daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan ;
3. Mengoptimalkan komponen bangsa (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha);
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan ;
5. Menjaga kesinambungan dan kesatuan arah antar rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

C. Sistematika Penyusunan

RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan yang memuat latar belakang, maksud dan tujuan, dan sistematika penyusunan.
- Bab II : Kondisi Umum yang memuat penjelasan umum mengenai kondisi eksisting, potensi dan modal dasar Jawa Timur dalam penyusunan RPJP Daerah
- Bab III : Analisis Isu-Isu Strategis, yang memuat isu isu yang memberikan justifikasi terhadap visi Jawa Timur Tahun 2025.

Bab IV :

- Bab IV : Visi dan Misi Pembangunan Daerah Tahun 2005–2025, yang memuat visi pembangunan Provinsi Jawa Timur dan misi pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut.
- Bab V : Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 yang memuat kebijakan dan periodisasi pentahapan pencapaian visi dan misi Jawa Timur.
- Bab VI : Pendanaan Pembangunan Daerah yang memuat arah kebijakan pendanaan dan strategi pendanaan pembangunan.
- Bab VII : Penutup yang memuat Kaidah Pelaksanaan dan Prasyarat.

BAB II KONDISI UMUM

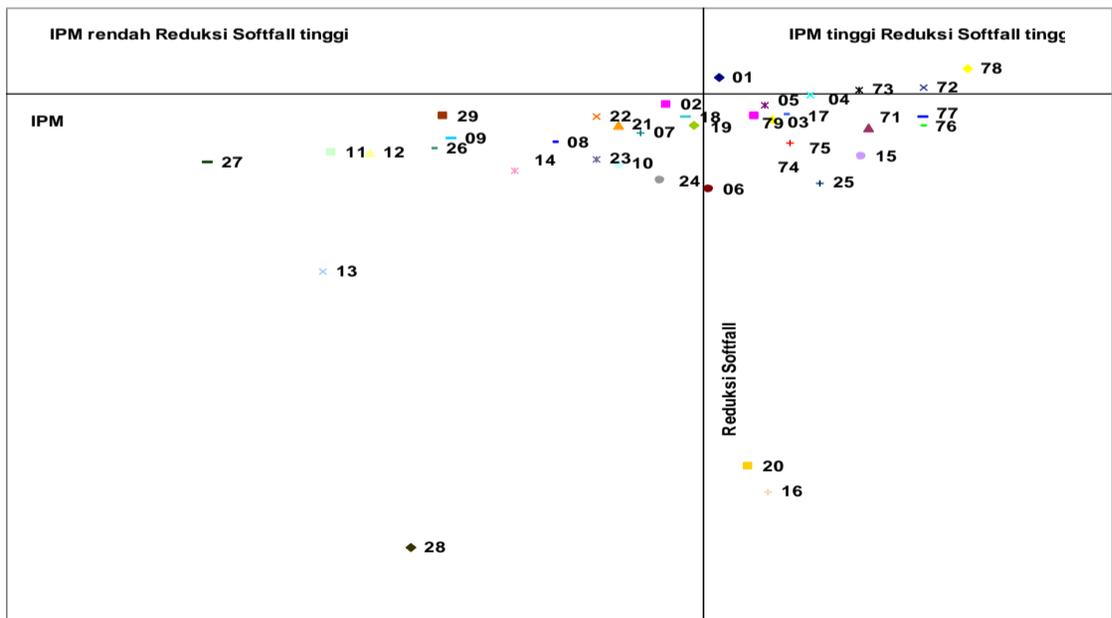
A. Kondisi Saat Ini

Pembangunan yang telah dilaksanakan di Jawa Timur selama ini telah menunjukkan perkembangan yang lebih baik di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang sosial budaya, ekonomi dan sarana prasarana wilayah.

1. Sosial Budaya

Berdasarkan data BPS jumlah penduduk Jawa Timur pada tahun 2007 sebanyak 36.895.571 jiwa dengan kepadatan 798 jiwa/Km². Dari jumlah tersebut yang tinggal diperkotaan sebesar 40,65% sedangkan penduduk perdesaan sebesar 59,35%. Jumlah penduduk yang besar tersebut merupakan sumber daya manusia yang dapat menjadi subyek dan sekaligus obyek pembangunan. Namun demikian, kuantitas yang besar tersebut belum sebanding dengan kualitas yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat antara lain dari :

- a. Kinerja pembangunan manusia yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pada tahun 2007 mencapai 68,06 %. IPM terendah sebesar 53,24 dan tertinggi 75,05. Apabila dilihat dari perbandingan antar Kabupaten/Kota dan reduksi shortfall dalam 4 (empat) kuadran sebagaimana gambar 2.1 berikut :



Pada

Pada gambar 2.1 sebagian besar Kabupaten berada di kuadran III dan IV, artinya reduksi *shortfall* (ketertinggalan) lebih lambat dari rata-rata Jawa Timur. Terlihat pula bahwa hanya 4 Kabupaten/Kota saja yang menempati kuadran I (mempunyai IPM tinggi dengan reduksi *shortfall* yang tinggi pula) dan tidak ada satupun Kabupaten/Kota yang menempati kuadran II (mempunyai IPM rendah tetapi reduksi *shortfall* yang tinggi). Perlu usaha yang nyata untuk membenahi Kabupaten/Kota yang memiliki reduksi *shortfall* rendah, khususnya Kabupaten/Kota di daerah tapal kuda.

- b. Taraf pendidikan penduduk di Jawa Timur mengalami peningkatan yang antara lain diukur dengan menurunnya angka buta huruf penduduk usia 10-40 tahun dari 3,65 % pada tahun 2005 menjadi 3,47 % pada tahun 2006 dan pada tahun 2007 mencapai 3,54%. Perbaikan tingkat pendidikan tersebut didorong oleh meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) atau persentasi penduduk yang bersekolah pada semua kelompok usia. Perkembangan APS tahun 2006 sampai dengan 2007 untuk penduduk usia 7-12 tahun meningkat dari 98,22 % menjadi 98,42%, penduduk usia 13-15 tahun meningkat dari sebesar 85,98 %, menjadi 86,42% dan penduduk usia 16-18 tahun meningkat dari 56,77% menjadi 58,54%. Disamping itu untuk mengilustrasikan perkembangan pendidikan kejuruan yang mengarah kepada out put kelulusan dengan tingkat ketrampilan kerja yang diukur melalui ratio murid SMK dibanding dengan SMU tahun ajaran 2006/2007 mencapai 68,57 %. Di samping itu output pendidikan masih dihadapkan pada kompetensi lapangan kerja yang berpengaruh pada penyerapan angkatan kerja.
- c. Kinerja pembangunan kesehatan, pada tahun 2007 menunjukkan perkembangan yang lebih baik, hal ini ditunjukkan oleh Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran penduduk menurun menjadi sebesar 32,93, Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran menurun menjadi sebesar 349 dan Angka Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan mencapai 87,89%. Namun demikian tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan, serta tingginya balita kurang gizi masih menjadi masalah besar dalam membentuk generasi yang mandiri dan

dan berkualitas. Disamping itu usia harapan hidup yang menjadi pendukung Indek Pembangunan Manusia mengalami perkembangan yang terus meningkat dan sampai dengan tahun 2007 mencapai 68,69.

- d. Kualitas tenaga kerja di Jawa Timur relatif masih rendah. Hal ini ditunjukkan oleh struktur tenaga kerja pada tahun 2007 berdasarkan tingkat pendidikan yang masih didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SD dan tidak tamat SD sebesar 57,99%, sedangkan untuk lulusan SLTP mencapai 16,35 %, dan SMTA sebesar 14,24%, serta diploma dan sarjana sebesar 4,63%. Tingkat pendidikan angkatan kerja yang rendah berpengaruh kepada peluang memperoleh kesempatan kerja, hal ini disebabkan oleh rendahnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja. Kondisi demikian akan mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Data Sakernas 2008 menunjukkan bahwa TPT pada kelompok pendidikan rendah (SD) lebih kecil dibandingkan tingkat pendidikan di atasnya, hal ini disebabkan oleh kecenderungan kelompok penduduk berpendidikan rendah bersedia melakukan pekerjaan apa adanya sebagai pekerja bebas di sektor informal.

Selanjutnya untuk persebaran tenaga kerja sektoral, tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian mencapai 45 %. Tingginya jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian apabila dibandingkan dengan kontribusi sektor pertanian pada struktur pertumbuhan ekonomi tahun 2007 yang mencapai 16,66 %, menunjukkan tingkat pemerataan yang relatif tinggi, namun apabila dilihat dari tingkat produktivitas menunjukkan masih rendahnya produktivitas tenaga kerja di sektor tersebut.

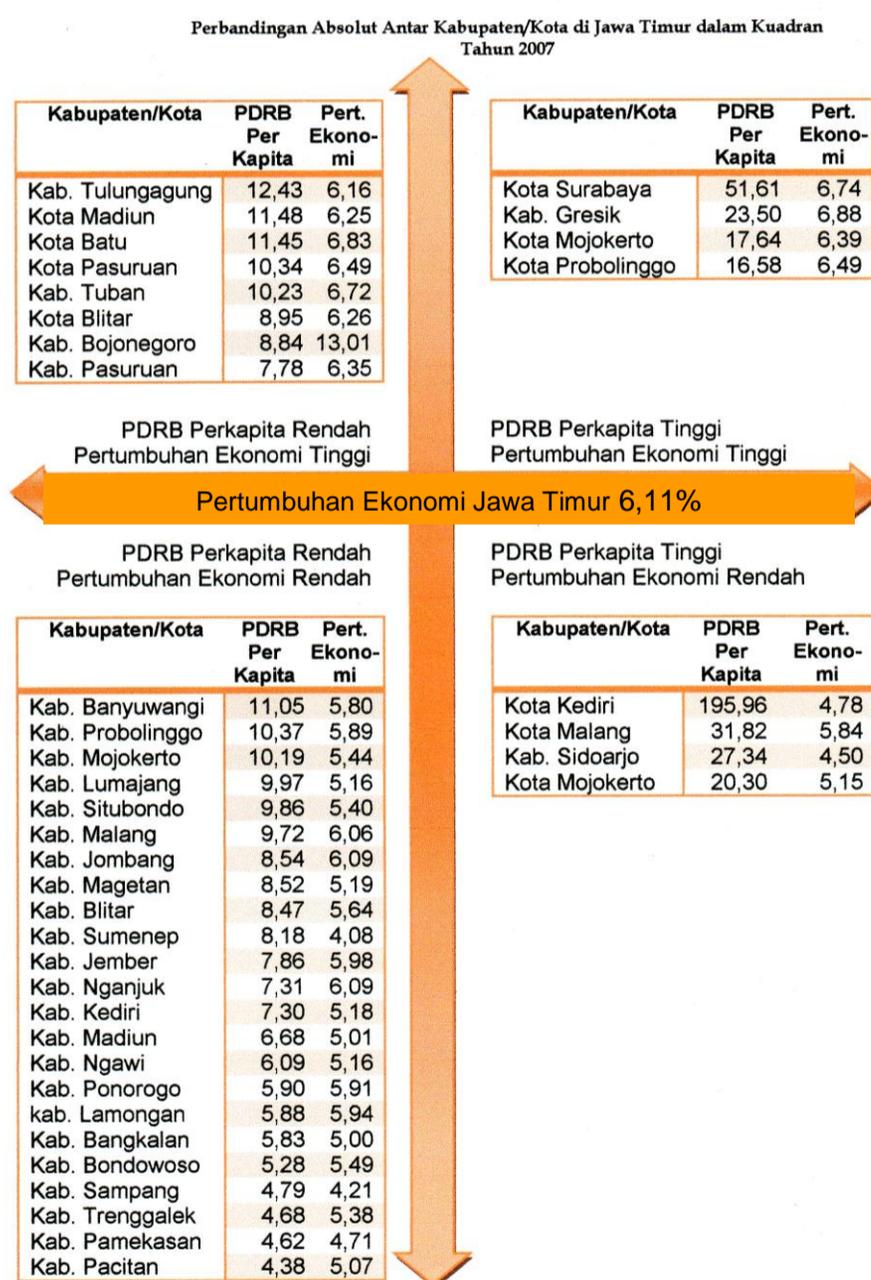
- e. Prosentase jumlah penduduk miskin dalam kurun waktu 2 tahun terakhir mengalami penurunan dari 19,89 % pada tahun 2006 menjadi 18,89 % pada tahun 2007. Penurunan jumlah penduduk miskin yang signifikan merupakan kontribusi yang signifikan dari semua pelaku pembangunan baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha serta masyarakat melalui kebijakan pembangunan spasial dan sektoral. Meski demikian, keberhasilan penurunan penduduk miskin masih dihadapkan pada dampak krisis keuangan global yang harus diantisipasi agar daya beli masyarakat tetap dipertahankan untuk mampu melakukan transaksi permintaan barang dan jasa.

2. Ekonomi

2. Ekonomi

- a. Kinerja perekonomian Jawa Timur paska krisis sampai saat ini menunjukkan peningkatan yang cukup berarti, yang ditunjukkan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2006 sebesar 5,80 % menjadi 6,11 % pada tahun 2007. Kontribusi terbesar perekonomian daerah masih didominasi oleh sektor industri pengolahan sebesar 26,46%, sektor perdagangan, hotel dan restoran 30,77% dan sektor pertanian 16,66%. Khusus untuk sektor industri pengolahan, kontribusi terbesar didukung oleh sub sektor makanan, minuman dan tembakau mencapai 54,96 %.

Secara keseluruhan perbandingan absolut perekonomian antar Kabupaten/Kota se Jawa Timur tergambar seperti grafik berikut :



b. Jawa Timur

- b. Jawa Timur dikenal sebagai daerah lumbung pangan namun sumbangan sektor pertanian terhadap perekonomian di Jawa Timur dari tahun ke tahun semakin turun. Pada tahun 2005, kontribusi sektor pertanian sebesar 17,44%, turun menjadi sebesar 17,14% pada tahun 2006 dan turun kembali menjadi sebesar 16,66% pada tahun 2007. Sedangkan angkatan kerja yang bekerja di sektor pertanian sebesar 45 %. Ini menunjukkan bahwa tingkat produktivitas sektor pertanian relatif masih rendah tetapi memiliki tingkat pemerataan yang cukup tinggi.
- c. Kinerja sektor pertambangan mengalami peningkatan dari 1,96 % pada tahun 2005, menjadi 2,01 % pada tahun 2006 dan menjadi 2,09 % pada tahun 2007. Kedepan produksi dan kontribusi sektor pertambangan khususnya minyak dan gas diharapkan dapat terus mengalami peningkatan dengan beroperasionalnya 14 wilayah (blok) antara lain Brantas, Tuban, Bawean & Kangean, Madura sebelah Barat (Offshore West Madura) & Poleng, Cepu, Selat Madura (Madura Strait), Camar, Pangkah, Blora, Sampang, Lepas Pantai Madura (Madura Offshore), Ketapang dan Karapan.
- d. Pembangunan koperasi dan UMKM telah menunjukkan kinerja yang cukup signifikan, hal ini ditunjukkan oleh tingkat pertumbuhan aset koperasi rata-rata mencapai 3,5% pertahun, dimana tahun 2007 telah mencapai Rp. 9,6 trilyun dengan jumlah koperasi sebanyak 17.918 unit. Selanjutnya nilai tambah UKM Jawa Timur juga menunjukkan perkembangan yang cukup baik, yaitu pada tahun 2007 mencapai Rp. 284,38 trilliun atau naik dibandingkan tahun 2006 sebesar Rp. 250,66 trilliun (ADHB). Dengan demikian, peranan nilai tambah UKM terhadap PDRB Jawa Timur pada tahun 2007 sebesar 53,49 %, naik dibandingkan tahun 2006 sebesar 53,26 %, hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemberdayaan Koperasi dan UMKM cukup mendapat dukungan masyarakat.
- e. Sektor Perbankan tahun 2007 terdapat persetujuan kredit baru oleh perbankan sebesar Rp. 92,15 trilyun atau meningkat 23,82% dibandingkan tahun 2006 sebesar Rp. 74,42 trilyun. Dari jenis penggunaan, struktur atau komposisi kredit masih didominasi oleh kredit modal kerja yang mencapai 66%. Dari sisi sektoral, pangsa kredit

terbesar

terbesar hingga tahun 2007 masih terdapat pada sektor industri pengolahan yang mencapai 29,75%, sementara itu sektor perdagangan, hotel dan restoran memiliki komposisi sebesar 29,41%. Secara keseluruhan penyaluran kredit pada sektor produktif (meliputi sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa) mencapai 66,63% dari total kredit. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Jawa Timur sebagai daerah industri dan perdagangan sangat membutuhkan pembiayaan yang cukup besar untuk mendukung kegiatan sektor-sektor tersebut. Khusus untuk kredit di sektor pertanian mencapai Rp. 4,967 triliun yang merupakan kredit dari Bank Pemerintah, Bank Swasta dan BPR.

- f. Kinerja investasi yang diharapkan mampu mendukung basis fundamental perekonomian Jawa Timur kinerjanya belum optimal untuk Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Hal ini antara lain disebabkan adanya luapan Lumpur Lapindo – Sidoarjo yang terjadi sejak Bulan Mei tahun 2006 dan terus terjadi sampai sekarang. Pada tahun 2007 nilai persetujuan PMA sebesar US \$ 855,23 juta dengan jumlah proyek 85 buah. Sementara itu nilai persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2007 sebesar Rp. 16.705 milyar dengan jumlah proyek sebanyak 22 proyek. Dari persetujuan investasi tersebut, investasi yang bergerak di sektor agrobisnis untuk PMA mencapai 23 proyek dengan nilai investasi US \$ 258,396 juta, sedangkan PMDN di sektor agrobisnis mencapai 6 proyek dengan nilai investasi Rp. 5.573 milyar.

3. Sarana Prasarana Wilayah

- a. Transportasi secara umum berfungsi sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah. Pada umumnya infrastruktur transportasi mengemban fungsi pelayanan publik dan sebagai industri jasa. Untuk mendukung percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, fungsi pelayanan umum transportasi dilakukan melalui penyediaan jasa transportasi guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat luas dengan harga terjangkau baik di perkotaan maupun perdesaan,

mendukung

mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedalaman dan terpencil, melancarkan mobilitas distribusi barang dan jasa serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi regional. Kondisi transportasi di Jawa Timur tergambar antara lain melalui kinerja jaringan jalan, prasarana kereta api dan pelabuhan.

Kondisi jalan sampai dengan tahun 2007 adalah:

- 1). Panjang Jalan Provinsi : 1.439,18 Km, dengan kondisi mantap 81,88% dan kondisi tidak mantap 18,12%.
- 2). Panjang Jalan Nasional : 1.899,21 Km dengan kondisi mantap 82,46% dan kondisi tidak mantap 17,54 %.
- 3). Panjang Jalan Eks Provinsi : 561,80 Km dengan kondisi mantap 75,96 % dan kondisi tidak mantap 24,04 %
- 4). Panjang Jalan Provinsi + Eks Provinsi : 2.000,98 dengan kondisi mantap 78,95% dan kondisi tidak mantap 21,05%

Perkembangan pembangunan jalan tol di Jawa Timur sampai dengan tahun 2008, adalah sebagai berikut :

- 1). Jalan Tol yang sudah beroperasi sepanjang 82,50 km yaitu : Jalan Tol Surabaya-Gempol; Jalan Tol Surabaya-Gresik dan Jalan Tol Simpang Susun Waru-Bandara Juanda.
- 2). Jalan Tol yang dalam tahap konstruksi sepanjang 94,45 km yaitu : Jalan Tol Surabaya-Mojokerto; Jalan Tol Kertosono-Mojokerto dan Jembatan Surabaya-Madura.
- 3). Jalan Tol dalam tahap pembebasan tanah sepanjang 57,81 km yaitu Jalan Tol Gempol-Pandaan; Jalan Tol Gempol-Pasuruan dan Jalan Tol Porong-Gempol (relokasi).

Untuk prasarana transportasi perkeretaapian dilaksanakan oleh PT. KAI, dengan mempergunakan jaringan rel sepanjang 986.307 Km dan jaringan rel yang tidak beroperasi sepanjang 590,474 Km.

Sedangkan pelabuhan laut di Jawa Timur terbagi menjadi 3 yaitu :

- 1). Pelabuhan Umum sebanyak 7 Unit
- 2). Pelabuhan Umum yang tidak diusahakan sebanyak 9 buah.
- 3). Pelabuhan Khusus.

Berdasar fungsi pelayanan :

- 1). Pelabuhan Utama, terdiri dari Pelabuhan Tanjung Perak dan Tanjung Wangi

2). Pelabuhan

- 2). Pelabuhan Regional terdiri dari Pelabuhan Gresik, Pasuruan, Probolinggo, Panarukan dan Kalianget.
 - 3). Pelabuhan Lokal.
- b. Secara hidrologis Jawa Timur dikelompokkan dalam 7 (tujuh) Wilayah Sungai (WS) yaitu WS Brantas (Strategis Nasional), WS Bengawan Solo (lintas Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah), WS Welang Rejoso (lintas Kabupaten/Kota Pasuruan dan Probolinggo), WS Pekalen Sampean (lintas Kabupaten Probolinggo, Lumajang dan Situbondo), WS Baru Bajulmati (lintas Kabupaten Situbondo dan Banyuwangi), WS Bondoyudo Bedadung (lintas Kabupaten Lumajang dan Jember) dan WS Madura (lintas Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep), yang masing-masing WS tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda satu sama lain.

Dari segi potensi alamiah, sumber daya air Provinsi Jawa Timur memiliki kapasitas tampung yang relatif kecil dibanding dengan Provinsi lain di Pulau Jawa. Potensi air tahun 2007 terukur dengan jumlah aktiva 59.146,40 juta M³ terdiri dari air permukaan 47.936,51 juta M³ dan air tanah sebesar 11.209,89 juta M³. Air yang tersedia dari tampungan buatan, tampungan alam dan lainnya yang terkelola dari sistem penyediaan air adalah sebesar 19.339,95 Juta M³ per tahun dari jumlah kebutuhan sebesar 22.064,11 Juta M³ (37,3%) yang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan domestik, pertanian, peternakan, perikanan, industri dan *maintenance flow*. Diperkirakan devisit pelayanan air sebesar 2.724,15 Juta M³ per tahun sedangkan sisa air yang belum dimanfaatkan adalah sebesar 37.082,29 juta M³ (62,7 %) berupa air hujan yang belum dapat ditampung dalam waduk-waduk, embung dan lain-lain yang terbuang kelaut pada saat musim hujan.

Dukungan prasarana irigasi yang mengalami degradasi masih belum dapat diandalkan karena hanya mengandalkan jaringan irigasi yang pasokan airnya relatif terkendali karena berasal dari bangunan-bangunan penampung air, dan sisanya hanya mengandalkan ketersediaan air di sungai. Selain itu, laju pengembangan sarana dan prasarana pengendali daya rusak air juga masih belum mampu mengimbangi laju degradasi lingkungan penyebab banjir sehingga

bencana

bencana banjir masih menjadi ancaman di beberapa wilayah. Sejalan dengan perkembangan ekonomi wilayah, banyak daerah telah mengalami defisit air permukaan, sedangkan di sisi lain konversi lahan pertanian telah mendorong perubahan fungsi prasarana irigasi sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan pengendalian. Pada sisi pengembangan institusi pengelolaan sumber daya air, lemahnya koordinasi antar instansi dan antar daerah otonom telah menimbulkan pola pengelolaan sumber daya air yang tidak efisien, bahkan tidak jarang saling berbenturan. Sedangkan, kesadaran dan partisipasi masyarakat, sebagai salah satu prasyarat terjaminnya keberlanjutan pola pengelolaan sumber daya air, masih belum mencapai tingkat yang diharapkan karena masih terbatasnya kesempatan dan kemampuan yang dimiliki.

- c. Kebutuhan tenaga listrik Jawa Timur dilayani dari *energy transfer* sistem interkoneksi Jawa-Madura-Bali (JAMALI) dan PLTD. PLTD yang dimiliki oleh PLN Distribusi Jawa Timur dengan kapasitas terpasang total 6.497 kW digunakan pada *isolated area* seperti di pulau-pulau: Giligenting, Kangean, Mandangin, Sapeken, Sapudi, Talango, Perikanan dan Tambak. Kapasitas ini masih lebih rendah bila dibandingkan dengan potensi kebutuhan listrik yang ada. Sampai dengan tahun 2007 jumlah desa berlistrik adalah 8.421 desa dari total sebanyak 8.497 desa di Jawa Timur. Dengan demikian sudah 99,25 % desa di Jawa Timur yang terjangkau pasokan listrik, namun tingkat elektrifikasinya (rumah yang sudah teraliri listrik) baru mencapai 73%.
- d. Kinerja pembangunan sarana dan prasarana permukiman (perumahan, air limbah, persampahan dan drainase) telah mengalami banyak kemajuan, namun cakupan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan masih jauh dari memadai. Hal ini terindikasi dari tingkat pelayanan air bersih perpipaan di kawasan perkotaan tahun 2007 baru mencapai 40,8%, sedangkan di kawasan perdesaan hanya mencapai 46,5%. Cakupan pelayanan sarana dan prasarana pengolahan air limbah dasar di perkotaan telah mencapai 76,5% dan di perdesaan 47,4%, untuk tingkat pengelolaan persampahan mencapai 52%. Kebutuhan perumahan di perkotaan mengalami *backlog* sebesar 10,3% sedangkan di perdesaan sebesar 4,7%.

B. Modal Dasar

B. Modal Dasar dan Potensi

Modal dasar pembangunan Jawa Timur adalah seluruh sumber kekuatan nasional dan daerah, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dan didayagunakan dalam pembangunan.

1. Wilayah Provinsi Jawa Timur yang bercirikan kepulauan dan kelautan serta berada di ujung timur pulau Jawa menjadi pintu gerbang dan penghubung Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia ;
2. Kekayaan alam yang terkandung di darat, laut, dan udara yang dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat.
3. Budaya Jawa Timur yang heterogen menjadi ciri Bhinneka Tunggal Ika yang terbuka terhadap nilai-nilai tradisional dan modern yang positif.
4. Penduduk Jawa Timur yang besar jumlahnya dan menempati urutan kedua terbesar di Indonesia merupakan sumber daya manusia yang potensial bagi pembangunan.
5. Perkembangan politik yang telah melalui tahap awal reformasi telah memberikan perubahan yang mendasar bagi demokratisasi di bidang politik dan ekonomi serta desentralisasi di bidang pemerintahan dan pengelolaan pembangunan.

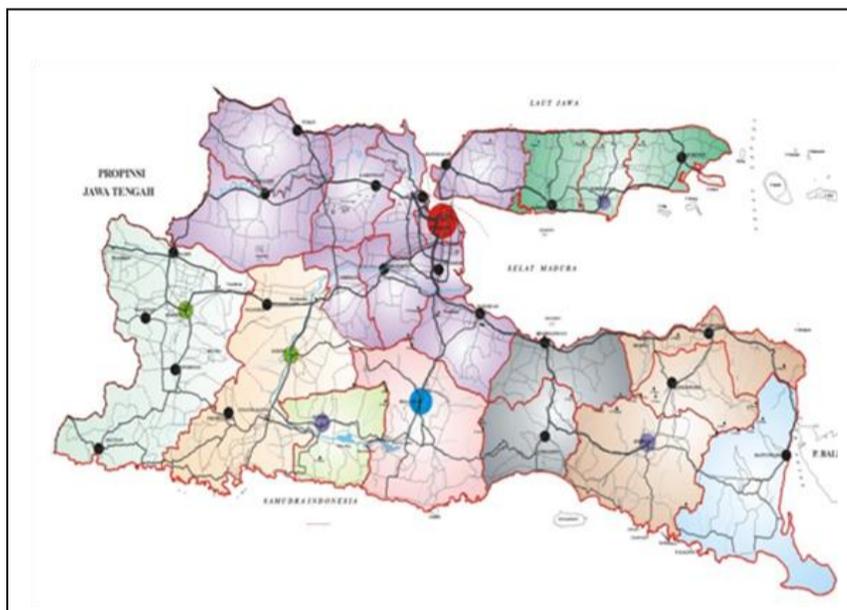
C. Gambaran Tata Ruang Wilayah

Provinsi Jawa Timur mempunyai 229 pulau dengan luas wilayah daratan sebesar 47.130,15 Km² dan lautan seluas 110.764,28 Km². Wilayah ini membentang antara 111° 0' BT – 114° 4' BT dan 7° 12' LS – 8° 48' LS. Sisi Utara wilayahnya berbatasan dengan Laut Jawa, Selatan dengan Samudra Indonesia, Timur dengan Selat Bali/Provinsi Bali dan Barat dengan Provinsi Jawa Tengah.

Secara umum perkembangan struktur ruang Jawa Timur telah mengarah pada dominasi kawasan perkotaan mempengaruhi perekonomian wilayah pedesaan. Urbanisasi dan aglomerasi wilayah adalah fenomena yang terus berkembang mengarah ke hirarkhi perkotaan yang lebih besar. Untuk mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan yang berkembang cenderung terus membesar dan berpotensi mendorong perkembangan *mega urban*, menyeimbangkan perkembangan perkotaan dan mengendalikan perkembangan kawasan terbangun di perkotaan serasi dengan kawasan perdesaan

perdesaan sesuai daya dukung dan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan, maka struktur ruang wilayah Jawa Timur dibagi dalam 9 Satuan Wilayah Pengembangan (SWP). Persebaran 9 SWP beserta tingkat kesenjangan wilayahnya dapat dilihat pada peta dan tabel berikut :

Peta 2.3 Perwilayahan Pembangunan Provinsi Jawa Timur



- Keterangan :
 Pembagian Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) di Jawa Timur
 1. GKS Plus
 2. Malang Raya
 3. Madiun dsk
 4. Kediri dsk
 5. Probolinggo – Lumajang
 6. Blitar
 7. Jember dsk
 8. Banyuwangi dsk
 9. Madura dan Kepulauan

Sumber : Perda 2/2006

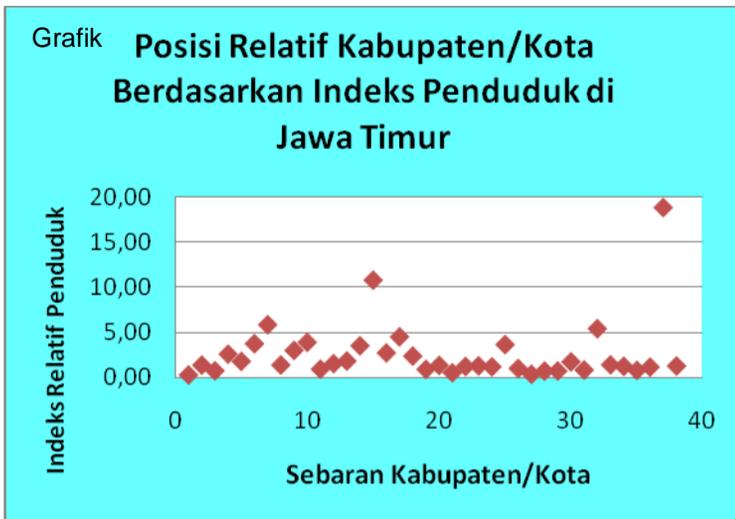
Tabel 2.1
 Koefisien Varians Williamson Jawa Timur
 Tahun 2004-2008

Tahun	Indeks V_w	Perubahan
2004	114,54	1,12121
2005	116,25	1,49293
2006	116,00	-0,21505
2007*)	115,38	-0,52586

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur
 Keterangan: *) Angka Diperbaiki

Kesenjangan antar wilayah yang terindikasi mengalami kenaikan dari tahun 2004 ke tahun 2005 seperti tertera dalam tabel di atas, ternyata mampu diantisipasi perkembangannya dan bahkan mengalami penurunan yang signifikan pasca diterapkannya sistem perwilayahan pembangunan dengan 9 SWP tersebut tahun 2006 dan 2007. Meski demikian jika dilihat dari indeks gabungan sarana/prasarana wilayah dan kependudukan masih terlihat adanya kesenjangan infrastruktur seperti terlihat pada gambar 2.4.

Gambar 2.4

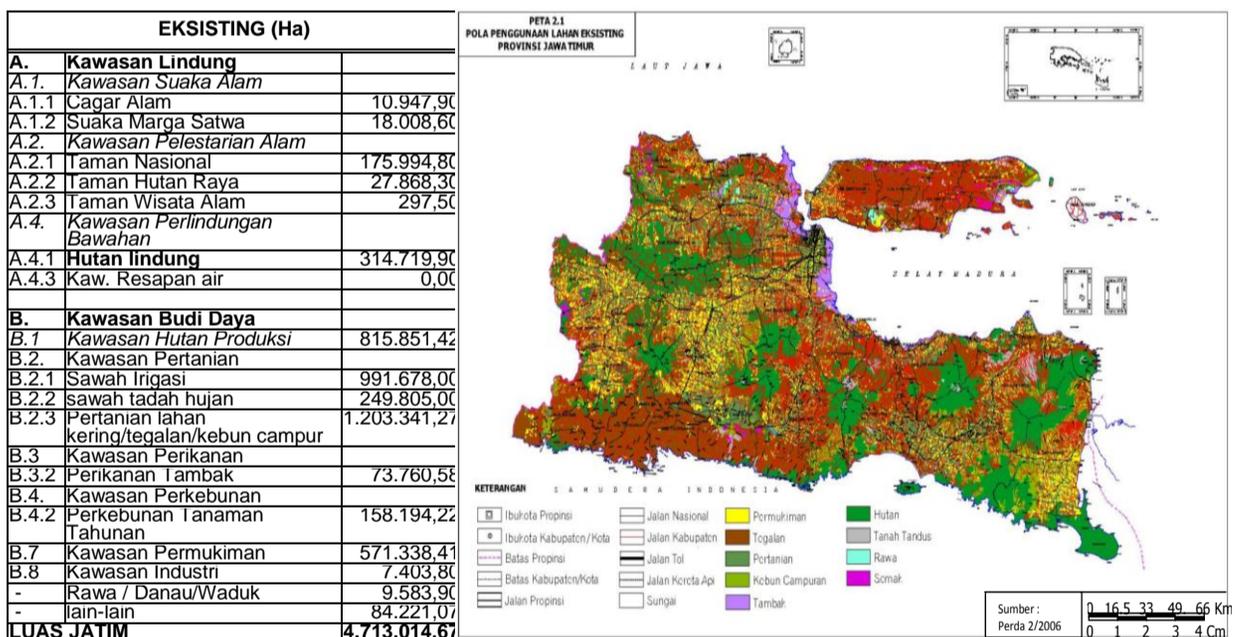


Gambar 2.4
Indikator Kesenjangan Berdasar Indeks Gabungan
1. Sarana (Fasilitas)
2. Prasarana (Transportasi)
3. Kependudukan (Jumlah Penduduk)

Berdasar kondisi tersebut perlu perencanaan ruang wilayah yang lebih terstruktur menopang sinergi antar sektor antar wilayah dalam pembentukan sistem pelayanan yang berhirarki di seluruh wilayah Jawa Timur sehingga terjadi pemerataan pelayanan, mendorong pertumbuhan wilayah di perdesaan dan perkotaan.

Pola Ruang Wilayah Jawa Timur pada tahun 2005 terbagi atas 11,62% Kawasan Lindung dan 88,38 % Kawasan Budidaya. Untuk melihat lebih lengkap penggunaan lahan eksisting wilayah Jawa Timur tersebut, tersaji dalam tabel dan peta sebagai berikut :

Gambar 2.5. Peta dan Tabel Penggunaan Lahan Eksisting di Provinsi Jawa Timur

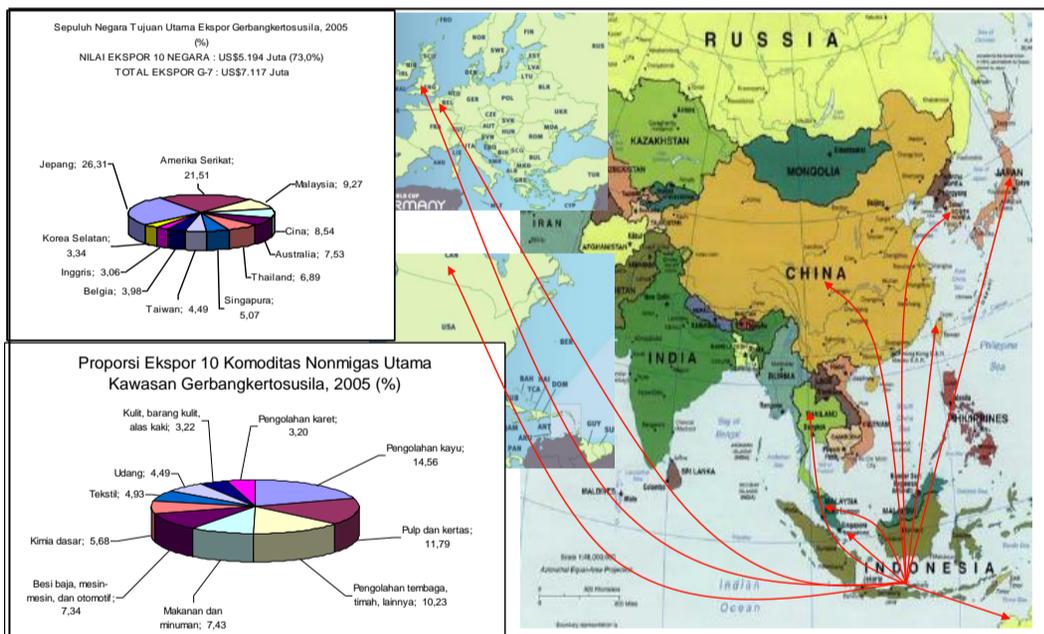


Potensi kawasan budidaya yang sangat besar ini perlu dikelola mengarah pada tercapainya tujuan pemanfaatan ruang wilayah yang aman, nyaman

nyaman, produktif dan berkelanjutan. Dominasi 74,11 % wilayah Jawa Timur yang dibudidayakan untuk Sektor Pertanian manakala digabungkan dengan data *leading sektor* pada struktur ekonomi dengan kontributor tertingginya yang berada pada Sektor Perdagangan, Industri dan Pertanian, maka adalah layak manakala produktivitas lahan di RTRW Provinsi Jawa Timur diarahkan untuk mengembangkan kawasan yang berorientasi agrobisnis.

Pengembangan wilayah Jawa Timur yang mengarah ke agrobisnis ini tentu dengan mempertimbangkan pula tingkat keamanan, kenyamanan dan keberlanjutan pembangunannya. Untuk itu penetapan prioritas pengembangan wilayah dalam bentuk Kawasan Strategis Ekonomi Agropolitan di wilayah pedesaan yang didukung jaringan sistem prasarana wilayah pada Kawasan Strategis pusat-pusat distribusi perkotaan yang memiliki daya saing global adalah arahan yang layak untuk direncana dan direalisasikan. Apalagi jika dikaitkan dengan data ekspor beserta orientasi tujuannya seperti yang tergambar pada grafik dan peta sebagai berikut :

Gambar 2.6. Grafik dan Peta Orientasi Ekspor GKS Jawa Timur

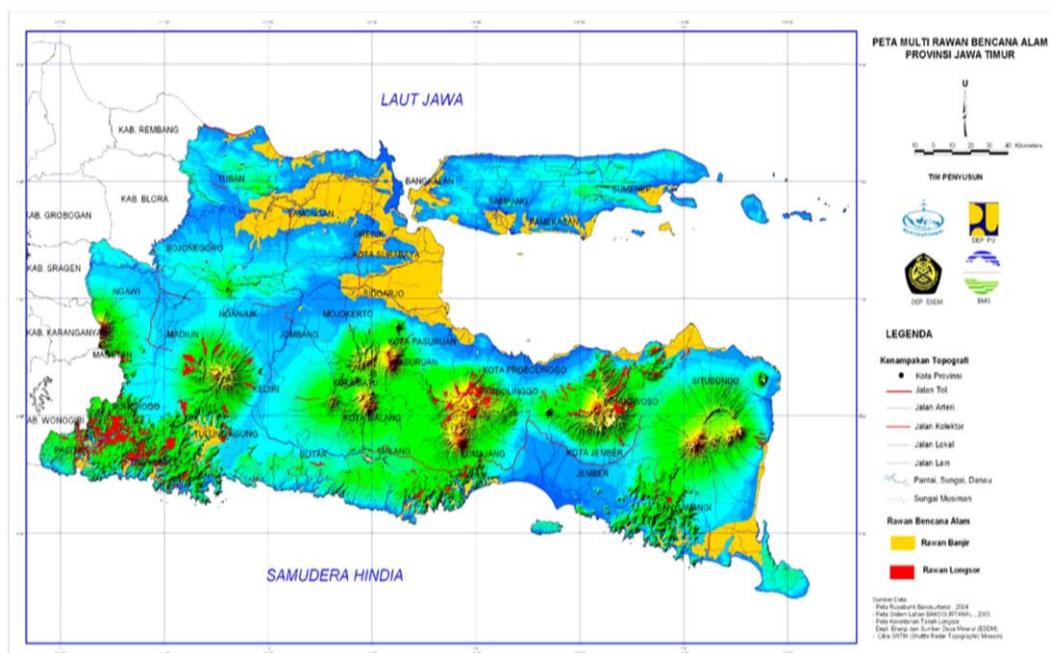


Grafik di atas mengilustrasikan *forward* dan *backward linkage* dominasi sektor Agro pada proporsi ekspor di GKS yang merupakan inti wilayah perkotaan Jawa Timur. Data tersebut juga meyakinkan besarnya peran provinsi ini dalam kancah perdagangan di wilayah Indonesia Timur. Peran Jawa Timur sebagai pusat distribusi dan pengembangan wilayah di Indonesia Timur inilah yang layak untuk dipertahankan.

Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah melalui perencanaan tata ruang wilayah perlu pula mengantisipasi terjadinya bencana alam, baik bencana banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi maupun tsunami. Persebaran wilayah yang rawan terjadi bencana alam tergambar seperti pada gambar 2.7 berikut :

Gambar 2.7 Peta Kerentanan Multi Bencana Alam Provinsi Jawa Timur



Kawasan rawan bencana alam seperti pada peta tersebut di atas merupakan kawasan yang diindikasikan sebagai kawasan yang sering terjadi bencana, baik bencana letusan gunung, longsor dan banjir seperti yang terjadi pada sepanjang tahun 2006 – 2007 di beberapa daerah itu yang berakibat rusaknya lingkungan. Bencana yang juga berpengaruh kuat pada perekonomian Jawa Timur lainnya adalah luapan lumpur (Lapindo) di Kabupaten Sidoarjo yang mengakibatkan terendahnya permukiman penduduk, tertutupnya sebagian akses jalan Tol Waru – Gempol dan terganggunya fungsi prasarana wilayah lain di sekitar lokasi semburan, yang muncul dari tahun 2006 dan hingga kini belum berhenti.

Gambar 2.8.



Gambar 2.8 Citra Satelit Luapan Lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo

Dengan demikian perencanaan pembangunan daerah juga perlu melakukan antisipasi terhadap bencana yang setiap saat dapat terjadi. Antisipasi dapat dilakukan dengan pembentukan tatanan antara lain melalui deteksi gempa, melestarikan kawasan lindung dan kegiatan penanggulangan bencana secara dini. Dengan kata lain manajemen risiko bencana perlu direncanakan dengan mensinergikan perencanaan tata ruang (spasial) dan perencanaan pembangunan daerah (sektoral) secara lebih terstruktur dan sistematis.

D. Posisi Jawa Timur dalam Konstelasi Nasional

Dalam sejarah, Jawa Timur pernah menjadi pusat kekuasaan dan pemerintahan raja - raja dari abad X sampai abad XIII atau dalam periode Raja Kediri, Singosari dan Majapahit. Kerajaan Majapahit yang berdiri tahun 1292 berhasil mencapai puncak kejayaan dengan mempersatukan Nusantara. Kemudian dalam perkembangannya, pusat kekuasaan berpindah ke Jakarta dan Jawa Timur menjadi pusat pertanian, industri, pendidikan dan kegiatan keuangan.

Pada tahun 1993, kinerja perekonomian Jawa Timur memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 18,20 %, dalam perkembangannya pada tahun 2007 kontribusinya terhadap PDB menjadi 14,59%. Jawa Timur juga dikenal sebagai lumbung pangan yang memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi ketersediaan pangan nasional. Kontribusi produksi pertanian Jawa Timur terhadap nasional pada tahun 2007 untuk padi sebesar 16,48%, jagung sebesar 32%, kedele sebesar 42,54%, buah-buahan sekitar 28,06%,

daging

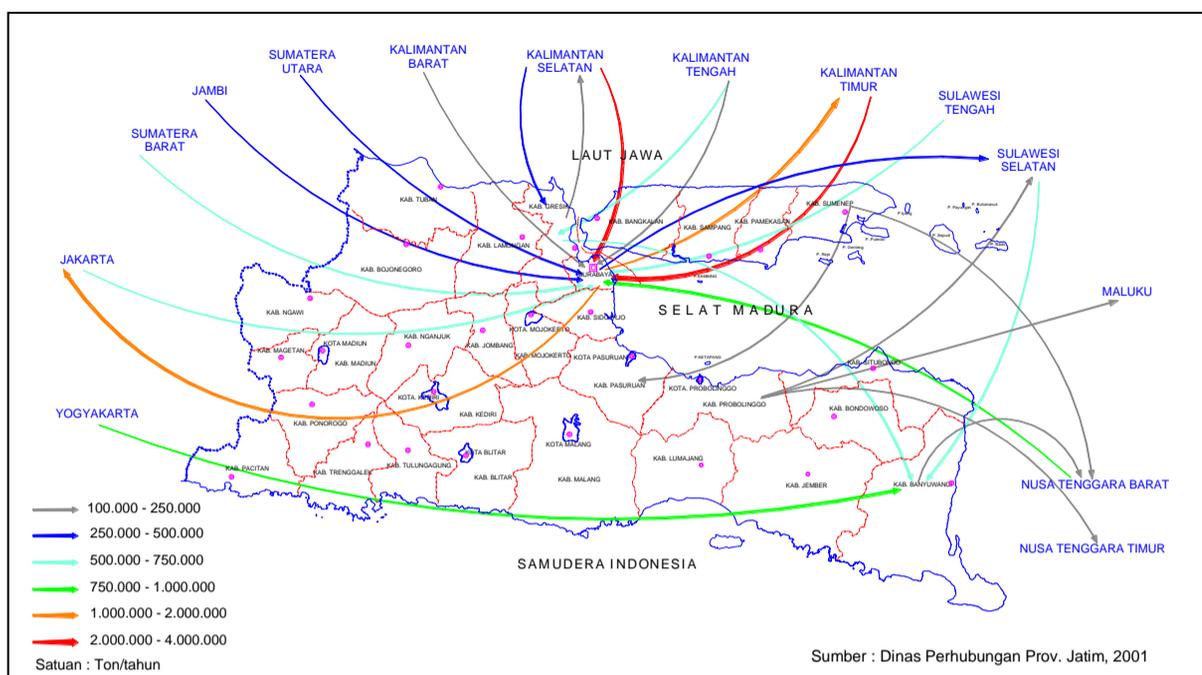
daging sebesar 6,05% dan telur sebesar 33,22%, gula sebesar/tebu sebesar 46% serta tembakau sebesar 60%. Dengan kata lain, Jawa Timur mempunyai peranan strategis dalam penyediaan cadangan pangan nasional. Sektor lapangan usaha lainnya yang juga potensial adalah perdagangan, hotel dan restoran serta sektor industri pengolahan. Fenomena demikian ini menunjukkan bahwa perekonomian Jawa Timur sudah menampakkan perkembangan kearah kemandirian, dalam arti perkembangan industri dan jasa yang akan di dukung oleh besarnya potensi pertanian.

Sebagai provinsi dengan penduduk terbesar di Indonesia saat ini , Jawa Timur masih menyimpan persoalan secara mendasar. Kemiskinan dan pengangguran menjadi bagian yang tak terpisahkan dari persoalan yang mengharapakan terjadinya. Peningkatan kesempatan partisipasi pendidikan yang meningkat belum di imbangi dengan adanya penciptaan kesempatan kerja secara merata. Pada saat yang sama pengangguran terbuka tertinggi terjadi diwilayah dengan angka partisipasi sekolah yang tinggi. Keterpaduan kebijakan wajib belajar dan pengembangan kebijakan ekonomi yang mampu menarik kesempatan kerja di wilayah masih belum terlihat berjalan secara wajar. Aktivitas yang masih terpusat di koridor Utara Jawa Timur menyebabkan akumulasi tenaga kerja terdidik masih terserap di wilayah ini. Problem kemiskinan yang terjadi di wilayah ini lebih kepada problem kemiskinan infrastruktur; artinya infra struktur fisik dan sosial serta ekonomi selama ini masih terpusat di wilayah pusat pemerintahan Provinsi.

Meski demikian, peningkatan aktivitas ekonomi Jawa Timur pada dasawarsa terakhir ini layak untuk diperhitungkan sebagai suatu kekuatan ekonomi yang bisa mencapai 20 - 25 % dari perekonomian Indonesia. Peran Jawa Timur melayani Indonesia bagian Timur terindikasi cukup besar, baik dari sisi kebutuhan pangan, papan, kebutuhan bahan bangunan maupun kebutuhan rumah tangga secara keseluruhan; Jawa Timur masih menjadi pengendali utama untuk menggerakkan ekonomi Indonesia Timur. Hal ini dapat terlihat dari pola angkutan laut dan udara yang makin memantapkan Provinsi ini sebagai suatu simpul penghubung utama Indonesia Timur dengan Jawa Timur.

Gambar 2.9.

Gambar 2.9 Pola Asal Tujuan Angkutan Barang Melalui Moda Laut



Sedangkan perkembangan realisasi nilai ekspor non migas di Jawa Timur menunjukkan kinerja meningkat dimana pada tahun 2006 sebesar US \$ 9.019 juta meningkat menjadi US \$ 11.770 juta pada tahun 2007, dengan nilai kontribusi ekspor Jawa Timur terhadap nasional sebesar 12,92%. Negara tujuan ekspor utama adalah Jepang, USA, Malaysia dan RRC. Nilai impor non migas Jawa Timur selama tahun 2006 sebesar US \$ 6.864 juta dan meningkat menjadi US \$ 8.639 juta pada tahun 2007 atau meningkat menjadi 12,6%. Negara asal impor utama adalah Singapura, RRC, Korea Selatan, USA dan Malaysia. Khusus untuk ekspor komoditi pertanian dan industri agro pada tahun 2007 mencapai US\$ 5.186 atau 45,38% dari total ekspor non migas Jawa Timur tahun 2007. Kondisi demikian menunjukkan bahwa komoditas agrobisnis memberikan peran yang cukup besar pada perdagangan Jawa Timur.

BAB III

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

A. Ancaman Krisis Pangan

Di Provinsi Jawa Timur, ancaman krisis pangan cenderung makin nyata ketika dikaitkan dengan persoalan kependudukan. Seperti diketahui, bahwa pertumbuhan penduduk cenderung mengikuti deret ukur, sedangkan pertumbuhan pangan mengikuti deret hitung. Hal ini berarti krisis pangan akan benar-benar terjadi manakala tidak ada upaya-upaya yang serius untuk memperbaiki struktur produksi pangan.

Perkembangan industri yang terkonsentrasi di wilayah urban dan kebutuhan lahan untuk sarana dan prasarana kehidupan, menyebabkan lahan produktif semakin berkurang. Disisi lain permasalahan yang harus dihadapi petani adalah kenaikan biaya produksi dan perolehan margin keuntungan yang makin tipis, sehingga nilai tukar petani menjadi rendah, hal ini antara lain yang menyebabkan gairah petani bercocok-tanam mengalami kelesuan, dan pada akhirnya profesi petani semakin tidak menarik.

Secara garis besar, beberapa kelemahan sektor pertanian di Jawa Timur dan ancaman krisis pangan bukan tidak mungkin akan terjadi di Jawa Timur, antara lain karena: (1) terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan industri, permukiman dan pusat perkantoran, (2) rendahnya nilai tukar produk pertanian dan *linkages* antara sektor pertanian dan industri yang cenderung bersifat asimetris, (3) lemahnya tata niaga produk pertanian dan panjangnya rantai distribusi produk pertanian yang menyebabkan pemasaran menjadi inefisien dan merugikan petani, (4) kurang berkembangnya aspek kelembagaan yang mendukung pengembangan sektor pertanian, (5) mutu produk pertanian belum terstandarisasi dan kemasan produk yang tidak *market friendly*, (6) kualitas bibit, benih dan teknologi pertanian yang masih rendah serta penerapan teknologi yang masih terbatas, dan (7) kurangnya sarana dan prasarana wilayah pendukung pengembangan sistem agrobisnis (8) ketersediaan pupuk anorganik dan kecenderungan pemakaian pupuk

anorganik

anorganik secara berlebihan serta masih rendahnya pemakaian pupuk organik.

Berkaitan dengan hal tersebut, kewaspadaan pangan dan gizi merupakan upaya yang bersifat preventif dan berkesinambungan, meliputi kegiatan yang mewaspadaai timbulnya kerawanan pangan dan gizi, kelaparan, keamanan dan mutu pangan, serta merumuskan langkah-langkah antisipasi dan penanggulangannya.

B. Krisis Energi

Sebagai daerah yang berkembang pesat, pertumbuhan industri dan penduduk di Provinsi Jawa Timur yang cepat menuntut adanya ketersediaan energi dalam jumlah yang cukup besar. Sementara itu, energi minyak bumi dan gas alam yang tersedia jumlahnya semakin terbatas dan jenis energi tersebut sifatnya tidak dapat diperbaharui (*unrenewable*). Pengalaman selama ini telah banyak membuktikan bahwa keterbatasan ketersediaan energi, bukan saja menyebabkan harga energi di pasaran menjadi makin mahal, tetapi juga menyebabkan efek domino terhadap peningkatan harga kebutuhan masyarakat yang lain.

Salah satu dampak yang selalu terjadi akibat adanya krisis energi adalah harga satuan energi semakin tidak terkendali dan menyebabkan kekurangan energi di berbagai negara karena ketidakmampuannya untuk membeli atau memproduksi energi. Ancaman krisis energi juga menyebabkan terbukanya peluang konflik sosial sebagai akibat meningkatnya jumlah orang miskin dan bertambahnya pengangguran.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi krisis energi antara lain melalui penggunaan energi alternatif dan produk bio yang lebih ramah lingkungan. Upaya ini ternyata melahirkan masalah baru, peningkatan permintaan jagung untuk kepentingan manusia, hewan dan energi menyebabkan harga komoditi tersebut menjadi mahal dan berdampak, baik secara sosial maupun ekonomi di berbagai negara.

Untuk mengatasi ancaman krisis energi, perlu diupayakan pencarian energi alternatif secara terus menerus terkait dengan energi yang ramah

lingkungan

lingkungan, seperti energi matahari, air dan angin yang jumlahnya sangat melimpah di Indonesia dan Provinsi Jawa Timur pada khususnya.

C. Globalisasi dan Perdagangan Bebas

Semakin terbukanya hubungan antar negara sebagai akibat kemajuan di bidang telekomunikasi dan transportasi menunjukkan adanya saling ketergantungan dan regionalisasi ekonomi berbagai negara. Posisi geografis Indonesia yang strategis menuntut adanya regionalisasi ekonomi dengan berbagai negara di sekitar Asia Pasifik, seperti AFTA, APEC dan EPA. Melalui regionalisasi ekonomi yang ada, diharapkan kinerja ekonomi Indonesia, terutama ekspor maupun impor, semakin membaik. Meningkatnya ekspor diharapkan juga mampu mendorong kinerja industri melalui meningkatnya penyerapan tenaga kerja serta daya saing industri. Selain itu, adanya integrasi ekonomi ini menuntut adanya mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja (buruh) serta modal yang semakin tinggi. Dengan demikian tenaga kerja suatu negara bisa bekerja di negara lain secara lebih mudah, termasuk di dalamnya kegiatan investasi antar negara.

Di era perekonomian global yang makin kompetitif, sejumlah ciri yang menandai dan perlu diantisipasi adalah adanya liberalisasi, ekspansi pasar dan kecenderungan (*preference*) perilaku konsumtif di berbagai bidang kehidupan. Globalisasi bukan hanya melahirkan perubahan-perubahan baru dalam perilaku dan gaya hidup masyarakat, tetapi juga melahirkan perubahan struktur sosial masyarakat dan mempengaruhi dinamika kondisi perekonomian di berbagai level dari tingkat global hingga lokal. Secara umum, lima karakteristik yang menandai terjadinya globalisasi adalah: Pertama, pertumbuhan transaksi keuangan internasional yang cepat. Kedua, pertumbuhan perdagangan yang cepat, terutama di antara perusahaan-perusahaan transnasional. Ketiga, gelombang investasi asing langsung (*foreign direct investment*) yang mendapat dukungan luas dari kalangan perusahaan transnasional. Keempat, timbulnya pasar global. Kelima, penyebaran teknologi dan berbagai pemikiran sebagai akibat ekspansi sistem transportasi dan komunikasi yang cepat dan merambah ke seluruh penjuru dunia.

Di Indonesia

Di Indonesia, dan di Provinsi Jawa Timur pada khususnya, globalisasi adalah realitas yang tak terhindarkan yang menyebabkan terjadinya liberalisasi perdagangan dan mendorong meningkatnya persaingan perdagangan dalam memasuki pasar global. Di sisi lain, liberalisasi perdagangan juga menyebabkan persaingan dipasar domestik, terutama dengan kemungkinan masuknya barang – barang impor. Selain itu, perdagangan bebas juga memunculkan *non-tarif barriers* seperti standarisasi produk melalui ISO, *Eco Labelling*, HACCP dan lain-lain, yang dapat mengganggu kinerja perdagangan luar negeri kita.

Dalam konteks relasi yang tidak seimbang antara negara maju dan negara sedang berkembang, bagaimana pun sulit diharapkan efek globalisasi akan dapat netral dan apalagi menguntungkan negara sedang berkembang, tidak terkecuali di Indonesia. Perkembangan ekonomi global dan upaya yang dilakukan lembaga-lembaga besar dalam proses globalisasi telah menjatuhkan negara-negara yang sedang kesulitan yang seharusnya mereka bantu, karena di balik itu pertimbangan yang dipakai para perumus kebijakan global ternyata lebih banyak pertimbangan politis daripada pertimbangan yang benar-benar obyektif.

D. Kemiskinan, Kesenjangan, Pengangguran dan Kualitas SDM

Di Provinsi Jawa Timur, tantangan di bidang sosial adalah adanya kesenjangan sosial, dan kondisi sebagian masyarakat yang masih menghadapi tekanan kemiskinan, kurangnya kesempatan kerja dan pengangguran, serta kualitas SDM masyarakat yang belum siap bersaing di era global yang makin kompetitif. Kesenjangan sosial, dalam banyak hal akan melahirkan proses eksploitasi dan marginalisasi masyarakat miskin karena posisi mereka yang rentan dan tersubordinasi. Sedangkan kemiskinan, di sisi yang lain akan menyebabkan terjadinya percepatan dan pendalaman kemiskinan, yang ujung-ujungnya akan memperlebar jurang perbedaan antar-kelas, antar-daerah, dan antar yang dikuasai dan yang menguasai, serta melahirkan efek domino lain berupa peningkatan jumlah pengangguran, rendahnya pertumbuhan ekonomi di sektor riil, terpuruknya kualitas sumber daya manusia yang ada, rendahnya akses masyarakat ke berbagai layanan

publik, dan bahkan hilangnya kesempatan si miskin untuk meningkatkan posisi tawar dan melakukan mobilitas vertikal untuk memperbaiki taraf kehidupannya.

Di berbagai daerah di Provinsi Jawa Timur, persoalan kemiskinan seringkali makin sulit teratasi ketika kesenjangan sosial yang terjadi tak kunjung teratasi. Faktor penyebab kemiskinan seolah tak kunjung tertangani bukan sekadar karena dan bersumber pada kelemahan dari si miskin itu sendiri, tetapi lebih karena faktor-faktor struktural di luar kemampuan si miskin yang cenderung makin *rigid* dan tidak ramah kepada masyarakat miskin.

Kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih dari krisis, dan imbas terjadinya krisis global, bukan saja menyebabkan terjadinya gelombang PHK, berkurangnya kesempatan kerja, dan *kolapsnya* sejumlah usaha mandiri yang ditekuni masyarakat, tetapi juga menyebabkan terjadinya proses perluasan dan pendalaman kemiskinan. Akibat kualitas SDM masyarakat yang masih tertinggal, dengan rata-rata tingkat pendidikan yang rendah dan belum ditunjang kecakapan, serta keahlian yang profesional, seringkali menyebabkan tenaga kerja yang ada tidak sesuai (*mismatch*) dengan kebutuhan pasar kerja.

Untuk menangani kemiskinan dan meningkatkan posisi tawar (*bargaining*) masyarakat miskin terhadap semua bentuk eksploitasi dan superordinasi, yang dibutuhkan adalah kemudahan ekonomi (*economic facilities*) yang benar-benar nyata dan peluang-peluang sosial (*social opportunities*) yang memihak kepada masyarakat miskin dan pengangguran. Dalam hal ini kemudahan ekonomi, adalah kesempatan dan makin terbukanya akses masyarakat miskin terhadap berbagai sumber permodalan dan peluang usaha tanpa dibebani dengan persyaratan yang menyulitkan. Sedangkan peluang-peluang sosial adalah upaya untuk meningkatkan kesempatan masyarakat miskin melakukan mobilitas sosial-ekonomi secara vertikal melalui pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan bahkan kebutuhan untuk melakukan partisipasi politik secara aktif.

E. Perubahan Iklim dan Pemanasan Global

Pemanasan global dan perubahan iklim tengah terjadi dan diperkirakan akan terus terjadi pada masa-masa mendatang. Banyaknya kejadian bencana seperti banjir, longsor, erosi, badai tropis, dan kekeringan merupakan dampak nyata dari perubahan iklim dan pemanasan global. Agenda adaptasi terhadap dampak perubahan iklim diperlukan untuk menciptakan sistem pembangunan yang berdaya tahan (*reliance*) terhadap guncangan variabilitas iklim saat ini (anomali iklim) danantisipasi dampak perubahan iklim di masa depan. Fokus adaptasi ini kiranya perlu ditujukan pada area-area yang rentan terhadap perubahan iklim seperti : sumberdaya air, pertanian, perikanan, pesisir dan laut, infrastruktur dan permukiman, kesehatan, dan kehutanan.

Arah Kebijakan pembangunan yang berdaya tahan terhadap resiko perubahan iklim, pada masing-masing fokus area perlu mempertimbangkan agenda perubahan iklim terkait tujuan pembangunan nasional dan daerah serta diselaraskan tujuan pembangunan millenium (*millenium development goals/MDG's*). Terdapat beberapa isu mendasar yang layak menjadi perhatian pada setiap fokus area, masing-masing berkaitan dengan usaha penanggulangan kemiskinan; pembangunan ekonomi dan sosial; investasi; dan perencanaan tata ruang. Sebagaimana banyak terjadi pada tahun-tahun terakhir, berbagai implikasi dari perubahan iklim telah menjadikan derita para miskin menjadi berlipat kali: para nelayan tidak bisa melaut karena gelombang besar, para petani miskin di perdesaan lahan-lahan pertaniannya terancam banjir kala musim penghujan dan terancam kekeringan kala musim kemarau.

Untuk dapat menunjang pelaksanaan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang tengah dan diperkirakan akan terus terjadi ini, upaya penegakan hukum yang konsisten dan tegas, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), persiapan, dan rekayasa sosial, serta sosialisasi dan pendidikan yang intensif, menjadi persyaratan penting yang mutlak dipenuhi melalui kebijakan yang lebih komprehensif.

BAB IV
VISI, MISI DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2005 – 2025

Dengan memperhatikan sejarah perkembangan Provinsi Jawa Timur sebagai Provinsi penyangga pangan nasional dan didukung oleh analisis potensi, faktor-faktor strategis serta perspektif ke depan, maka visi, misi dan strategi Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2005 – 2025 dirumuskan sebagai berikut :

A. Visi

”Pusat Agrobisnis Terkemuka, Berdaya Saing Global dan Berkelanjutan Menuju Jawa Timur Makmur dan Berakhlak”

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa dalam 20 tahun mendatang Provinsi Jawa Timur diharapkan mampu berkembang menjadi provinsi yang aktivitas utama ekonominya berbasis agrobisnis dari hulu, sektor budi daya (*on farm*) sampai hilir (*off farm*), yang didukung kondisi pasar, permodalan, infrastruktur agrobisnis, lembaga perbankan dan non bank, kelembagaan petani, pendidikan dan pelatihan, BUMD, serta mampu tumbuh menjadi tulang punggung perekonomian dalam rangka mengurangi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan antar wilayah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Perwujudan kondisi tersebut didukung oleh tata pemerintahan yang baik, kepastian hukum dan HAM, pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup, akses terhadap kualitas pelayanan sosial dasar yang terjangkau, kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur dasar publik yang memadai serta terjaminnya ketentraman dan ketertiban.

Sebagai pusat agrobisnis yang terkemuka, kinerja agrobisnis sebagai sistem akan menjadi pilar utama untuk menunjang pembangunan ekonomi berkelanjutan dan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih baik. Dalam 20 tahun mendatang, Jawa Timur akan berkembang menjadi provinsi yang memiliki kontribusi ekonomi khususnya dari kinerja sub-sub sistem agrobisnis di tingkat nasional yang melebihi provinsi lain di Indonesia, serta mampu melakukan perluasan

pangsa

pangsa pasar domestik (antar pulau) maupun internasional. Untuk mampu bersaing secara kompetitif di pasar internasional, berbagai produk agrobisnis harus memiliki kualitas dan konsistensi pengembangannya untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dan daya saing di tingkat nasional dan global untuk memberikan nilai tambah (*value added*) bagi pelaku agrobis, khususnya petani.

Praktek perdagangan yang merugikan masyarakat lokal, perlu terus diupayakan pencegahannya melalui peningkatan kadar keberdayaan petani agar mampu memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang terus membaik, sehingga *margin* keuntungan yang menjadi hak petani dapat diperoleh secara proporsional. Dengan dukungan SDM yang makin berkualitas, kelembagaan petani yang kuat, permodalan yang terjangkau, dan kemampuan bersaing di tingkat global, diharapkan pembangunan agrobisnis di Jawa Timur akan dapat berjalan secara berkelanjutan dengan beberapa kriteria yaitu pro-keadilan, pro-pertumbuhan ekonomi, dan pro-lingkungan dengan dukungan kebijakan penataan ruang yang konsisten.

Dalam kontek yang lebih besar, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945, yang harus dipegang teguh dan diupayakan dapat terwujud. Masyarakat makmur adalah masyarakat yang sejahtera, yang berkecukupan atau tidak kekurangan, yang tidak saja berdimensi fisik atau materi, tetapi juga rohani. Masyarakat makmur adalah masyarakat yang berkeadilan, bermartabat, dan terpenuhi hak-hak dasarnya, bebas mengemukakan pikiran dan pendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu diskriminasi, bebas dari penindasan, dengan sumber daya manusia yang berkualitas secara fisik, psikis maupun intelektualitas. Mewujudkan Jawa Timur makmur dan sejahtera merupakan keniscayaan.

Pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan sebagai sebuah keniscayaan akan kehilangan makna tatkala tidak diikuti pembentukan akhlak yang baik dan mulia. Mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang makmur dan sejahtera perlu dibarengi peningkatan kesalehan sosial (kualitas pemahaman agama dan kehidupan beragama) yang diimplementasikan secara sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kemuliaan akhlak akan menuntun individu lebih mampu mengembangkan kerukunan

hidup

hidup antar-umat beragama, memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip kebersamaan, kesediaan menolong sesama, dan berdemokrasi, sehingga tercipta harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

B. Misi

Dalam mewujudkan Visi tersebut, Misi Jawa Timur 20 Tahun kedepan adalah :

1. **Mengembangkan Perekonomian Modern Berbasis Agrobisnis**, dicapai dengan cara mendorong pergeseran Agrobisnis dari berbasis pada keunggulan komparatif (*comparative advantage*) ke arah Agrobisnis yang didorong oleh keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) melalui pengembangan modal dan peningkatan kemajuan teknologi pada setiap sub-sistemnya, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia.
2. **Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Handal, Berakhlak Mulia dan Berbudaya**, dicapai dengan cara meningkatkan kualitas masyarakat Jawa Timur yang berakhlak, berpendidikan, berdaya, inovatif, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. **Mewujudkan Kemudahan Memperoleh Akses Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup**, dicapai dengan cara mengurangi kesenjangan sosial, kemiskinan, pengangguran melalui kemudahan memperoleh akses terhadap berbagai bentuk pelayanan sosial dasar masyarakat yang berkualitas.
4. **Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Buatan** dicapai dengan cara menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui penataan ruang yang berkelanjutan.
5. **Mengembangkan Infrastruktur Bernilai Tambah Tinggi**, dicapai dengan cara pembangunan sarana dan prasarana wilayah untuk mendorong pengembangan kawasan pusat-pusat produksi (agropolitan) dan distribusi (metropolitan) serta mengurangi ketimpangan antar wilayah.

6. Mengembangkan

6. **Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik** dicapai dengan cara membangun transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat serta peningkatan kinerja pelayanan publik yang didukung profesionalisme aparatur, stabilitas politik, ketentraman dan ketertiban serta konsistensi dalam penegakan hukum dan HAM.

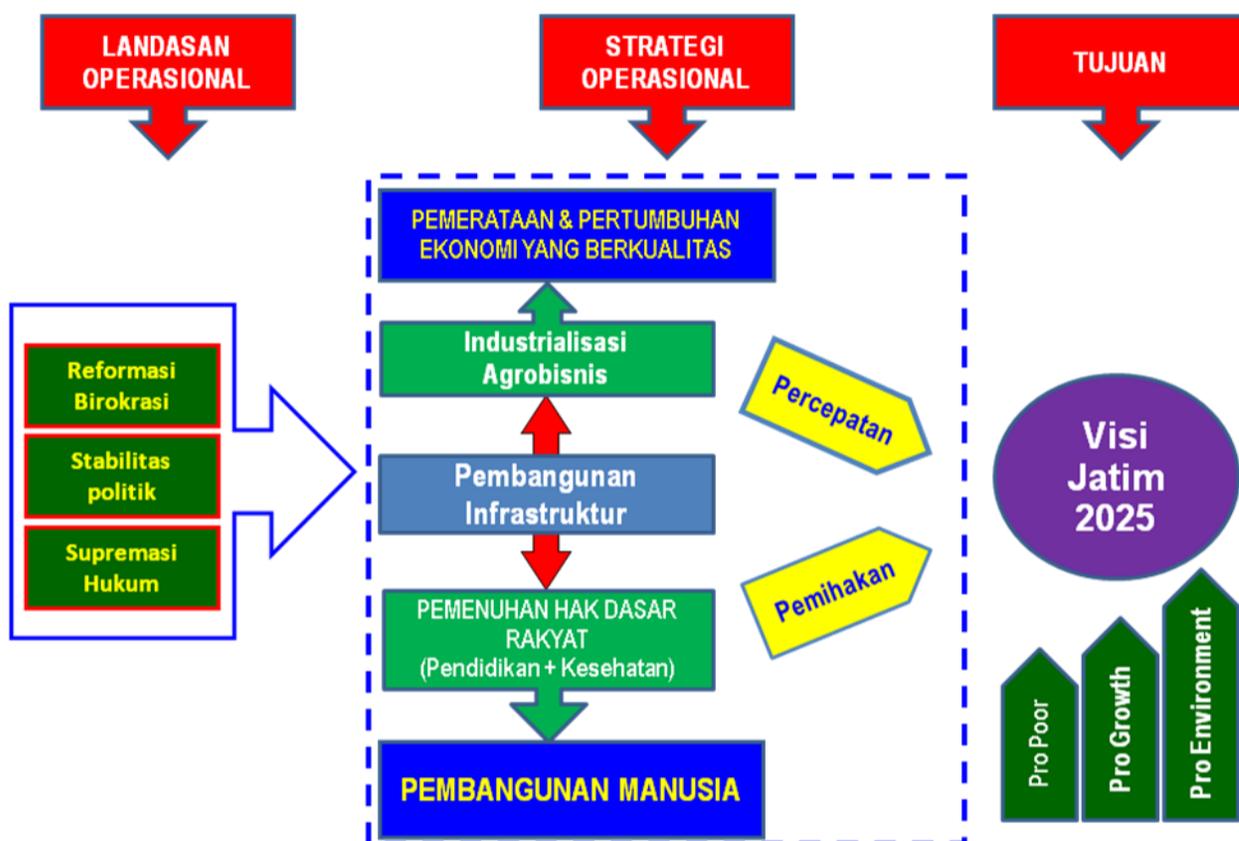
C. Strategi

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Timur dilaksanakan melalui strategi pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang didukung oleh reformasi birokrasi, supremasi hukum dan stabilitas politik.

Strategi pemerataan pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui upaya pemberdayaan ekonomi lokal di semua wilayah produksi domestik masyarakat Jawa Timur, sehingga mampu menghasilkan produksi lokal dan nilai tambah bruto di semua wilayah. Upaya pemerataan ini lebih ditekankan pada pemerataan penguasaan faktor-faktor produksi oleh semua pelaku ekonomi di semua lapisan masyarakat Jawa Timur untuk menghasilkan nilai tambah bruto. Sedangkan strategi pertumbuhan yang berkualitas diupayakan melalui penciptaan basis fundamental pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh dominasi investasi untuk memperkuat percepatan pertumbuhan ekonomi. Dengan strategi pemerataan dan pertumbuhan, pemenuhan hak-hak sosial dasar masyarakat akan dapat dipenuhi secara lebih adil dan merata dalam hal hak atas pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi, pekerjaan secara merata, berkualitas, dan berkeadilan, melalui pemihakan kepada masyarakat miskin (*pro-poor*) dan menempatkan individu bukan sebagai obyek, melainkan sebagai pelaku yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya.

Gambar.1

**STRATEGI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
PROVINSI JAWA TIMUR 2005 – 2025**



BAB V

ARAH PEMBANGUNAN DAN PERIODESASI RPJPD

A. Arah Pembangunan

Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005–2025 adalah mewujudkan Provinsi Jawa Timur Pusat Agrobisnis Terkemuka, Berdaya Saing Global dan Berkelanjutan sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju **masyarakat Makmur dan Berakhlak** dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Upaya perwujudan visi pembangunan Jawa Timur yang dilakukan melalui pelaksanaan misi dan strategi pembangunan yang dilaksanakan melalui tahapan pembangunan jangka menengah dan tahunan.

1. Arah Kebijakan misi Mengembangkan Perekonomian Modern Berbasis Agrobisnis, meliputi :

- a. ***Transformasi Sistem Agrobisnis***, diarahkan pada pengembangan keterkaitan subsistem antara hulu dan hilir guna meningkatkan nilai tambah produksi agrobisnis yang berdaya saing sesuai dengan permintaan pasar lokal, nasional dan internasional.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi:

- 1). Peningkatan kuantitas dan kualitas produksi pertanian serta menjamin kontinuitas produk pertanian dalam rangka swasembada pangan, pemenuhan pasar dan ketahanan pangan termasuk peternakan, perkebunan, kehutanan serta perikanan dan kelautan.
- 2). Peningkatan, pemantapan, penguatan dan pelestarian sarana prasarana pertanian dan perdesaan.
- 3). Optimalisasi, pemanfaatan dan keberlanjutan hutan lestari untuk diversifikasi usaha, dan mendukung produksi pangan.
- 4). Optimalisasi, pemanfaatan dan penguatan agrobisnis berbasis keunggulan komparative menuju agrobisnis berbasis keunggulan kompetitif.

5). Pembangunan

- 5). **Pembangunan Pasar Induk Agribisnis** dan Penguatan akses pasar dengan menjaga kelangsungan mekanisme pasar yang sehat serta lebih mengutamakan perlindungan usaha masyarakat lemah.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi sentra produksi pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan; kawasan strategis agropolitan (perdesaan); dan pusat distribusinya di kawasan strategis metropolitan (perkotaan).

- b. **Pengembangan Sistem Informasi Agrobisnis** diarahkan pada pembangunan sistem informasi hulu-hilir yang meliputi sarana dan prasarana, produksi, informasi proses produksi, informasi distribusi, dan informasi pengolahan serta informasi pasar.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud adalah :

Pengembangan, peningkatan, penguasaan akses informasi produksi, distribusi, dan informasi pasar sampai wilayah kecamatan dan kelompok petani.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi kawasan strategis ekonomi di pedesaan dan perkotaan/metropolitan.

- c. **Pengembangan Sumberdaya Agrobisnis**, diarahkan pada penelitian, pengembangan, pemanfaatan dan penguasaan teknologi meliputi aspek bioteknologi, teknologi *eco-farming*, teknologi proses, teknologi produk dan teknologi informasi, guna meningkatkan keunggulan sumberdaya daerah (*comparative advantage*) termasuk kelautan melalui sistem agrobisnis dengan penciptaan nilai tambah yang semakin besar, peningkatan lapangan usaha dan lapangan kerja.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi:

Penelitian, pengembangan, pemanfaatan dan penguasaan teknologi meliputi : aspek bioteknologi, teknologi *eco-farming*, teknologi paska panen, teknologi produk, sumberdaya pertanian dan kelautan.

Sedangkan

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi sentra produksi di kawasan strategis agropolitan (perdesaan) dan pusat distribusi di kawasan strategis metropolitan (perkotaan).

- d. ***Pembinaan Sumberdaya Manusia***, diarahkan pada pembangunan SDM sebagai kekuatan utama pembangunan pertanian yang meletakkan etos kerja dalam rangka meningkatkan produktifitas tenaga kerja.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- 1). Revitalisasi lembaga penyuluhan.
- 2). Peningkatan kemampuan dan kemandirian petani, dan penguatan lembaga pendukungnya.
- 3). Pemantapan sarana dan prasarana penyuluhan.
- 4). Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM penyuluh.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini di kawasan perdesaan terutama pada kawasan strategis agropolitan.

- e. ***Pembangunan Fasilitas Penelitian dan Pengembangan Pertanian*** diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah, diarahkan pada peningkatan fasilitas penelitian dan pengembangan pertanian guna mendorong perbaikan teknologi produksi dan penciptaan inovasi baru untuk mendorong perekonomian daerah.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi:

- 1). Peningkatan, pengembangan dan pemantapan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan (litbang) pertanian sampai di tingkat kab/kota.
- 2). Penguasaan inovasi baru teknologi pertanian.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini di kawasan perdesaan terutama pada kawasan strategis agropolitan.

- f. ***Penguatan Struktur Perekonomian***. Penguatan struktur ekonomi daerah berbasis primer yang didukung oleh sektor sekunder dan

tersier

tersier yang diarahkan pada pemantapan kualitas pertumbuhan ekonomi daerah.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- 1). Peningkatan kualitas pertumbuhan sektor pertanian
- 2). Pemantapan struktur perekonomian yang berkualitas, berdaya saing berbasis agrobisnis.
- 3). Pembinaan usaha sektor primer, sekunder dan tersier.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan meliputi kawasan strategis agropolitan, kawasan andalan dan kawasan budidaya lainnya di pedesaan.

- g. **Penguatan Struktur Industri**, diarahkan pada pengembangan sektor agroindustri berbasis industri kecil dan menengah melalui kemitraan yang sehat dengan usaha-usaha ekonomi lokal sebagai *leading sector* dalam perekonomian Jawa Timur.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- 1). Penataan struktur industri berbasis industri kecil dan menengah dalam mata rantai industri hulu dan hilir.
- 2). Pengembangan klaster agroindustri berbasis kekayaan alam daerah.
- 3). Pengembangan dan penguasaan daya saing produk-produk inovatif agroindustri berbahan baku lokal.
- 4). Penguatan kemitraan usaha-usaha ekonomi lokal dengan usaha agroindustri.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi kawasan peruntukan Industri dan klaster agroindustri di pedesaan.

- h. **Optimalisasi Perdagangan**, diarahkan pada peningkatan sistem distribusi dan informasi pasar untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau. Sedangkan untuk perdagangan luar negeri diarahkan pada penguatan akses jaringan perdagangan ekspor.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- 1). Pengembangan sistem informasi pasar.
- 2). Perbaikan kerangka regulasi perdagangan.
- 3). Peningkatan dan penguasaan akses dan perluasan pasar ekspor.
- 4). Peningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem distribusi daerah.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi kawasan perdagangan di kota sedang, besar dan metropolitan.

- i. **Pemberdayaan Koperasi dan UMKM** dalam sistem agrobisnis diarahkan pada penumbuhan wirausaha baru, peningkatan kompetensi dan penguatan kewirausahaan, peningkatan produktivitas, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi:

- 1).Peningkatan iklim usaha yang kondusif.
- 2).Peningkatan kesempatan berusaha dan penciptaan wirausaha baru.
- 3).Pengembangan dan penguatan UKM untuk memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing.
- 4).Pengembangan dan penguatan usaha skala mikro untuk memberikan kontribusi peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah (miskin).
- 5).Penguatan dan peningkatan kualitas kelembagaan, kompetensi SDM dan kemandirian koperasi serta UKM berwawasan gender.
- 6).Penumbuhan dan penciptaan wira usaha baru.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi sentra industri kecil dan kawasan strategis ekonomi di pedesaan dan perkotaan.

- j. **Optimalisasi Peran Lembaga Keuangan dan Perbankan** diarahkan untuk meningkatkan peran sertanya dalam pengembangan agrobisnis

melalui

melalui penyediaan permodalan bagi koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- 1). Mendorong peran intermediasi perbankan dalam penyediaan kredit untuk koperasi dan UMKM.
- 2). Peningkatan akses ke sumberdaya permodalan non perbankan untuk koperasi dan UMKM.
- 3). Optimalisasi peran pemerintah daerah dalam penjaminan kredit terhadap koperasi dan UMKM

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi sentra koperasi dan UMKM pada kawasan strategis ekonomi di pedesaan dan perkotaan.

- k. ***Percepatan Investasi*** diarahkan untuk meningkatkan iklim investasi yang semakin kondusif dengan mendorong terwujudnya kepercayaan masyarakat baik domestik maupun internasional terhadap kehidupan ekonomi Jawa Timur dengan mengembangkan kebijakan yang pro-pasar, membangun infrastruktur ekonomi yang baik, menekan *high cost economy* dan penyederhanaan sistem pelayanan investasi.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- 1). Pelayanan perijinan investasi satu pintu.
- 2). Pelayanan perijinan investasi berbasis teknologi informasi.
- 3). Peningkatan investasi di bidang agroindustri/agrobisnis.
- 4). Pengembangan dan penataan kawasan agropolitan.
- 5). Pemantapan infrastruktur untuk mendukung kegiatan investasi termasuk infrastruktur pertanian dan pedesaan.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi kawasan strategis ekonomi agropolitan di pedesaan dan metropolitan di perkotaan serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

- I. **Pengembangan Pariwisata**, diarahkan untuk mengembangkan dan melestarikan peninggalan budaya, tradisi, kesenian dan sebagainya dalam rangka membentuk karakteristik masyarakat. Pengembangan pariwisata juga diarahkan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata baik asing maupun domestik serta lama tinggalnya.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- 1). Pengembangan dan revitalisi obyek wisata Jawa Timur.
- 2). Pengembangan dan penguatan citra industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata.
- 3). Pengembangan paket wisata.
- 4). Optimalisasi promosi dan pengembangan sistem informasi pariwisata.
- 5). Peningkatan SDM pariwisata yang kompeten.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini kawasan pariwisata.

Indikasi dari keberhasilan misi ini, yaitu tercapainya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkualitas, meningkatnya kontribusi pangan Jawa Timur terhadap nasional, meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari meningkatnya PDRB per kapita dan indeks nilai tukar petani/nelayan (NTP/NTN) dan menurunnya angka pengangguran serta kemiskinan.

2. Arah Kebijakan misi Mewujudkan SDM yang Handal, Berakhlak Mulia dan Berbudaya, meliputi :

- a. **Pembangunan Pendidikan** diarahkan pada upaya perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat dan *outputnya* mampu terserap dalam lapangan kerja.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi:

- 1) Pengembangan perluasan dan pemerataan akses pendidikan pada semua jenjang pendidikan baik formal, non formal dan informal.

2). Peningkatan

- 2) Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan pada semua jenjang pendidikan dengan menyertakan muatan kurikulum agrobisnis
- 3) Peningkatan kualitas sekolah kejuruan berbasis keunggulan lokal dan teknologi dengan mengedepankan *link and match* khususnya agrobisnis
- 4) Peningkatan kualitas pendidikan tinggi.
- 5) Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini pada daerah dengan angka buta huruf tinggi dan IPM rendah.

- b. **Pembangunan Kehidupan Beragama** diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, serta pembentukan akhlak mulia, memupuk etos kerja dan menghargai prestasi.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- 1). Peningkatan kualitas kerukunan intern dan antar umat beragama.
- 2). Pemantapan kualitas pelayanan kehidupan beragama melalui pengelolaan serta pengembangan fasilitas pelaksanaan ibadah.
- 3). Pemantapan kualitas pendidikan agama dan keagamaan pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
- 4). Peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga keagamaan.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini pada daerah dengan kasus konflik umat beragama tinggi.

- c. **Pengembangan Kebudayaan** diarahkan pada pelestarian nilai nilai budaya yang mampu merespon secara positif dan produktif perkembangan modernisasi yang terjadi di masyarakat.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- 1). Penanaman dan peningkatan nilai-nilai budaya dan moral pada masyarakat, khususnya generasi muda.
- 2). Pemberdayaan budaya lokal dan tradisional sebagai aset pendidikan dan ilmu pengetahuan.

3). Pengembangan

- 3). Pengembangan dan pelestarian budaya lokal dan tradisional.
- 4). Pengembangan publikasi, sosialisasi apresiasi seni budaya.
- 5). Pengembangan budaya yang menumbuhkan kreatifitas masyarakat.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini pada kawasan budaya baik di pedesaan dan perkotaan.

- d. **Pembangunan Pemuda dan Olahraga** diarahkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia, yang memiliki karakter kebangsaan (*nation building*) serta memiliki wawasan kebangsaan dan beretika bangsa Indonesia.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- 1). Pendidikan dan pelatihan ketrampilan pemuda.
- 2). Pengembangan kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan bagi pemuda.
- 3). Penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan.
- 4). Peningkatan budaya dan prestasi olahraga secara berjenjang.
- 5). Peningkatan pemberdayaan organisas pemuda dan olahraga.
- 6). Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi Ibukota Kecamatan dan Kabupaten/Kota.

- e. **Pemberdayaan Perempuan** diarahkan pada terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, serta perlindungan anak pada suatu kondisi yang menjamin pemenuhan dan perlindungan hak serta tumbuh kembang anak secara wajar.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- 1). Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 2). Pencegahan *trafficking* dan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3). Peningkatan

- 3). Peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan ekonomi perempuan.
- 4). Penguatan lembaga kesetaraan gender.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi daerah dengan ketimpangan gender, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan *trafficking* tinggi.

- f. **Pembangunan dan Pemantapan Jatidiri Bangsa** ditujukan untuk mewujudkan karakter dan identitas bangsa yang terbuka dan berakar dari reaktualisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- 1). Peningkatan pembangunan karakter dan pekerti bangsa.
- 2). Pelestarian dan pengaktualisasian nilai-nilai tradisi.
- 3). Pengembangan masyarakat adat.
- 4). Pengembangan nilai budaya daerah.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi daerah perkotaan dan kawasan adat.

Indikator keberhasilan misi mewujudkan SDM yang handal; berakhlak mulia dan berbudaya ditandai dengan menurunnya angka buta huruf; meningkatnya Rasio SMK terhadap SMA; meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS); menurunnya konflik umat beragama; menurunnya indeks kriminalitas, meningkatnya indeks kesetaraan gender; menurunnya angka korban KDRT dan *trafficking*.

3. **Arah Kebijakan misi Mewujudkan Kemudahan Memperoleh Akses untuk Meningkatkan Kualitas Hidup** meliputi :

- a. **Pembangunan Kesehatan** diarahkan pada terwujudnya peningkatan derajat kesehatan sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- 1). Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.
- 2). Peningkatkan kesehatan bagi kelangsungan hidup ibu dan anak.
- 3). Peningkatan ketersediaan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau pada setiap strata pelayanan.
- 4). Peningkatan gizi masyarakat.
- 5). Pengendalian penyakit menular dan tidak menular.
- 6). Pembangunan sistem jaminan kesehatan daerah.
- 7). Pengembangan kemitraan dalam pembiayaan kesehatan.
- 8). Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
- 9). Pemantapan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
- 10). Peningkatan jumlah, jenis, mutu tenaga kesehatan.
- 11). Pemberdayaan institusi kesehatan.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi wilayah Selatan Jawa Timur, Madura dan kepulauan serta wilayah dengan IPM rendah.

- b. **Pembangunan Kependudukan** diarahkan pada terwujudnya keluarga sejahtera dan keseimbangan daya dukung lingkungan melalui pengendalian laju pertumbuhan dan persebaran penduduk.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi

- 1). Pembangunan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- 2). Pengendalian laju pertumbuhan penduduk.
- 3). Peningkatan persebaran penduduk.
- 4). Penataan administrasi kependudukan dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
- 5). Pembekalan calon transmigran.
- 6). Pengembangan kualitas penduduk.

Sedangkan

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi Ibukota Kabupaten/Kota dan Provinsi dan persebarannya ke wilayah penyangganya (*hinterland*).

- c. **Pembangunan Ketenagakerjaan**, diarahkan pada terwujudnya hubungan yang harmonis antara pemerintah, industrial dan buruh serta penciptaan tenaga kerja yang mandiri, produktif, kompetitif.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- 1). Penciptaan kesempatan kerja
- 2). Peningkatan kompetensi, daya saing dan sarana prasarana.
- 3). Pelatihan tenaga kerja berbasis potensi kewirausahaan.
- 4). Peningkatan produktifitas, kualitas dan kesejahteraan pekerja.
- 5). Pelaksanaan hubungan industrial.
- 6). Perlindungan hukum bagi tenaga kerja di daerah maupun di luar negeri.
- 7). Pemantapan kompetensi tenaga kerja melalui kurikulum yang berdaya saing.
- 8). Pengembangan kompetensi berbasis potensi lokal.
- 9). Penanganan pengangguran melalui padat karya

- d. **Pembangunan Kesejahteraan Sosial** diarahkan pada pembangunan kesejahteraan sosial, mengangkat harkat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tidak berdaya dan tidak memiliki akses untuk melakukan mobilitas ke tingkat kualitas kehidupan yang lebih baik.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- 1). Peningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi PMKS.
- 2). Peningkatan aksesibilitas PMKS terhadap pelayanan sosial dasar.
- 3). Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
- 4). Penanganan dampak sosial bencana.
- 5). Peningkatan kualitas kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- 6). Pengembangan pembiayaan JAMSOSDA dan perlindungan sosial.

7). Peningkatan

7). Peningkatan keberdayaan sosial yang berbasis masyarakat.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi wilayah Selatan Jawa Timur, Madura dan kepulauan serta wilayah dengan IPM rendah.

e. **Penanggulangan Kemiskinan**, diarahkan pada upaya pemberdayaan masyarakat miskin dan kemudahan untuk akses kualitas hidup berbasis keluarga.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- 1). Pengembangan program pemberdayaan masyarakat.
- 2). Jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin berbasis individu (tanpa melihat status penyakit).
- 3). Pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan bebas biaya bagi masyarakat miskin.
- 4). Fasilitasi usaha ekonomi produktif bagi masyarakat miskin.
- 5). Fasilitasi kebutuhan dasar untuk Maskin non produktif.
- 6). Fasilitasi akses layanan perumahan dan sanitasi yang layak dan sehat.
- 7). Penataan dan pengembangan lembaga keuangan mikro untuk mendorong pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- 8). Pengembangan kelembagaan masyarakat miskin dalam meningkatkan posisi tawar.
- 9). Pengembangan ketrampilan bagi masyarakat miskin dalam mengembangkan kemampuan berusaha.
- 10). Penguatan lembaga masyarakat (Organisasi Masyarakat Warga).

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini adalah di kawasan tertinggal dan kawasan kumuh (*slum area*) di perkotaan.

Indikasi dari keberhasilan misi ini adalah ditandai dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya usia harapan hidup; menurunnya angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi; menurunnya prevalensi kurang gizi; menurunnya jumlah

PMKS; terkendalinya laju pertumbuhan penduduk; perluasan lapangan kerja; meningkatnya produktifitas tenaga kerja; menurunnya Indeks Kemiskinan.

4. Arah Kebijakan misi Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Buatan, meliputi :

- a. **Pengembangan Keanekaragaman Hayati** diarahkan pada peningkatan nilai tambah potensi sumberdaya alam hayati secara efisien dan dengan tetap memperhatikan kebutuhan generasi mendatang.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- a. Identifikasi potensi dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati.
- b. Perlindungan potensi plasma nutfah dari klaim-klaim yang dilakukan para pengusaha multinasional (MNCs).
- c. Konservasi, rehabilitasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati secara lestari.
- d. Pengembangan dan peningkatan jumlah patent internasional oleh para pelaku lokal atas pemanfaatan potensi sumberdaya alam hayati.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi kawasan lindung, Tahura R. Suryo, hutan kota dan kawasan pesisir pantai.

- b. **Pengembangan Energi** diarahkan dalam rangka pemerataan dan pemenuhan distribusi energi serta diversifikasi atas energi-energi utama dengan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- 1). Pembangunan, pengembangan dan pendistribusian energi dan pengembangan energi alternatif yang ramah lingkungan.
- 2). Optimalisasi pemanfaatan sumber energi bio dan energi terbarukan lainnya yang ramah lingkungan serta berasal dari potensi lokal yang tersedia.

Sedangkan

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi kawasan perdesaan dan terpencil.

- c. **Pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) Terbarukan**, diarahkan untuk memberikan prioritas utama pada kepentingan daya dukung alam dan kelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat. Eksploitasi SDA diarahkan untuk mempertimbangkan kepentingan penduduk lokal, kesetabilan daya dukung alam dan reklamasi paska eksploitasi harus dapat dilakukan secara benar.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- 1). Identifikasi dan inventarisasi potensi SDA terbarukan.
- 2). Identifikasi dan inventarisasi pencemaran dan kerusakan terhadap SDA terbarukan (termasuk tanah dan lahan, udara, hutan).
- 3). Pencegahan, pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan bagi SDA terbarukan.
- 4). Penegakan hukum bagi pelanggaran peraturan lingkungan hidup.
- 5). Rehabilitasi dan pemulihan daya dukung bagi SDA terbarukan.
- 6). Peningkatan kawasan konservasi bagi SDA terbarukan melalui pemberdayaan masyarakat.
- 7). Pengelolaan/pemanfaatan SDA secara optimal dan lestari.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi kawasan hutan produksi, konservasi dan hutan lindung serta sekitar kawasan industri.

- d. **Pendayagunaan Sumber Daya Alam Tak-Terbarukan** diarahkan pada pemenuhan kepentingan daya dukung alam dan kelestarian lingkungan hidup serta kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan kepentingan penduduk lokal, kestabilan daya dukung alam dan reklamasi paska eksploitasi yang dilakukan secara benar.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- 1). Pengendalian lingkungan sekitar kawasan pertambangan yang dieksploitasi.
- 2). Reklamasi pasca eksploitasi untuk memulihkan daya dukung alam.
- 3). Pengendalian lingkungan sekitar kawasan yang dieksploitasi.
- 4). Pemberdayaan masyarakat lokal sekitar kawasan eksploitasi.
- 5). Pemantauan kawasan cekungan air tanah (CAT), peningkatan luasan kawasan hijau, dan pengembangan sumur pantau.
- 6). Pelestarian fungsi daerah tangkapan air untuk menyelamatkan keberadaan air tanah dalam.
- 7). Pengelolaan danau/situ/embung dan pengendalian secara ketat Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan pendekatan *one river, one plan, one management*.
- 8). Peningkatan akses penduduk perkotaan terhadap air bersih.
- 9). Penegakan hukum (*law enforcement*) pada pengelolaan air tanah di kawasan perkotaan.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi kawasan pertambangan, DAS dan CAT.

- e. **Pengembangan Potensi Sumber Daya Kelautan** diarahkan pada pola pembangunan berkelanjutan berdasarkan pengelolaan sumber daya laut berbasis ekosistem, yang meliputi aspek-aspek sumber daya manusia dan kelembagaan, ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya, dan teknologi.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- 1). Pengelolaan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara efisien, dan lestari berbasis masyarakat.
- 2). Pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi laut, dan rehabilitasi habitat ekosistem yang rusak seperti terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun, dan estuaria.
- 3). Peningkatan dan penguatan peranan sumber daya manusia beserta kelembagaannya di bidang kelautan.

4). Pengembangan

- 4). Pengembangan ekonomi kelautan secara sinergis, optimal, dan berkelanjutan.
- 5). Optimalisasi pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
- 6). Peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di kawasan pesisir.
- 7). Peningkatan keselamatan, mitigasi bencana pesisir dan pencemaran laut.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi kawasan pesisir/daerah pantai dan wilayah laut yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu 4 mil sampai dengan 12 mil laut.

- f. **Penanganan Kebencanaan** diarahkan pada peningkatan kemampuan dalam mitigasi, penanganan tanggap darurat dan paska bencana.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- 1). Penataan kelembagaan kebencanaan.
- 2). Peningkatan kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan bencana.
- 3). Pembangunan kembali sarana prasarana publik paska bencana.
- 4). Pengembangan sistem deteksi dini kebencanaan.
- 5). Peningkatan kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan bencana.
- 6). Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.
- 7). Peningkatan kemampuan penanganan tanggap darurat.
- 8). Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi kawasan rawan bencana alam , DAS dan Lumpur Lapindo Sidoarjo.

Indikasi dari keberhasilan misi ini ditandai dengan terpeliharanya kualitas lingkungan hidup; terwujudnya pelestarian fungsi tangkapan air, pengelolaan danau/situ/embung; meningkatnya sumberdaya alam hayati termanfaatkan dan diolah untuk agribisnis; meningkatnya jumlah desa

yang

yang teraliri listrik dengan sumber energi konvensional dan terbaharukan dan menurunnya lahan kritis akibat eksploitasi sumberdaya alam.

5. Arah Kebijakan misi Mengembangkan Infrastruktur Bernilai Tambah Tinggi, meliputi :

- a. **Pembangunan Transportasi** diarahkan diarahkan untuk mendukung kegiatan sosial, ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- 1). Peningkatan dan pembangunan jaringan jalan dan jembatan.
- 2). Mempertahankan kemantapan jaringan jalan.
- 3). Pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan sarana prasarana transportasi yang terintegrasi antar dan intermoda.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi kawasan Selatan Jawa Timur terutama Jalan Lintas Selatan (JLS), Kawasan Kaki Jembatan Suramadu, Kawasan Strategis dan wilayah yang terkena bencana.

- b. **Pengelolaan Sumber Daya Air** diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya air permukaan yang memberikan keadilan dan keselarasan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan antar daerah dan antar kepentingan dengan melakukan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- 1). Peningkatan konservasi sumber daya air untuk melestarikan kuantitas air dan memelihara kualitas air.
- 2). Pendayagunaan (pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan) sarana dan prasarana sumber daya air untuk pemenuhan

kebutuhan

kebutuhan air baku (irigasi, domestik dan industri) yang adil dan selaras baik antar daerah maupun antar kepentingan.

- 3). Pengendalian daya rusak air melalui penanganan pra bencana, darurat dan pasca bencana serta perbaikan manajemen DAS.
- 4). Penataan kelembagaan, keterpaduan dan peningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi sentra produksi pangan (lumbung padi), kawasan strategis, kawasan rawan bencana alam dan kekeringan, kawasan tertinggal dan DAS.

- c. **Perumahan dan Permukiman** diarahkan bagi terpenuhinya kebutuhan rumah serta terbentuknya lingkungan yang sehat sesuai peruntukan dan fungsinya dengan membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat. Disamping itu, pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman juga diarahkan untuk meningkatkan pemerataan dan persebaran penduduk serta pembangunan.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- 1). Peningkatan kawasan permukiman yang layak huni, sinergis, terintegrasi dan berkelanjutan.
- 2). Penyediaan sarana prasarana dasar lingkungan permukiman.
- 3). Pembangunan Rumah Sehat Sederhana (RSH) dan Rumah Susun Sederhana (RUSUNA).
- 4). Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung/rumah negara.
- 5). Pengembangan teknologi tepat guna bidang permukiman.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi kawasan perdesaan, kawasan perkotaan/metropolitan.

- d. **Pengembangan Wilayah**, diarahkan pada terwujudnya percepatan pembangunan struktur dan pola ruang wilayah didukung infrastruktur ekonomi dalam menopang realisasi pemerataan pembangunan melalui percepatan pembangunan kawasan strategis, pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- 1). Pembangunan kawasan strategis, terutama kawasan strategis ekonomi metropolitan, agropolitan dan kawasan tertinggal.
- 2). Pengembangan prasarana wilayah penopang kawasan strategis.
- 3). Pengembangan kawasan andalan.
- 4). Pengelolaan kawasan lindung dan budidaya.
- 5). Optimalisasi kawasan pengendalian ketat (*High Control Zone*).

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi kawasan lindung, kawasan andalan, kawasan strategis dan kawasan pengendalian ketat (*High Control Zone*).

- e. **Penyelenggaraan Penataan Ruang** diarahkan bagi terwujudnya ruang wilayah Jawa Timur sebagai pusat agrobisnis, berdaya saing global dan berkelanjutan. Untuk kepentingan tersebut sinergi RTRW Provinsi dengan RPJPD Provinsi merupakan kesatuan perencanaan pembangunan daerah yang tak bisa dipisahkan.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- 1). Perencanaan tata ruang wilayah dan kawasan strategis.
- 2). Sinkronisasi pemanfaatan ruang antara spasial dan sektoral.
- 3). Pengendalian pemanfaatan ruang, terutama terkait penentuan kebijakan peraturan zonasi, penetapan insentif-disinsentif, perizinan dan pengenaan sanksi.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan strategis dan kawasan pengendalian ketat (*High Control Zone*).

Indikasi dari keberhasilan misi ini, ditandai dengan meningkatnya status kemantapan jalan, meningkatnya cakupan pelayanan sarana prasarana dasar lingkungan permukiman, berkurangnya kondisi *backlog* perumahan, meningkatnya luas layanan air baku dan berkurangnya ketimpangan antar wilayah.

6. Arah Kebijakan misi Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, meliputi :

- a. **Pembangunan Hukum** diarahkan untuk mewujudkan ketertiban sosial yang dilakukan melalui penegakan supremasi hukum yang adil, konsisten, konsekwen, aspiratif, dan tidak diskriminatif. Disamping itu pembangunan hukum diarahkan juga pada terwujudnya konstruksi hukum yang memberi peluang dan perlindungan bagi masyarakat sipil untuk berkontribusi dalam pengelolaan negara berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, konstitusionalisme, hak-hak asasi manusia, dan hukum yang berkeadilan.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- 1). Penataan produk hukum sesuai hirarki perundang-undangan dan kearifan lokal.
- 2). Penguatan kelembagaan dan profesionalisme aparat hukum.
- 3). Pembangunan budaya hukum.
- 4). pengembangan jaringan advokasi hukum pada masyarakat.
- 5). Pengembangan akses masyarakat terhadap keadilan.
- 6). Penegakan supremasi hukum.
- 7). Penghormatan bagi masyarakat sipil untuk berkontribusi dalam pengelolaan pemerintahan.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi daerah dengan tingkat kemiskinan dan kriminalitas tinggi.

- b. **Penyelenggaraan Pemerintahan** diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang mampu mensejahterakan rakyat dan pemantapan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- 1). Penataan dan penguatan kelembagaan pemerintah daerah.
- 2). Pengembangan Diklat Aparatur.

3). Penyusunan

- 3). Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- 4). Peningkatan kinerja birokrasi berbasis kompetensi.
- 5). Peningkatan kualitas pelayanan publik yang murah, mudah dan tepat.
- 6). Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (*e-gov; e-procurement; e-bisnis*).
- 7). Pendistribusian kewenangan antar daerah.
- 8). Peningkatan pengawasan aparatur.
- 9). Pengembangan kerja sama antar daerah dan lembaga.
- 10). Fasilitasi penguatan pemerintah desa/kelurahan.
- 11). Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- 12). Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi ibukota Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi.

- c. **Pembangunan Politik** diarahkan untuk dapat menjamin terselenggaranya tata pemerintahan yang demokratis melalui pelembagaan demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai agama, kesantunan sosial, dan budaya Indonesia, hak-hak azasi manusia, dan mengutamakan kepentingan kedaulatan bangsa serta tetap utuh-teguhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- 1). konsolidasi demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai kesantunan sosial, moralitas dan budaya.
- 2). penguatan fungsi partai politik penguatan kelembagaan dan kedewasaan sikap politik masyarakat.
- 3). peningkatan peran perempuan dan pemuda pembangunan politik.
- 4). pengembangan budaya politik baik pada masyarakat maupun lembaga politik.

5). Penguatan

- 5). Penguatan masyarakat sipil dan partai politik dalam proses kebijakan politik.
- 6). Pelembagaan nilai nilai demokrasi yang berdasarkan Pancasila.
- 7). Pemantapan peran masyarakat madani.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi daerah rawan konflik politik dan daerah dengan tingkat partisipasi politik rendah.

- d. **Pembangunan Komunikasi dan Informasi** diarahkan untuk mewujudkan masyarakat sadar informasi serta menjamin hak masyarakat luas untuk mendapatkan informasi yang transparan menuju proses pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- 1). Pelayanan informasi multi media yang berkualitas.
- 2). Perluasan jaringan dan layanan informasi.
- 3). Fasilitasi masyarakat sadar informasi.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi daerah akses informasi rendah dan daerah di luar daya pancar alat telekomunikasi.

- e. **Pembangunan Keamanan dan Ketertiban** diarahkan untuk mewujudkan suasana yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan tegak-tertibnya tatanan sosial kemasyarakatan di samping juga diarahkan untuk terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- 1). Penataan kelembagaan dan profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
- 2). Pengembangan kerja sama dengan aparat kepolisian.
- 3). Pengamanan aset-aset pemerintah.
- 4). Pengembangan budaya hukum.

5). Pengembangan

- 5). Pengembangan sistim keamanan berbasis masyarakat (*community policing*).
- 6). Pengembangan sistim deteksi dini ketentraman lingkungan.
- 7). Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.
- 8). Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini adalah pada kawasan strategis di pedesaan dan perkotaan.

- f. **Pembangunan Keuangan Daerah** diarahkan pada kemandirian keuangan daerah melalui penyesuaian secara terarah dan sistematis untuk menggali sumber-sumber pembiayaan pembangunan serta dikelola dengan mengembangkan prinsip-prinsip akuntabel, transparan, efisien dan efektif (*value for money*).

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- 1). Optimalisasi penerimaan sumber sumber keuangan daerah.
- 2). Optimalisasi aset-aset pemerintah daerah.
- 3). Pengembangan alternatif sumber pembiayaan pembangunan diluar Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- 4). Pembiayaan investasi non fasilitas berbasis ekspor.

Indikasi dari keberhasilan misi ini ditandai meningkatnya pelayanan publik, menurunnya kerugian negara, meningkatnya partisipasi politik masyarakat, menurunnya indeks kriminalitas, meningkatnya pendapatan asli daerah serta meningkatnya peranan swasta dalam pembiayaan pembangunan.

B. Periodesasi RPJPD

Pencapaian visi pembangunan sebagai Pusat Agrobisnis Terkemuka, Berdaya Saing Global dan Berkelanjutan Menuju Jawa Timur Makmur dan Berakhlak dalam 20 tahun mendatang terbagi atas 4 (empat) tahapan yaitu

tahap

tahap pertama (2005 – 2009), tahap kedua (2010 – 2014), tahap ketiga (2015-2019) dan tahap keempat (2020 – 2024).

1. Tahap Pertama (2005–2009)

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya, pembangunan tahap pertama diarahkan untuk menata dan membangun Jawa Timur dengan bertumpu pada pembangunan Agrobisnis yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Tahap pertama ini, pelbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk menyediakan pondasi atau kerangka dasar bagi kemajuan daerah dalam rangka menopang percepatan kemajuan dan kesejahteraan daerah. Kerangka dasar kemajuan daerah melalui penguatan kelembagaan dan sarana Agrobisnis.

Kegiatan pada tahap ini diutamakan pada perkuatan infrastruktur baik dalam aspek fisik maupun pengelolaan. Aspek fisik, yaitu meliputi penyediaan infrastruktur transportasi, ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan. Aspek pengelolaan, yaitu meliputi aturan, manajemen, dan sumber daya manusia.

Tahap ini diarahkan pada pemulihan kembali kondisi yang ada sehingga kemajuan lebih cepat dicapai. Penurunan kemampuan ekonomi untuk tumbuh mengindikasikan adanya infrastruktur yang melemah daya dukungnya serta tidak berfungsinya mekanisme ekonomi secara optimal.

Untuk itu, pemulihan sarana dan prasarana wilayah serta penambahan infrastruktur memperoleh perhatian utama, sehingga meningkatkan daya dukungnya terhadap kinerja ekonomi. Hal ini harus dilakukan secara simultan baik pada skala Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota Karenanya harus disegerakan penyiapan rencana tindak pemulihan dan pembangunan infrastruktur.

Mekanisme ekonomi dipulihkan dengan merevitalisasi sektor-sektor ekonomi terutama sektor pertanian dan industri. Revitalisasi pertanian terutama dengan meningkatkan produksi pertanian yang didukung

pembangunan

pembangunan infrastruktur dan industri pendukungnya. Revitalisasi pertanian tersebut juga didukung oleh peningkatan konservasi dalam rangka penyediaan air baku bagi kegiatan Agrobisnis.

Revitalisasi industri dilakukan dengan penguatan struktur industri melalui pengembangan kemitraan antara industri kecil menengah dengan industri besar maupun pembentukan klaster industri.

Pada aspek pemerintahan dan aparatur dilakukan dengan pemantapan kinerja Pemerintahan Daerah, termasuk di dalamnya pengelolaan aspek politik, hukum dan HAM. Melalui pemantapan kinerja ini diharapkan dapat menjadi pendorong bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Faktor kunci keberhasilan untuk misi ini adalah meningkatkan efektivitas pelayanan publik oleh aparatur pemerintah provinsi sejalan dengan perkembangan tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Bersamaan dengan itu, tradisi demokrasi dibangun mulai dari tingkat yang paling bawah dengan meletakkan dasar-dasar hubungan sosial yang harmoni dan membangun rasa aman dan saling percaya.

Pada aspek sosial dilakukan dengan pemenuhan hak dasar masyarakat, baik dalam bidang pendidikan, khususnya pemenuhan wajib belajar pendidikan dasar dan rintisan wajib belajar 12 tahun. Di bidang kesehatan dilakukan dengan pemberian akses kepada masyarakat miskin rawat inap gratis dan peningkatan kualitas pelayanan Puskesmas.

2. Tahap Kedua (2010–2014)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan tahap pertama, maka pembangunan tahap kedua ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan produktivitas dan distribusi produk, seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.

Tahap ini ditujukan pada peningkatan kemampuan produksi dan distribusi produk Agrobisnis yang diharapkan dapat mengembangkan

kemajuan

kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tahap ini merupakan kelanjutan tahapan sebelumnya, yaitu merupakan tahap pemanfaatan kerangka dasar yang kokoh sebagai hasil tahap sebelumnya. Tahap ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya, termasuk di dalamnya mengoptimalkan aset-aset daerah yang ada untuk kepentingan Agrobisnis melalui mekanisme ekonomi yang sehat, sistem sosial yang padu, tegaknya hukum.

Pada tahap kedua ini, pengembangan Jawa Timur sebagai pusat Agrobisnis diarahkan pada sentra sentra produk pertanian dan industri pengolahan hasil pertanian di samping perluasan pasar, baik domestik maupun international.. Hal ini dilakukan dengan pemberdayaan petani dan lembaga perdesaan, Pengembangan teknologi pertanian, efisiensi jaringan distribusi, penganekaragaman pangan berbasis produk lokal serta penyediaan sarana prasarana produksi. Dengan menempatkan Agrobisnis sebagai suatu sistem, konsekuensinya akan mengubah proporsi peran Agrobisnis dalam perekonomian. Implikasi lebih lanjut dari reposisi ini adalah realokasi sumberdaya ekonomi yang lebih dominant ke pengembangan Agrobisnis.

Sedangkan pada sektor perdagangan diharapkan dapat mengoptimalkan pasar dalam negeri, penataan distribusi barang dan meningkatkan orientasi ekspor. Di samping itu, optimalisasi sumber daya dilakukan dengan meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala yang tinggi dan meletakkan sistem pengelolaannya yang berkesinambungan. Dalam upaya pemenuhan energi dilakukan dengan meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber sumber energi baru terbarukan.

Pengembangan energi alternatif akan menjadi kebutuhan yang tidak terelakan mengingat kebutuhan energi bagi industri dan rumah tangga di Jawa Timur akan semakin meningkat sementara persediaan terbatas. Oleh karena itu, mulai pada tahap kedua ini akan semakin dikembangkan pelbagai energi alternatif yang ramah lingkungan, mudah dan murah. Semua ini perlu didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, sehingga penyiapan sumber daya manusia, mulai dilaksanakan

Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun dengan fokus pada pengembangan sekolah kejuruan.

Pada pembangunan bidang pariwisata diarahkan dalam rangka meningkatkan keunggulan pariwisata melalui pengembangan produk wisata yang unik, khas dan berakar pada kekayaan budaya tradisional yang mencerminkan jati diri masyarakat, keragaman kekayaan alam dan budaya, peningkatan kinerja objek dan daya tarik wisata yang berdaya saing dan memanfaatkan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dalam aspek pengembangan wilayah, kesenjangan antar daerah dikurangi dengan pemerataan pelayanan aktivitas perekonomian di seluruh wilayah. Kondisi ini ditandai dengan pengembangan infrastruktur transportasi yang menjangkau ke daerah- daerah tertinggal. Selain itu pembangunan di kawasan perkotaan diarahkan perkembangannya agar lebih teratur dengan dukungan perangkat manajemen pembangunan wilayah yang dapat mengakomodasi perkembangan kawasan megapolitan dan keserasian hubungan kota besar, menengah, kecil dan wilayah perdesaan yang ada.

Pembangunan bidang pemerintahan dan aparatur pada tahap kedua merupakan pendukung bagi pelaksanaan pembangunan bidang lainnya, karena itu dalam pembangunan pembangunan bidang hukum diarahkan sebagai sarana rekayasa sosial (*a tool of social engineering*) yang dapat membawa perubahan mendasar sikap aparatur pemerintah dan masyarakat dalam berperan serta dalam setiap aspek pembangunan. Di samping itu juga pembangunan bidang pemerintahan dan aparatur diarahkan pada efektifitas dan peningkatan dayaguna keuangan daerah, penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah, peningkatan SDM, penyiapan pranata baik politik, hukum, ketertiban umum, dan aparatur yang dapat mendukung tercapainya visi Jawa Timur 2025. Sedangkan pembangunan politik diarahkan pada pendewasaan masyarakat maupun partai politik dalam membangun demokrasi guna mempertahankan stabilitas dan harmoni sosial.

3. Tahap Ketiga (2015–2019)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan pembangunan tahap pertama dan kedua, maka pembangunan tahap ketiga ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di pelbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Tahap ini ditujukan untuk memantapkan kemajuan daerah dan mengembangkan kesejahteraan. Dinamika ekonomi yang atraktif pada tahap sebelumnya dimantapkan dengan memperluas jangkauan jaringan kerja kegiatan ekonomi yang tidak hanya berskala nasional, tetapi juga internasional. Tahapan ini juga ditandai dengan makin dominannya peranan pengetahuan dan penguasaan teknologi serta diarahkan pada upaya optimal pendayagunaan potensi sumber daya. Kemajuan yang dicapai menjadikan daerah memiliki daya saing.

Pada tahap ketiga ini, pembangunan industri diarahkan pada penguatan industri manufaktur sejalan dengan pengembangan kawasan klaster industri yang didukung penciptaan lingkungan bisnis yang nyaman dan kondusif, pengembangan kemampuan inovasi, peningkatan kemampuan sumber daya industri dan mengembangkan industri kecil yang tangguh. Sedangkan pembangunan perdagangan di arahkan pada peningkatan keunggulan kompetitif melalui perluasan kawasan perdagangan ekspor, penataan distribusi barang, pemberdayaan produk dalam negeri dan pengembangan pasar dalam negeri.

Pembangunan bidang pemerintahan dan aparatur diarahkan pada peningkatan pendayagunaan kekayaan dan aset dalam pembiayaan pembangunan serta peningkatan fasilitasi kepada daerah dan masyarakat untuk mampu berperan sebagai agen pembaharuan, pelayanan dan pemberdaya masyarakat. Hal ini dilakukan dengan advokasi dan insentif dalam rangka kemandirian, pemberdayaan dan peningkatan kualitas pelayanan umum.

Sedangkan

Sedangkan pembangunan hukum diarahkan pada terwujudnya konstruksi hukum yang memberi peluang bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip konstitusionalisme, Hak Asasi Manusia, dan demokrasi.

Untuk pembangunan wilayah diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana permukiman di perkotaan dan perluasan akses transportasi yang menjangkau wilayah perdesaan. Penyelenggaraan pembangunan wilayah didasarkan pada penataan ruang semakin baik dengan meningkatnya implementasi pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang dan semakin mantapnya sistem pengendalian.

Dalam kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat; terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya yang dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan pada masa yang akan datang.

4. Tahap Keempat (2020–2024)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, maka pembangunan tahap keempat diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan penguatan pasar dan kualitas produk agrobisnis sehingga mempunyai daya saing kompetitif. Dalam rangka semakin memantapkan daya dukung Agrobisnis tersebut, pelestarian kualitas dan fungsi lingkungan terus dijaga dan dipertahankan melalui pengelolaan sumber daya alam yang efisien dengan sarana, prasarana serta infrastruktur lingkungan yang memadai.

Pada tahap keempat, struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan

Sumber

sumber daya alam, dan sektor jasa. Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata, serta berfungsi dengan baik. Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan, dan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi.

Pada tahap ini, ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai, serta terwujudnya masyarakat informasi; Selain itu, pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian (kawasan Agropolitan). Sejalan dengan itu, pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat karena didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Kondisi ini diharapkan dapat semakin mendorong terwujudnya kawasan perkotaan tanpa permukiman kumuh.

Pada tahap ini, pembangunan bidang pemerintahan dan aparatur diarahkan pada peningkatan SDM dalam fasilitasi masyarakat sebagai agen pembaharuan, pemberdaya dan pelayanan umum.

Dalam bidang kelembagaan politik dan hukum telah kondusif yang ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam pelbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia; terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional; terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik, dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta terwujudnya kemandirian dalam konstelasi global.

Pada tahap ini juga, pembangunan dalam bidang kesejahteraan telah mampu memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi masyarakat yang ditandai semakin meningkatnya fasilitasi lembaga jaminan sosial; kualitas sumber daya manusia terus membaik ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang

berbasis

berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayanan pendidikan yang efisien dan efektif; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal, serta kesejahteraan dan perlindungan anak; tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang; dan mantapnya budaya dan karakter bangsa.

Pentahapan RPJPD Jawa Timur tersebut selanjutnya menjadi acuan Kepala Daerah dalam menyusun skala prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD yang memuat visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

PERIODISASI RPJPD PROPINSI JAWA TIMUR

MISI KE 1: Mengembangkan Perekonomian Modern Berbasis Agrobisnis

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
<p>1. Transformasi Sistem Agrobisnis, diarahkan pada pengembangan keterkaitan subsistem antara hulu dan hilir guna meningkatkan nilai tambah produksi agrobisnis yang berdaya saing sesuai dengan permintaan pasar lokal, nasional dan internasional.</p>	<p>AGENDA :</p> <p>1. Peningkatan produksi pertanian dalam rangka mendukung swasembada pangan nasional, pemenuhan pasar dan ketahanan pangan termasuk peternakan, perkebunan, kehutanan serta perikanan dan kelautan.</p>	<p>AGENDA :</p> <p>1. Peningkatan kuantitas dan kualitas serta menjamin kontinuitas produk pertanian dalam rangka pemenuhan pasar dan ketahanan pangan.</p> <p>2. Peningkatan sarana prasarana pertanian & perdesaan.</p> <p>3. Pembangunan Pasar Induk Agribisnis.</p> <p>4. Optimalisasi pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha, dan mendukung produksi pangan.</p> <p>5. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.</p>	<p>AGENDA :</p> <p>1. Pengembangan kualitas produk dalam rangka peningkatan daya saing produk di pasar lokal dan regional dan ketahanan pangan.</p> <p>2. Pemantapan sarana prasarana pertanian dan perdesaan.</p> <p>3. Pemanfaatan hutan lestari untuk diversifikasi usaha, dan mendukung produksi pangan.</p> <p>4. Penguatan agrobisnis berbasis keunggulan komparative menuju agrobisnis berbasis keunggulan kompetitif.</p> <p>5. Penguatan akses pasar dengan menjaga kelangsungan mekanisme pasar yang sehat serta lebih mengutamakan perlindungan usaha masyarakat lemah.</p>	<p>AGENDA :</p> <p>1. Keberlanjutan pengembangan kualitas produk dalam rangka peningkatan daya saing produk di pasar lokal, regional dan internasional dan ketahanan pangan.</p> <p>2. Penguatan dan pelestarian sarana prasarana pertanian dan perdesaan.</p> <p>3. Keberlanjutan pemanfaatan hutan lestari untuk diversifikasi usaha, dan mendukung produksi pangan.</p> <p>4. Keberlanjutan penguatan agrobisnis berbasis keunggulan komparative menuju agrobisnis berbasis keunggulan kompetitif.</p>

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
	PRIORITAS LOKASI:	PRIORITAS LOKASI:	PRIORITAS LOKASI:	PRIORITAS LOKASI:
	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra produksi pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan • Kawasan strategis agropolitan di pedesaan • Kawasan strategis metropolitan di perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra produksi pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan • Kawasan strategis agropolitan di pedesaan • Kawasan strategis metropolitan di perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra produksi pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan • Kawasan strategis agropolitan di pedesaan • Kawasan strategis metropolitan di perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra produksi pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan • Kawasan strategis agropolitan di pedesaan • Kawasan strategis metropolitan di perkotaan
2. Pengembangan Sistem Informasi Agrobisnis diarahkan pada pembangunan sistem informasi hulu-hilir yang meliputi sarana dan prasarana, produksi, informasi proses produksi, informasi distribusi, dan informasi pengolahan serta informasi pasar.	AGENDA : Peningkatan sistem informasi produksi dan informasi pasar	AGENDA : Pengembangan sistem informasi produksi, distribusi, dan informasi pasar	AGENDA : Penguasaan akses informasi produksi, distribusi, dan informasi pasar sampai wilayah kecamatan	AGENDA : Keberlanjutan penguasaan akses informasi produksi, distribusi, dan informasi pasar sampai kelompok tani / petani
	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan strategis ekonomi di pedesaan • Kawasan perkotaan/ metropolitan 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan strategis ekonomi di pedesaan • Kawasan perkotaan/ metropolitan 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan strategis ekonomi di pedesaan • Kawasan perkotaan/ metropolitan 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan strategis ekonomi di pedesaan • Kawasan perkotaan/ metropolitan

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
<p>3. Pengembangan Sumberdaya Agrobisnis, diarahkan pada pemanfaatan dan pengembangan teknologi meliputi aspek bioteknologi, teknologi <i>eko-farming</i>, teknologi proses, teknologi produk dan teknologi informasi, guna meningkatkan keunggulan sumberdaya daerah (<i>comparative advantage</i>) termasuk kelautan melalui sistem agrobisnis dengan penciptaan nilai tambah yang semakin besar, peningkatan lapangan usaha dan lapangan kerja.</p>	<p>AGENDA :</p> <p>Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pengembangan sumberdaya agrobisnis</p>	<p>AGENDA :</p> <p>Penelitian, Pengembangan, penguasaan dan pemanfaatan teknologi dalam rangka pengembangan sumberdaya agrobisnis.</p>	<p>AGENDA :</p> <p>Penguasaan, Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan teknologi meliputi : aspek bioteknologi, teknologi <i>ekofarming</i>, teknologi pasca panen, teknologi produk</p>	<p>AGENDA :</p> <p>Keberlanjutan penguasaan, pemanfaatan, penelitian dan pengembangan teknologi meliputi : aspek bioteknologi, teknologi <i>ekofarming</i>, teknologi pasca panen, teknologi produk</p>
	<p>PRIORITAS LOKASI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan strategis agropolitan di pedesaan • Kawasan strategis metropolitan di perkotaan 	<p>PRIORITAS LOKASI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan strategis agropolitan di pedesaan • Kawasan strategis metropolitan di perkotaan 	<p>PRIORITAS LOKASI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan strategis agropolitan di pedesaan • Kawasan strategis metropolitan di perkotaan 	<p>PRIORITAS LOKASI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan strategis agropolitan di pedesaan • Kawasan strategis metropolitan di perkotaan

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
<p>4. Pembinaan Sumberdaya Manusia, diarahkan pada pembangunan SDM sebagai kekuatan utama pembangunan pertanian yang meletakkan etos kerja dalam rangka meningkatkan produktifitas tenaga kerja.</p>	<p>AGENDA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revitalisasi lembaga penyuluhan 2. Peningkatan kualitas SDM penyuluh. 	<p>AGENDA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kemampuan petani, dan penguatan lembaga pendukungnya. 2. Pengembangan sarana dan prasarana penyuluh serta SDM penyuluh. 	<p>AGENDA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dan pemantapan kemampuan petani, dan penguatan lembaga pendukungnya. 2. Pemantapan sarana dan prasarana penyuluh serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM penyuluh. 	<p>AGENDA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemandirian petani, dan lembaga pendukungnya. 2. Keberlanjutan pemantapan sarana dan prasarana serta kualitas dan kuantitas SDM penyuluh
	<p>PRIORITAS LOKASI:</p> <p>Kawasan strategis agropolitan di pedesaan.</p>	<p>PRIORITAS LOKASI:</p> <p>Kawasan strategis agropolitan di pedesaan.</p>	<p>PRIORITAS LOKASI:</p> <p>Kawasan strategis agropolitan di pedesaan.</p>	<p>PRIORITAS LOKASI:</p> <p>Kawasan strategis agropolitan di pedesaan.</p>
<p>5. Pembangunan Fasilitas Penelitian dan Pengembangan Pertanian diarahkan pada pening-katan fasilitas penelitian dan pengembangan</p>	<p>AGENDA :</p> <p>Peningkatan sarana dan prasarana Litbang pertanian</p>	<p>AGENDA :</p> <p>Pengembangan sarana dan prasarana Litbang pertanian</p>	<p>AGENDA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan sarana dan prasarana Litbang pertanian. 2. Penguasaan inovasi baru teknologi pertanian 	<p>AGENDA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan sarana dan prasarana Litbang pertanian sampai ditingkat kab/kota. 2. Penguasaan inovasi baru teknologi pertanian

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
pertanian guna mendorong perbaikan teknologi produksi dan penciptaan inovasi baru untuk mendorong perekonomian daerah.	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan perdesaan terutama kawasan agropolitan 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan perdesaan terutama kawasan agropolitan 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan perdesaan terutama kawasan agropolitan 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan perdesaan terutama kawasan agropolitan
6. Penguatan Struktur Perekonomian. Penguatan struktur ekonomi daerah berbasis primer yang didukung oleh sektor sekunder dan tersier yang diarahkan pada pemantapan kualitas pertumbuhan ekonomi daerah.	AGENDA : Peningkatan kualitas pertumbuhan sektor pertanian.	AGENDA : 1. Pengembangan keterkaitan sektor primer dengan sektor sekunder dan sektor tersier berbasis agrobisnis. 2. Pembinaan usaha sektor primer, sekunder dan tersier	AGENDA : 1. Pemantapan struktur perekonomian yang berkualitas berbasis agrobisnis. 2. Pembinaan usaha sektor primer, sekunder dan tersier	AGENDA : 1. Perekonomian yang berdaya saing berbasis agrobisnis. 2. Pembinaan usaha sektor primer, sekunder dan tersier
	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan strategis agropolitan • Kawasan andalan • Kawasan budidaya lainnya 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan strategis agropolitan • Kawasan andalan • Kawasan budidaya lainnya 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan strategis agropolitan • Kawasan andalan • Kawasan budidaya lainnya 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan strategis agropolitan • Kawasan andalan • Kawasan budidaya lainnya
7. Penguatan Struktur Industri, diarahkan pada pengembangan	AGENDA : Penataan Struktur Industri berbasis industri kecil dan menengah dalam mata	AGENDA : Pengembangan kluster agroindustri berbasis kekayaan alam daerah .	AGENDA : 1. Pengembangan produk-produk inovatif agroindustri berbasis	AGENDA : 1. Penguasaan daya saing produk agroindustri berbasis sumberdaya

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
sektor agroindustri berbasis industri kecil dan menengah melalui kemitraan yang sehat dengan usaha-usaha ekonomi lokal sebagai <i>leading</i> sektor dalam perekonomian Jawa Timur	rantai industri hulu dan hilir		sumberdaya lokal. 2. Penguatan kemitraan usaha- usaha ekonomi lokal dengan usaha agro industri	lokal. 2. Penguatan kemitraan usaha- usaha ekonomi lokal dengan usaha agro industri
	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan peruntukan Industri • Klaster agroindustri di pedesaan 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan peruntukan Industri • Klaster agroindustri di pedesaan 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan peruntukan Industri • Klaster agroindustri di pedesaan 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan peruntukan Industri • Klaster agroindustri di pedesaan
8. <i>Optimalisasi Perdagangan.</i> diarahkan pada peningkatan sistem distribusi dan informasi pasar untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau. Sedangkan untuk perdagangan luar negeri diarahkan pada penguatan akses jaringan perdagangan ekspor.	AGENDA : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem informasi pasar 2. Perbaikan kerangka regulasi perdagangan. 	AGENDA : <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan akses dan perluasan pasar ekspor 2. Peningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem distribusi daerah. 	AGENDA : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguasaan akses dan perluasan pasar ekspor 2. peningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem distribusi daerah. 	AGENDA : <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberlanjutan penguasaan akses dan perluasan pasar ekspor 2. peningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem distribusi daerah
	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan perdagangan 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan perdagangan 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan perdagangan 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan perdagangan

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
<p>9. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dalam sistem agrobisnis diarahkan pada penumbuhan wirausaha baru, peningkatan kompetensi dan perkuatan kewirausahaan, peningkatan produktivitas, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat.</p>	<p>AGENDA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan iklim usaha yang kondusif. 2. Peningkatan kesempatan berusaha dan penciptaan wirausaha baru. 	<p>AGENDA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan UKM untuk memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing; 2. Pengembangan usaha skala mikro untuk memberikan kontribusi peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah (miskin). 3. Penguatan kelembagaan dan kompetensi SDM koperasi dan UKM berwawasan gender. 4. Penumbuhan dan Penciptaan Wira Usaha baru 	<p>AGENDA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan UKM untuk memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing; 2. Penguatan usaha skala mikro untuk memberikan kontribusi peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah (miskin). 3. Peningkatan kualitas kelembagaan dan kompetensi SDM koperasi dan UKM berwawasan gender. 	<p>AGENDA :</p> <p>Keberlanjutan kemandirian koperasi dan UMKM yang berdaya saing.</p>

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
	PRIORITAS LOKASI:	PRIORITAS LOKASI:	PRIORITAS LOKASI:	PRIORITAS LOKASI:
	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra industri kecil • Kawasan strategis ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra industri kecil • Kawasan strategis ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra industri kecil • Kawasan strategis ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra industri kecil • Kawasan strategis ekonomi •
<p>10. <i>Optimalisasi Peran Lembaga Keuangan dan Perbankan</i> diarahkan untuk meningkatkan peran sertanya dalam pengembangan agrobisnis melalui penyediaan permodalan bagi koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).</p>	<p>AGENDA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dan intermediasi perbankan dalam penyediaan kredit untuk koperasi dan UMKM. 2. Peningkatan akses ke sumberdaya permodalan non perbankan untuk koperasi dan UMKM. 3. Fasilitasi peran pemerintah daerah dalam penjaminan kredit terhadap koperasi dan UMKM 	<p>AGENDA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan intermediasi perbankan dalam penyediaan kredit non komersial untuk koperasi dan UMKM 2. Pengembangan fasilitasi permodalan dan akses ke sumberdaya keuangan non perbankan untuk koperasi dan UMKM. 3. Optimalisasi peran pemerintah daerah dalam penjaminan kredit terhadap koperasi dan UMKM 	<p>AGENDA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan intermediasi perbankan dalam penyediaan kredit non komersial untuk koperasi dan UMKM 2. Penguatan fasilitasi permodalan dan akses ke sumberdaya keuangan non perbankan untuk koperasi dan UMKM. 3. Optimalisasi peran pemerintah daerah dalam penjaminan kredit terhadap koperasi dan UMKM 	<p>AGENDA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan intermediasi perbankan dalam penyediaan kredit non komersial untuk koperasi dan UMKM 2. Pemantapan fasilitasi permodalan dan akses ke sumberdaya keuangan non perbankan untuk koperasi dan UMKM. 3. Optimalisasi peran pemerintah daerah dalam penjaminan kredit terhadap koperasi dan UMKM

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
	PRIORITAS LOKASI:	PRIORITAS LOKASI:	PRIORITAS LOKASI:	PRIORITAS LOKASI:
	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan strategis ekonomi di perdesaan dan perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan strategis ekonomi di perdesaan dan perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan strategis ekonomi di perdesaan dan perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan strategis ekonomi di perdesaan dan perkotaan
<p>11. Percepatan Investasi diarahkan untuk meningkatkan iklim investasi yang semakin kondusif dengan mendorong terwujudnya kepercayaan masyarakat baik domestik maupun internasional terhadap kehidupan ekonomi Jawa Timur dengan mengembangkan kebijakan yang pro-pasar, membangun infrastruktur ekonomi yang baik, menekan <i>high cost economy</i> dan penyederhanaan sistem pelayanan investasi.</p>	<p>AGENDA :</p> <p>Persiapan Pelayanan Perijinan Investasi satu pintu.</p>	<p>AGENDA :</p> <ol style="list-style-type: none"> Optimalisasi pelayanan perijinan investasi satu pintu Peningkatan investasi di bidang agroindustri/ agrobisnis, dan pengembangan kawasan agropolitan. Peningkatan dan perbaikan ketersediaan infrastruktur untuk mendukung kegiatan investasi. 	<p>AGENDA :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengembangan Pelayanan perijinan investasi berbasis Teknologi Informasi. Penataan dan pengembangan kawasan agropolitan. Pemantapan infrastruktur untuk mendukung kegiatan investasi 	<p>AGENDA :</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan pelayanan perijinan investasi berbasis Teknologi Informasi. Peningkatan penataan dan pengembangan kawasan agropolitan. Pemantapan infrastruktur untuk mendukung kegiatan investasi.
	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan strategis agropolitan di perdesaan Kawasan strategis metropolitan di perkotaan Kawasan ekonomi khusus 	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan strategis agropolitan di perdesaan Kawasan strategis metropolitan di perkotaan Kawasan ekonomi khusus 	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan strategis agropolitan di perdesaan Kawasan strategis metropolitan di perkotaan Kawasan ekonomi khusus 	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan strategis agropolitan di perdesaan Kawasan strategis metropolitan di perkotaan Kawasan ekonomi khusus

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
<p>12. Pengembangan Pariwisata, diarahkan untuk melestarikan peninggalan budaya, tradisi, kesenian dan sebagainya dalam rangka membentuk karakteristik masyarakat. Pengembangan pariwisata juga diarahkan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata baik asing maupun domestik serta lama tinggalnya.</p>	<p>AGENDA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan revitalisasi obyek wisata Jawa Timur 2. Promosi pariwisata daerah. 3. Pengembangan paket wisata 	<p>AGENDA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata 2. Promosi pariwisata daerah 3. Peningkatan SDM pariwisata yang kompeten 	<p>AGENDA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan citra industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata 2. Promosi pariwisata daerah 3. Peningkatan SDM pariwisata yang kompeten 	<p>AGENDA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberlanjutan penguatan citra industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata 2. Promosi pariwisata daerah
	<p>PRIORITAS LOKASI :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan pariwisata 	<p>PRIORITAS LOKASI :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan pariwisata 	<p>PRIORITAS LOKASI :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan pariwisata 	<p>PRIORITAS LOKASI :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan pariwisata

Indikasi dari keberhasilan misi ini, yaitu tercapainya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan, meningkatnya kontribusi pangan Jawa Timur terhadap nasional, meningkatnya PDRB dan PDRB per kapita, membaiknya indeks nilai tukar petani/nelayan (NTP / NTN) serta menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan.

MISI KE 2 : Mewujudkan SDM yang Handal, Berakhlak Mulia dan Berbudaya

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
<p>1. Pembangunan Pendidikan diarahkan pada upaya perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat dan <i>outputnya</i> mampu terserap dalam lapangan kerja.</p>	<p>AGENDA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan perluasan dan pemerataan akses pendidikan pada semua jenjang pendidikan. 2. Peningkatan kuantitas pendidikan SMK 3. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan 	<p>AGENDA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan perluasan dan pemerataan akses pendidikan pada semua jenjang pendidikan baik formal, non formal dan informal. 2. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan pada semua jenjang pendidikan dengan menyertakan muatan kurikulum agrobisnis 3. Peningkatan kualitas Sekolah Kejuruan berbasis keunggulan lokal dan teknologi dengan mengedepankan <i>link and match</i> khususnya agrobisnis 4. Peningkatan kualitas pendidikan tinggi. 5. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. 	<p>AGENDA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan perluasan dan pemerataan akses pendidikan pada semua jenjang pendidikan baik formal, non formal dan informal. 2. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan pada semua jenjang pendidikan dengan menyertakan muatan kurikulum agrobisnis 3. Peningkatan kualitas Sekolah Kejuruan berbasis keunggulan lokal dan teknologi dengan mengedepankan <i>link and match</i> khususnya agrobisnis 4. Peningkatan kualitas pendidikan tinggi. 5. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. 	<p>AGENDA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan perluasan dan pemerataan akses pendidikan pada semua jenjang pendidikan baik formal, non formal dan informal. 2. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan pada semua jenjang pendidikan dengan menyertakan muatan kurikulum agrobisnis 3. Peningkatan kualitas Sekolah Kejuruan berbasis keunggulan lokal dan teknologi dengan mengedepankan <i>link and match</i> khususnya agrobisnis 4. Peningkatan kualitas pendidikan tinggi. 5. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
	PRIORITAS LOKASI	PRIORITAS LOKASI	PRIORITAS LOKASI	PRIORITAS LOKASI
	<ul style="list-style-type: none"> Daerah dengan angka buta huruf tinggi dan IPM Rendah 	<ul style="list-style-type: none"> Daerah dengan angka buta huruf tinggi dan IPM Rendah 	<ul style="list-style-type: none"> Daerah dengan angka buta huruf tinggi dan IPM Rendah 	<ul style="list-style-type: none"> Daerah dengan angka buta huruf tinggi dan IPM Rendah
<p>2. Pembangunan Kehidupan Beragama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, serta pembentukan akhlak mulia, memupuk etos kerja dan menghargai prestasi.</p>	<p>AGENDA:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas kerukunan intern dan antar umat beragama Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan 	<p>AGENDA:</p> <ol style="list-style-type: none"> Optimalisasi kualitas kerukunan intern dan antar umat beragama Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama melalui pengelolaan serta pengembangan fasilitas pelaksanaan ibadah; Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan Peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga keagamaan 	<p>AGENDA:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penguatan kualitas kerukunan intern dan antar umat beragama Pemantapan kualitas pelayanan kehidupan beragama melalui pengelolaan serta pengembangan fasilitas pelaksanaan ibadah; Pemantapan kualitas pendidikan agama dan keagamaan pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan Peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga keagamaan 	<p>AGENDA:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelestarian kualitas kerukunan intern dan antar umat beragama Pemantapan kualitas pelayanan kehidupan beragama melalui pengelolaan serta pengembangan fasilitas pelaksanaan ibadah; Pemantapan kualitas pendidikan agama dan keagamaan pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan Peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga keagamaan

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
	PRIORITAS LOKASI	PRIORITAS LOKASI	PRIORITAS LOKASI	PRIORITAS LOKASI
	<ul style="list-style-type: none"> Daerah dengan kasus konflik umat beragama tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> Daerah dengan kasus konflik umat beragama tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> Daerah dengan kasus konflik umat beragama tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> Daerah dengan kasus konflik umat beragama tinggi
<p>3. Pembangunan Kebudayaan diarahkan pada pelestarian nilai-nilai budaya yang mampu merespon secara positif dan produktif perkembangan modernisasi yang terjadi di masyarakat.</p>	<p>AGENDA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanaman nilai-nilai budaya dan moral pada masyarakat, khususnya generasi muda; 2. Pengembangan dan melestarikan budaya lokal dan tradisional. 3. Peningkatkan publikasi, sosialisasi, dan pagelaran apresiasi seni budaya; 	<p>AGENDA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanaman dan peningkatan nilai-nilai budaya dan moral pada masyarakat, khususnya generasi muda; 2. Mengembangkan dan melestarikan budaya lokal dan tradisional. 3. Mengembangkan publikasi, sosialisasi, apresiasi seni budaya; 4. Mengembangkan budaya yang menumbuhkan kreatifitas masyarakat 5. Pemberdayaan budaya lokal dan tradisional sebagai asset pendidikan dan ilmu pengetahuan. 	<p>AGENDA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanaman dan peningkatan nilai-nilai budaya dan moral pada masyarakat, khususnya generasi muda; 2. Mengembangkan dan melestarikan budaya lokal dan tradisional. 3. Mengembangkan publikasi, sosialisasi, apresiasi seni budaya; 4. Mengembangkan budaya yang menumbuhkan kreatifitas masyarakat 5. Pemberdayaan budaya lokal dan tradisional sebagai asset pendidikan dan ilmu pengetahuan. 	<p>AGENDA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanaman dan peningkatan nilai-nilai budaya dan moral pada masyarakat, khususnya generasi muda; 2. Mengembangkan dan melestarikan budaya lokal dan tradisional. 3. Mengembangkan publikasi, sosialisasi, apresiasi seni budaya; 4. Mengembangkan budaya yang menumbuhkan kreatifitas masyarakat 5. Pemberdayaan budaya lokal dan tradisional sebagai asset pendidikan dan ilmu pengetahuan.

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
	PRIORITAS LOKASI	PRIORITAS LOKASI	PRIORITAS LOKASI	PRIORITAS LOKASI
	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan budaya baik di pedesaan dan perkotaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan budaya baik di pedesaan dan perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan budaya baik di pedesaan dan perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan budaya baik di pedesaan dan perkotaan
<p>4. Pembangunan Pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia, yang memiliki karakter kebangsaan (nation building) serta memiliki wawasan kebangsaan dan beretika bangsa Indonesia.</p>	<p>AGENDA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan pemuda; 2. Pengembangan kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan bagi pemuda; 3. Peningkatan budaya dan prestasi olahraga secara berjenjang 4. Peningkatan pemberdayaan organisasi pemuda dan olahraga 	<p>AGENDA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan pemuda; 2. Pengembangan kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan bagi pemuda; 3. Penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan 4. Peningkatan budaya dan prestasi olahraga secara berjenjang 5. Peningkatan pemberdayaan organisasi pemuda dan olahraga 	<p>AGENDA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan pemuda; 2. Pengembangan kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan bagi pemuda; 3. penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan 4. Peningkatan budaya dan prestasi olahraga secara berjenjang 5. Peningkatan pemberdayaan organisasi pemuda dan olahraga 6. Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan. 	<p>AGENDA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan pemuda; 2. Pengembangan kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan bagi pemuda; 3. Penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan 4. Peningkatan budaya dan prestasi olahraga secara berjenjang 5. Peningkatan pemberdayaan organisasi pemuda olahraga 6. Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan.

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
	PRIORITAS LOKASI	PRIORITAS LOKASI	PRIORITAS LOKASI	PRIORITAS LOKASI
	<ul style="list-style-type: none"> Ibukota Kecamatan dan Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> Ibukota Kecamatan dan Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> Ibukota Kecamatan dan Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> Ibukota Kecamatan dan Kabupaten/Kota
<p>5. Pemberdayaan Perempuan diarahkan pada terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, serta perlindungan anak pada suatu kondisi yang menjamin pemenuhan dan perlindungan hak serta tumbuh kembang anak secara wajar.</p>	<p>AGENDA:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender Pencegahan <i>trafficking</i> dan kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<p>AGENDA:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender. Peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan ekonomi perempuan; Pencegahan <i>trafficking</i> dan kekerasan terhadap perempuan dan anak Penguatan lembaga kesetaraan gender 	<p>AGENDA:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penguatan kualitas hidup dan pemberdayaan ekonomi perempuan; Pencegahan <i>trafficking</i> dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penguatan lembaga kesetaraan gender 	<ol style="list-style-type: none"> Pemantapan kualitas hidup dan pemberdayaan ekonomi perempuan di bidang agribisnis; Pencegahan <i>trafficking</i> dan kekerasan terhadap perempuan dan anak
	<ul style="list-style-type: none"> Daerah dengan ketimpangan gender tinggi. Daerah dengan kasus KDRT dan <i>trafficking</i> tinggi. 	<ul style="list-style-type: none"> Daerah dengan ketimpangan gender tinggi. Daerah dengan kasus KDRT dan <i>trafficking</i> tinggi. 	<ul style="list-style-type: none"> Daerah dengan ketimpangan gender tinggi. Daerah dengan kasus KDRT dan <i>trafficking</i> tinggi. 	<ul style="list-style-type: none"> Daerah dengan ketimpangan gender tinggi. Daerah dengan kasus KDRT dan <i>trafficking</i> tinggi.

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
6. Pembangunan Jatidiri Bangsa ditujukan untuk mewujudkan karakter dan identitas bangsa yang terbuka dan berakar dari reaktualisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.	AGENDA: 1. Peningkatan pembangunan karakter dan pekerti bangsa. 2. Pelestarian dan pengaktualisasian nilai-nilai tradisi.	AGENDA: 1. Peningkatan pembangunan karakter dan pekerti bangsa. 2. Pelestarian dan pengaktualisasian nilai-nilai tradisi. 3. Pengembangan masyarakat adat. 4. Pengembangan nilai budaya daerah.	AGENDA: 1. Penguatan pembangunan karakter dan pekerti bangsa. 2. Peningkatan pelestarian dan pengaktualisasian nilai-nilai tradisi. 3. Penguatan masyarakat adat.	AGENDA: 1. Pemantapan pembangunan karakter dan pekerti bangsa. 2. Penguatan pelestarian dan pengaktualisasian nilai-nilai tradisi. 3. Penguatan fungsi masyarakat adat di bidang agrobis.
	PRIORITAS LOKASI <ul style="list-style-type: none"> • Daerah perkotaan dan kawasan adat 	PRIORITAS LOKASI <ul style="list-style-type: none"> • Daerah perkotaan dan kawasan adat 	PRIORITAS LOKASI <ul style="list-style-type: none"> • Daerah perkotaan dan kawasan adat 	PRIORITAS LOKASI <ul style="list-style-type: none"> • Daerah perkotaan dan kawasan adat

Indikator keberhasilan misi Mewujudkan SDM yang Handal, Berakhlak Mulia dan Berbudaya ditandai menurunnya angka buta huruf; meningkatnya Rasio SMK terhadap SMA; meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS); menurunnya konflik umat beragama; menurunnya indeks kriminalitas, meningkatnya indeks kesetaraan gender; menurunnya angka korban KDRT dan trafficking;

MISI KE 3 : Mewujudkan Kemudahan Memperoleh Akses Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
1. Pembangunan Kesehatan , diarahkan pada terwujudnya peningkatan derajat kesehatan sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM.	AGENDA : 1. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas 2. Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	AGENDA : 1. Peningkatkan kesehatan bagi kelangsungan hidup ibu dan anak 2. Peningkatan ketersediaan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau pada setiap strata pelayanan 3. Peningkatan gizi masyarakat 4. Pengendalian penyakit menular dan tidak menular. 5. Pembangunan sistem jaminan kesehatan daerah 6. Peningkatan jumlah, jenis, mutu tenaga kesehatan	AGENDA : 1. Pengembangan kemitraan dalam pembiayaan kesehatan 2. Pemantapan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan 3. Peningkatan jumlah, jenis, mutu tenaga kesehatan 4. Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	AGENDA : 1. Pengembangan dan penguatan sistem kesehatan 2. Pemberdayaan profesi kesehatan (institusi) 3. Peningkatan jumlah, jenis, mutu tenaga kesehatan
	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> Wilayah Selatan, Madura dan Kepulauan dan wilayah dengan IPM Rendah 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> Wilayah Selatan, Madura dan Kepulauan dan wilayah dengan IPM Rendah 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> Wilayah Selatan, Madura dan Kepulauan dan wilayah dengan IPM Rendah 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> Wilayah Selatan, Madura dan Kepulauan dan wilayah dengan IPM Rendah

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
<p>2. Pembangunan Kependudukan, diarahkan pada terwujudnya keluarga sejahtera dan keseimbangan daya dukung lingkungan melalui pengendalian laju pertumbuhan dan persebaran penduduk.</p>	<p>AGENDA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan kependudukan dan keluarga berkualitas 2. Pembekalan calon transmigran 	<p>AGENDA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian laju pertumbuhan Penduduk 2. Peningkatan persebaran penduduk 3. Penataan administrasi kependudukan 	<p>AGENDA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian laju pertumbuhan Penduduk 2. Peningkatan persebaran penduduk 	<p>AGENDA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk 2. Pengembangan kualitas penduduk
	<p>PRIORITAS LOKASI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ibukota Kabupaten/Kota dan Provinsi 	<p>PRIORITAS LOKASI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ibukota Kabupaten/Kota dan Provinsi 	<p>PRIORITAS LOKASI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ibukota Kabupaten/Kota dan Provinsi 	<p>PRIORITAS LOKASI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ibukota Kabupaten/Kota dan Provinsi
<p>3. Pembangunan Ketenagakerjaan, diarahkan pada terwujudnya hubungan yang harmonis antara Pemerintah, Industrial dan buruh serta penciptaan tenaga kerja yang mandiri, produktif, kompetitif.</p>	<p>AGENDA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penciptaan kesempatan kerja 2. Peningkatan produktifitas, kualitas dan kesejahteraan pekerja 3. Pelaksanaan hubungan industrial. 	<p>AGENDA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kompetensi, daya saing dan sarana prasarana 2. Pelatihan tenaga kerja yg berbasis potensi kewirausahaan 3. Peningkatan produktifitas, kualitas dan kesejahteraan pekerja 4. Perlindungan bagi tenaga kerja di daerah 	<p>AGENDA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan produktifitas, kualitas dan kesejahteraan pekerja serta hubungan industrial 2. Pemantapan kompetensi tenaga kerja melalui kurikulum yg berdaya saing 3. Perlindungan bagi tenaga kerja di luar negeri 	<p>AGENDA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pelaksanaan hubungan industrial, buruh dan pemerintah 2. pengembangan kompetensi berbasis potensi lokal 3. Perlindungan bagi tenaga kerja

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
		5. Penanganan pengangguran melalui padat karya	4. Penanganan pengangguran melalui padat karya	
	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> Perkotaan dan perdesaan 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> Perkotaan dan perdesaan 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> Perkotaan dan perdesaan 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> Perkotaan dan perdesaan
4. Pembangunan Kesejahteraan Sosial, diarahkan pada peningkatan kualitas penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang tidak berdaya dan tidak memiliki akses untuk melakukan mobilitas ke tingkat kualitas kehidupan yg lebih baik	AGENDA : <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas dan produktivitas penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 	AGENDA : <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan aksesibilitas PMKS terhadap pelayanan sosial dasar Peningkatan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) Penanganan dampak sosial bencana 	AGENDA : <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial Peningkatan fasilitasi pelayanan sosial dasar untuk PMKS Sistem pembiayaan jaminan sosial daerah bagi PMKS 	AGENDA : <ol style="list-style-type: none"> Pengembangan pembiayaan JAMSOSDA dan perlindungan sosial Peningkatan keberdayaan sosial yang berbasis masyarakat
	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> Wilayah Selatan Jawa Timur, Madura, wilayah dengan IPM Rendah serta wilayah terkena bencana 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> Wilayah Selatan Jawa Timur, Madura, wilayah dengan IPM Rendah serta wilayah terkena bencana 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> Wilayah Selatan Jawa Timur, Madura, wilayah dengan IPM Rendah serta wilayah terkena bencana 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> Wilayah Selatan Jawa Timur, Madura, wilayah dengan IPM Rendah serta wilayah terkena bencana

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
5. Penanggulangan Kemiskinan , diarahkan pada upaya pemberdayaan masyarakat miskin dan kemudahan untuk akses kualitas hidup berbasis keluarga.	AGENDA : 1. Jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin 2. Pengembangan program pemberdayaan masyarakat	AGENDA : 1. Pelayanan kesehatan bebas biaya bagi masyarakat miskin berbasis individu (tanpa melihat status penyakit) 2. Pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan bebas biaya bagi masyarakat miskin 3. Fasilitasi usaha ekonomi produktif bagi masyarakat miskin 4. Fasilitasi kebutuhan dasar untuk masyarakat miskin non produktif 5. Fasilitasi akses layanan perumahan dan sanitasi yang layak dan sehat 6. Penataan dan pengembangan lembaga keuangan mikro untuk mendorong pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM-Des) 7. Sinkronisasi program pemberdayaan masyarakat	AGENDA : 1. Peningkatan pelayanan kesehatan bebas biaya bagi masyarakat miskin berbasis individu (tanpa melihat status penyakit) 2. Peningkatan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan bebas biaya bagi masyarakat miskin 3. Fasilitasi akses anak masyarakat miskin yang berprestasi ke jenjang pendidikan menengah dan tinggi. 4. Stimulasi usaha ekonomi produktif bagi masyarakat miskin 5. Fasilitasi kebutuhan dasar untuk masyarakat miskin non produktif 6. Penguatan lembaga masyarakat (Organisasi Masyarakat Warga)	AGENDA : 1. Pemantapan pelayanan kesehatan bebas biaya bagi masyarakat miskin berbasis individu (tanpa melihat status penyakit) 2. Pemantapan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan bebas biaya bagi masyarakat miskin 3. Fasilitasi kebutuhan dasar untuk masyarakat miskin non produktif 4. Pengembangan kelembagaan masyarakat miskin dalam meningkatkan posisi tawar. 5. Pengembangan ketrampilan bagi masyarakat miskin dalam mengembangkan kemampuan berusaha

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
		8. Penguatan lembaga masyarakat (Organisasi Masyarakat Warga)		
	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan tertinggal dan kawasan tumbuh perkotaan 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan tertinggal dan kawasan tumbuh perkotaan 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan tertinggal dan kawasan tumbuh perkotaan 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan tertinggal dan kawasan tumbuh perkotaan

Indikasi dari keberhasilan misi ini adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya usia harapan hidup; menurunnya angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi; menurunnya prevalensi kurang gizi; menurunnya jumlah PMKS; Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk; Perluasan lapangan kerja; Meningkatnya produktifitas tenaga kerja; Menurunnya indeks kemiskinan.

MISI KE 4: Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Buatan

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
<p>1. Pengembangan Keanekaragaman Hayati diarahkan pada peningkatan nilai tambah potensi sumberdaya alam hayati secara efisien dan dengan tetap memperhatikan kebutuhan generasi mendatang.</p>	<p>AGENDA:</p> <p>1. Identifikasi dan Inventarisasi keanekaragaman hayati</p>	<p>AGENDA:</p> <p>1. Pemanfaatan potensi sumberdaya alam hayati 2. Perlindungan potensi plasma nutfah dari klaim-klaim yang dilakukan para pengusaha multinasional (MNCs). 3. Upaya konservasi dan rehabilitasi keanekaragaman hayati</p>	<p>AGENDA:</p> <p>1. Pemanfaatan potensi sumberdaya alam hayati dengan teknologi bio (<i>biotech</i>) dan peningkatan perlindungan potensi plasma nutfah atas klaim-klaim yang dilakukan pengusaha multinasional (MNCs). 2. Konservasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati untuk pemanfaatan secara lestari 3. Pemanfaatan Keanekaragaman hayati secara lestari 4. Konservasi Keanekaragaman hayati</p>	<p>AGENDA:</p> <p>1. Pengembangan dan peningkatan jumlah patent internasional oleh para pelaku local atas pemanfaatan potensi sumberdaya alam hayati. 2. Pemanfaatan keanekaragaman hayati secara lestari 3. Peningkatan nilai tambah Keanekaragaman hayati.</p>

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
	PRIORITAS LOKASI:	PRIORITAS LOKASI:	PRIORITAS LOKASI:	PRIORITAS LOKASI:
	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan lindung, Tahura R. Suryo, hutan kota, kawasan pesisir pantai 	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan lindung, Tahura R. Suryo, taman national Bromo Tengger Semeru (BTS), taman national baluran, hutan Kota 	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan lindung, Tahura R. Suryo, taman national Bromo Tengger Semeru (BTS), taman national baluran, hutan Kota 	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan lindung, Tahura R. Suryo, taman national Bromo Tengger Semeru (BTS), taman national baluran, hutan Kota
2. Pengembangan Energi diarahkan dalam rangka pemerataan dan pemenuhan distribusi energi di samping juga diversifikasi atas energi utama dengan energi terbarukan yang lebih bersih	AGENDA: Pemenuhan distribusi energi dan pengembangan energi alternatif (bersih) yang terbarukan.	AGENDA: Pembangunan, Pengembangan dan pendistribusian energi alternatif yang ramah lingkungan.	AGENDA: Peningkatan pemanfaatan energi bio dan energi terbarukan lainnya yang ramah lingkungan.	AGENDA: Optimalisasi pemanfaatan energi bio dan energi terbarukan lainnya yang ramah lingkungan.
	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> Kawasan perdesaan dan terpencil. 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> Kawasan perdesaan dan perkotaan. 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> Kawasan perdesaan dan perkotaan. 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> Kawasan perdesaan dan perkotaan.
3. Pendayagunaan Sumberdaya Alam Terbarukan diarahkan pada upaya merehabilitasi dan memulihkan daya	AGENDA: 1. Identifikasi dan inventarisasi potensi SDA terbarukan 2. Identifikasi dan Inventarisasi pencemaran dan	AGENDA: 1. Pencegahan, Pengawasan dan Pengendalian pencemaran dan kerusakan bagi SDA terbarukan	AGENDA: 1. Rehabilitasi dan pemulihan daya dukung serta pengelolaan SDA terbarukan 2. Pemanfaatan SDA terbarukan secara	AGENDA: 1. Pemanfaatan SDA secara optimal dan lestari 2. Peningkatan kawasan konservasi bagi SDA terbarukan melalui

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
dukungnya dan kemudian pada pemanfaatan aspek-aspek tidak kasat mata, seperti jasa lingkungan sehingga memungkinkan tercapainya suatu situasi dimana pemenuhan kebutuhan masa kini dapat dicapai secara baik dan efisien serta tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya.	perusakan terhadap SDA terbarukan (termasuk tanah & lahan, udara, hutan)	2. Penegakan hukum bagi pelanggaran peraturan 3. Rehabilitasi & Pemulihan daya dukung bagi SDA terbarukan 4. Pengelolaan SDA terbarukan	optimal dan lestari	pemberdayaan masyarakat
	PRIORITAS LOKASI: Kawasan hutan produksi, konservasi, hutan lindung dan sekitar kawasan industri	PRIORITAS LOKASI: Kawasan hutan produksi, konservasi, hutan lindung dan sekitar kawasan industri	PRIORITAS LOKASI: Kawasan hutan produksi, konservasi, hutan lindung dan sekitar kawasan industri	PRIORITAS LOKASI: Kawasan hutan produksi, konservasi, hutan lindung dan sekitar kawasan industri
4. <i>Pendayagunaan Sumberdaya Alam Tak-Terbarukan.</i> diarahkan pada pemenuhan kepentingan daya dukung alam dan kelestarian lingkungan hidup serta kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan kepentingan penduduk	AGENDA: 1. Reklamasi paska eksploitasi untuk memulihkan daya dukung alam 2. pengendalian lingkungan sekitar kawasan yang dieksploitasi dan pemberdayaan masyarakat lokal sekitar kawasan eksploitasi. 3. Pemantauan kawasan	AGENDA: 1. Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan eksploitasi, reklamasi paska eksploitasi 2. pengendalian secara ketat kawasan-kawasan kritis. 3. Pelestarian fungsi daerah tangkapan air untuk menyelamatkan keberadaan air tanah	AGENDA: 1. Pengendalian secara ketat kawasan-kawasan eksploitasi sumberdaya alam, pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan yang dieksploitasi dan reklamasi serta pemulihan kawasan pasca eksploitasi. 2. Pelestarian fungsi daerah tangkapan air,	AGENDA: 1. Peningkatan dan prioritas kepentingan kestabilan daya dukung alam dan kelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat. 2. Pelestarian fungsi daerah tangkapan air, peningkatan efisiensi penggunaan air di kawasan pertanian,

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
lokal, kestabilan daya dukung alam dan reklamasi paska eksploitasi yang dilakukan secara benar.	CAT (cekungan air tanah), peningkatan luasan kawasan hijau, dan pengembangan sumur pantau.	dalam, 4. pengelolaan danau/situ/embung dan pengendalian secara ketat DAS dengan pendekatan <i>one river, one plan, one management</i> .	3. pengelolaan danau/situ/embung, pengendalian DAS secara ketat dengan pendekatan <i>one river, one plan, one management</i> serta peningkatan akses penduduk terhadap air bersih, terutama di kawasan perkotaan.	pengelolaan danau/situ/embung, pengendalian secara ketat DAS, 3. peningkatan akses penduduk perkotaan terhadap air bersih, dan 4. law enforcement pada pengelolaan air tanah di kawasan perkotaan.
	PRIORITAS LOKASI: • Kawasan pertambangan, DAS dan CAT	PRIORITAS LOKASI: • Kawasan pertambangan, DAS dan CAT	PRIORITAS LOKASI: • Kawasan pertambangan, DAS dan CAT	PRIORITAS LOKASI: • Kawasan pertambangan, DAS dan CAT
5. Pengembangan Potensi Sumber Daya Kelautan diarahkan pada pola pembangunan berkelanjutan berdasarkan pengelolaan sumber daya laut berbasiskan ekosistem, yang meliputi aspek-aspek	AGENDA: 1. Pengelolaan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara efisien, dan lestari berbasis masyarakat. 2. Peningkatan dan penguatan peranan sumber daya manusia beserta kelembagaannya di	AGENDA: 1. Pengelolaan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara efisien, dan lestari berbasis masyarakat. 2. Pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi laut, dan rehabilitasi habitat ekosistem yang	AGENDA: 1. Pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi laut, dan rehabilitasi habitat ekosistem yang rusak. 2. Peningkatan dan penguatan peranan sumber daya manusia beserta kelembagaannya di bidang kelautan.	AGENDA: 1. Pengelolaan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara efisien, dan lestari berbasis masyarakat. 2. Pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi laut, dan rehabilitasi habitat ekosistem yang

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
sumber daya manusia dan kelembagaan, ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya, dan teknologi.	bidang kelautan. 3. Pengembangan ekonomi kelautan secara sinergis, optimal, dan berkelanjutan. 4. Peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di kawasan pesisir.	rusak. 3. Peningkatan dan penguatan peranan sumber daya manusia beserta kelembagaannya di bidang kelautan. 4. Peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di kawasan pesisir. 5. Peningkatan keselamatan, mitigasi bencana pesisir dan pencemaran laut	3. Pengembangan ekonomi kelautan secara sinergis, optimal, dan berkelanjutan. 4. Optimalisasi pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan. 5. Peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di kawasan pesisir. 6. Peningkatan keselamatan, mitigasi bencana pesisir dan pencemaran laut	rusak. 3. Peningkatan dan penguatan peranan sumber daya manusia beserta kelembagaannya di bidang kelautan. 4. Pengembangan ekonomi kelautan secara sinergis, optimal, dan berkelanjutan. 5. Optimalisasi pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan. 6. Peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di kawasan pesisir. 7. Peningkatan keselamatan, mitigasi bencana pesisir dan pencemaran laut
	PRIORITAS LOKASI: • Daerah pantai 4 sampai dengan 12 mil laut	PRIORITAS LOKASI: • Daerah pantai 4 sampai dengan 12 mil laut	PRIORITAS LOKASI: • Daerah pantai 4 sampai dengan 12 mil laut	PRIORITAS LOKASI: • Daerah pantai 4 sampai dengan 12 mil laut

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
6. Penanganan Kebencanaan diarahkan pada peningkatan kemampuan dalam penanganan pra, darurat dan paska bencana.	AGENDA: 1. Penataan kelembagaan kebencanaan 2. Peningkatan kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan bencana 3. Pembangunan kembali sarana prasarana publik.	AGENDA: 1. Pengembangan sistem deteksi dini kebencanaan; 2. Peningkatan kemampuan penanganan tanggap darurat. 3. Rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana.	AGENDA: 1. Peningkatan kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan bencana 2. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan 3. Peningkatan kemampuan penanganan tanggap darurat. 4. Rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana.	AGENDA: 1. Pengembangan sistem deteksi dini kebencanaan; 2. Peningkatan kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan bencana 3. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan 4. Peningkatan kemampuan penanganan tanggap darurat. 5. Rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana.
	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan rawan bencana alam • DAS 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan rawan bencana alam • DAS • Kawasan Lumpur Lapindo Sidoarjo. 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan rawan bencana alam • DAS • Kawasan Lumpur Lapindo Sidoarjo. 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan rawan bencana alam • DAS

Indikasi dari keberhasilan misi Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Buatan ditandai dengan Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup; terwujudnya pelestarian fungsi tangkapan air, pengelolaan danau/situ/embung; meningkatnya sumberdaya alam hayati termanfaatkan dan diolah untuk agribisnis; meningkatnya jumlah desa yang teraliri listrik dengan sumber energi konvensional dan terbarukan dan menurunnya lahan kritis akibat eksploitasi sumberdaya alam.

MISI KE 5 : Mengembangkan Infrastruktur Bernilai Tambah Tinggi

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
<p>1. Pembangunan Transportasi diarahkan untuk mendukung kegiatan sosial, ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan.</p>	<p>AGENDA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan seluruh jaringan jalan, terutama yang kondisinya kritis, rusak akibat bencana 2. pembangunan sistem transportasi yang terintegrasi antar dan intermoda 	<p>AGENDA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempertahankan kemantapan jaringan jalan dan jembatan. 2. Peningkatan dan pembangunan jaringan jalan dan jembatan 3. Pemeliharaan, peningkatan, pembangunan sarana prasarana transportasi yang terintegrasi antar dan intermoda 	<p>AGENDA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempertahankan kemantapan jaringan jalan, 2. Peningkatan dan pembangunan jaringan jalan dan jembatan 3. Pemeliharaan, peningkatan, pembangunan sarana prasarana transportasi yang terintegrasi antar dan intermoda 	<p>AGENDA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempertahankan kemantapan jaringan jalan, 2. Peningkatan dan pembangunan jaringan jalan dan jembatan 3. Pemeliharaan, peningkatan, pembangunan sarana prasarana transportasi yang terintegrasi antar dan intermoda
	<p>LOKASI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan strategis • Kawasan Selatan Jawa Timur terutama JLS • Daerah yang terkena bencana. 	<p>LOKASI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan strategis • Kawasan Selatan Jawa Timur • Kawasan Kaki Jembatan Suramadu • Daerah yang terkena bencana. 	<p>LOKASI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan strategis • Kawasan Selatan Jawa Timur • Kawasan Kaki Jembatan Suramadu • Daerah yang terkena bencana. 	<p>LOKASI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan strategis • Kawasan Selatan Jawa Timur • Daerah yang terkena bencana.

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
<p>2. Pengelolaan Sumber Daya Air diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya air permukaan yang memberikan keadilan dan keselarasan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan antar daerah dan antar kepentingan dengan melakukan Konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.</p>	<p>AGENDA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan konservasi sumber daya air untuk melestarikan kuantitas air dan memelihara kualitas air. 2. Pendayagunaan (pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan) sarana dan prasarana sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku (irigasi, domestik dan industri). 3. Pengendalian daya rusak air melalui penanganan pra bencana, darurat dan pasca bencana serta perbaikan manajemen daerah aliran sungai (DAS) 4. Penataan kelembagaan, keterpaduan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air 	<p>AGENDA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan konservasi sumber daya air untuk melestarikan kuantitas air dan memelihara kualitas air. 2. Pendayagunaan (pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan) sarana dan prasarana sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku (irigasi, domestik dan industri). 3. Pengendalian daya rusak air melalui penanganan pra bencana, darurat dan pasca bencana serta perbaikan manajemen DAS 4. Penataan kelembagaan, keterpaduan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air 	<p>AGENDA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan konservasi sumber daya air untuk melestarikan kuantitas air dan memelihara kualitas air. 2. Pendayagunaan (pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan) sarana dan prasarana sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku (irigasi, domestik dan industri). 3. Pengendalian daya rusak air melalui penanganan pra bencana, darurat dan pasca bencana serta perbaikan manajemen DAS 4. Penataan kelembagaan, keterpaduan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air 	<p>AGENDA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan konservasi sumber daya air untuk melestarikan kuantitas air dan memelihara kualitas air. 2. Pendayagunaan (pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan) sarana dan prasarana sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku (irigasi, domestik dan industri). 3. Pengendalian daya rusak air melalui penanganan pra bencana, darurat dan pasca bencana serta perbaikan manajemen DAS 4. Penataan kelembagaan, keterpaduan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
	PRIORITAS LOKASI	PRIORITAS LOKASI	PRIORITAS LOKASI	PRIORITAS LOKASI
	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra produksi pangan (lumbung padi) • Kawasan strategis • Kawasan rawan bencana alam dan kekeringan • Kawasan tertinggal • DAS 	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra produksi pangan (lumbung padi) • Kawasan strategis • Kawasan rawan bencana alam dan kekeringan • Kawasan tertinggal • DAS 	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra produksi pangan (lumbung padi) • Kawasan strategis • Kawasan rawan bencana alam dan kekeringan • Kawasan tertinggal • DAS 	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra produksi pangan (lumbung padi) • Kawasan strategis • Kawasan rawan bencana alam dan kekeringan • Kawasan tertinggal • DAS
<p>3. Pembangunan Perumahan dan Permukiman diarahkan bagi terpenuhinya kebutuhan rumah serta terbentuknya lingkungan yang sehat sesuai peruntukan dan fungsinya dengan membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat. Disamping itu, pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman juga</p>	<p>AGENDA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kawasan permukiman yang layak huni, sinergis, terintegrasi dan berkelanjutan 2. Penyediaan sarana prasarana dasar lingkungan permukiman, 3. Pembangunan RSH dan RUSUNA, 4. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung/rumah negara 5. Pengembangan teknologi tepat guna bidang permukiman. 	<p>AGENDA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kawasan permukiman yang layak huni, sinergis, terintegrasi dan berkelanjutan 2. Penyediaan sarana prasarana dasar lingkungan permukiman, 3. Pembangunan RSH dan RUSUNA, 4. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung/rumah negara 5. Pengembangan teknologi tepat guna bidang permukiman. 	<p>AGENDA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kawasan permukiman yang layak huni, sinergis, terintegrasi dan berkelanjutan 2. Penyediaan sarana prasarana dasar lingkungan permukiman, 3. Pembangunan RSH dan RUSUNA, 4. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung/rumah negara 5. Pengembangan teknologi tepat guna bidang permukiman. 	<p>AGENDA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kawasan permukiman yang layak huni, sinergis, terintegrasi dan berkelanjutan 2. Penyediaan sarana prasarana dasar lingkungan permukiman, 3. Pembangunan RSH dan RUSUNA, 4. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung/rumah negara 5. Pengembangan teknologi tepat guna bidang permukiman.

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
diarahkan untuk meningkatkan pemerataan dan persebaran penduduk serta pembangunan.	<p>PRIORITAS LOKASI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan perdesaan • Kawasan perkotaan/metropolitan 	<p>PRIORITAS LOKASI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan perdesaan • Kawasan perkotaan/metropolitan 	<p>PRIORITAS LOKASI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan perdesaan • Kawasan perkotaan/metropolitan 	<p>PRIORITAS LOKASI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan perdesaan • Kawasan perkotaan/metropolitan
<p>4. Pengembangan Wilayah, diarahkan pada terwujudnya percepatan pembangunan struktur dan pola ruang wilayah didukung infrastruktur ekonomi dalam menopang realisasi pemerataan pembangunan melalui percepatan pembangunan kawasan strategis, pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya.</p>	<p>AGENDA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan kawasan strategis diprioritaskan 2. Pengembangan prasarana wilayah penopang kawasan strategis diprioritaskan 3. Pembangunan kawasan pengembangan utama 4. Pengelolaan kawasan lindung 5. Optimalisasi kawasan pengendalian ketat 	<p>AGENDA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kawasan strategis, utamanya kawasan strategis ekonomi metropolitan, agropolitan dan kawasan tertinggal 2. Pengembangan prasarana wilayah penopang kawasan strategis 3. Pengembangan kawasan andalan 4. Pengelolaan kawasan lindung 5. Optimalisasi kawasan pengendalian ketat 	<p>AGENDA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kawasan strategis, utamanya kawasan strategis ekonomi metropolitan, agropolitan dan kawasan tertinggal 2. Pengembangan prasarana wilayah penopang kawasan strategis 3. Pengembangan kawasan andalan 4. Pengelolaan kawasan lindung 5. Optimalisasi kawasan pengendalian ketat 	<p>AGENDA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kawasan strategis, utamanya kawasan strategis ekonomi megapolitan, agropolitan dan kawasan tertinggal 2. Pengembangan prasarana wilayah penopang kawasan strategis 3. Pengembangan kawasan andalan 4. Pengelolaan kawasan lindung 5. Optimalisasi kawasan pengendalian ketat

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
	PRIORITAS LOKASI:	PRIORITAS LOKASI:	PRIORITAS LOKASI:	PRIORITAS LOKASI:
	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan lindung • Kawasan andalan • Kawasan strategis • Kawasan pengendalian ketat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan lindung • Kawasan andalan • Kawasan strategis • Kawasan pengendalian ketat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan lindung • Kawasan andalan • Kawasan strategis • Kawasan pengendalian ketat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan lindung • Kawasan andalan • Kawasan strategis • Kawasan pengendalian ketat
<p>5. Pembangunan Penataan Ruang diarahkan bagi terwujudnya ruang wilayah Jawa Timur sebagai pusat agrobisnis, berdaya saing global dan berkelanjutan.</p>	<p>AGENDA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan tata ruang wilayah dan kawasan strategis 2. Sinkronisasi pemanfaatan ruang spasial dan sektoral 3. Pengendalian pemanfaatan ruang, terkait penentuan kebijakan peraturan zonasi, penetapan insentif-disinsentif, perizinan dan pengenaan sanksi. 	<p>AGENDA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan tata ruang wilayah dan kawasan strategis 2. Sinkronisasi pemanfaatan ruang spasial dan sektoral 3. Pengendalian pemanfaatan ruang, terkait penentuan kebijakan peraturan zonasi, penetapan insentif-disinsentif, perizinan dan pengenaan sanksi 	<p>AGENDA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan tata ruang wilayah dan kawasan strategis 2. Sinkronisasi pemanfaatan ruang spasial dan sektoral 3. Pengendalian pemanfaatan ruang, terkait penentuan kebijakan peraturan zonasi, penetapan insentif-disinsentif, perizinan dan pengenaan sanksi 	<p>AGENDA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan tata ruang wilayah dan kawasan strategis 2. Sinkronisasi pemanfaatan ruang spasial dan sektoral 3. Pengendalian pemanfaatan ruang, terkait penentuan kebijakan peraturan zonasi, penetapan insentif-disinsentif, perizinan dan pengenaan sanksi

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
	PRIORITAS LOKASI:	PRIORITAS LOKASI:	PRIORITAS LOKASI:	PRIORITAS LOKASI:
	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan lindung • Kawasan budidaya • Kawasan strategis • Kawasan pengendalian ketat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan lindung • Kawasan budidaya • Kawasan strategis • Kawasan pengendalian ketat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan lindung • Kawasan budidaya • Kawasan strategis • Kawasan pengendalian ketat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan lindung • Kawasan budidaya • Kawasan strategis • Kawasan pengendalian ketat

Indikasi dari keberhasilan misi Mengembangkan Infrastruktur Bernilai Tambah Tinggi ditandai dengan meningkatnya status kemantapan jalan, meningkatnya cakupan pelayanan sarana prasarana dasar lingkungan permukiman, berkurangnya kondisi backlog perumahan, meningkatnya luas layanan air baku serta berkurangnya ketimpangan antar wilayah.

MISI KE 6 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
1. Pembangunan Hukum diarahkan untuk mewujudkan ketertiban sosial yang dilakukan melalui penegakan supremasi hukum yang adil, konsisten, konsekwen, aspiratif, dan tidak diskriminatif.	AGENDA 1. Penataan produk hukum sesuai hirarki perundang-undangan dan kearifan lokal. 2. Penguatan kelembagaan dan profesionalisme aparat hukum.	AGENDA 1. Penegakan supremasi hukum dan HAM 2. Pembangunan budaya hukum 3. Harmonisasi produk hukum 4. pengembangan jaringan advokasi hukum pada masyarakat.	AGENDA 1. Pengembangan akses masyarakat terhadap keadilan. 2. Pembangunan budaya hukum.	AGENDA 1. Penegakan supremasi hukum dan HAM 2. penghormatan bagi masyarakat sipil untuk berkontribusi dalam pengelolaan pemerintahan.
	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> • Daerah dengan tingkat kemiskinan dan kriminalitas tinggi 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> • Daerah dengan tingkat kemiskinan dan kriminalitas tinggi 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> • Daerah dengan tingkat kemiskinan dan kriminalitas tinggi 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> • Daerah dengan tingkat kemiskinan dan kriminalitas tinggi
2. Penyelenggaraan Pemerintahan diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang mampu	AGENDA 1. Penataan kelembagaan pemerintah daerah 2. Pengembangan diklat aparatur 3. Penyusunandan penerapan standart pelayanan minimal	AGENDA 1. Pelayanan publik 2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-gov; e-procurement; e-bisnis) 3. Pendistribusian	AGENDA 1. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan 2. Pengawasan aparatur 3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam	AGENDA 1. Pengawasan aparatur 2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan 3. Pengembangan kerja sama antar daerah dan

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
mensejahterakan rakyat dan pemantapan tatakelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>).	4. Peningkatan kinerja birokrasi 5. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. 6. Fasilitasi penguatan pemerintah desa/kelurahan 7. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif	kewenangan, 4. Pengawasan aparatur 5. Standarisasi kompetensi jabatan 6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan 7. Pengembangan kerja sama antar daerah dan lembaga 8. Fasilitasi penguatan pemerintah desa/kelurahan. 9. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif	penyelenggaraan pemerintahan 4. Pengembangan kerja sama antar daerah dan lembaga 5. Fasilitasi penguatan pemerintah desa/kelurahan 6. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif	lembaga 4. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif
	PRIORITAS LOKASI:	PRIORITAS LOKASI:	PRIORITAS LOKASI:	PRIORITAS LOKASI:
	<ul style="list-style-type: none"> Ibukota Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> Ibukota Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> Ibukota Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> Ibukota Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
<p>3. Pembangunan Politik diarahkan untuk dapat menjamin terselenggaranya tata pemerintahan yang demokratis melalui pelembagaan demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai agama, kesantunan sosial, dan budaya Indonesia, hak-hak azasi manusia, dan mengutamakan kepentingan kedaulatan bangsa serta tetap utuh-teguhnya negara kesatuan Republik</p>	<p>AGENDA</p> <p>1. Konsolidasi demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai kesantunan sosial, moralitas dan budaya.</p>	<p>AGENDA</p> <p>1. Penguatan fungsi partai politik penguatan kelembagaan dan kedewasaan sikap politik masyarakat 2. Peningkatan peran perempuan dan pemuda, 3. Perluasan akses masyarakat terhadap kebijakan politik</p>	<p>AGENDA</p> <p>1. Pengembangan budaya politik baik pada masyarakat maupun lembaga politik. 2. Penguatan masyarakat sipil dan partai politik dalam proses kebijakan politik</p>	<p>AGENDA</p> <p>1. Pelembagaan nilai nilai demokrasi 2. Pemantapan peran masyarakat madani.</p>
	<p>PRIORITAS LOKASI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Daerah rawan konflik 	<p>PRIORITAS LOKASI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Daerah dengan tingkat partisipasi politik rendah 	<p>PRIORITAS LOKASI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Daerah dengan tingkat partisipasi politik rendah 	<p>PRIORITAS LOKASI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Daerah dengan tingkat partisipasi politik rendah

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
<p>4. Pembangunan Komunikasi dan Informasi diarahkan untuk mewujudkan masyarakat sadar informasi serta menjamin hak masyarakat luas untuk mendapatkan informasi yang transparan menuju proses pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik.</p>	<p>AGENDA</p> <p>Pelayanan informasi multi media yang berkualitas</p>	<p>AGENDA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan informasi multi media yang berkualitas 2. Perluasan jaringan dan layanan informasi 	<p>AGENDA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan informasi multi media yang berkualitas 2. Perluasan jaringan dan layanan informasi 3. Fasilitasi masyarakat sadar informasi 	<p>AGENDA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan informasi multi media yang berkualitas 2. Perluasan jaringan dan layanan informasi 3. Fasilitasi masyarakat sadar informasi
	<p>PRIORITAS LOKASI :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Daerah akses informasi rendah • Daerah diluar daya pancar alat telekomunikasi 	<p>PRIORITAS LOKASI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Daerah akses informasi rendah • Daerah diluar daya pancar alat telekomunikasi 	<p>PRIORITAS LOKASI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Daerah akses informasi rendah • Daerah diluar daya pancar alat telekomunikasi 	<p>PRIORITAS LOKASI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Daerah akses informasi rendah • Daerah diluar daya pancar alat telekomunikasi
<p>5. Pembangunan Keamanan dan Ketertiban diarahkan untuk mewujudkan suasana yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan tegak-tertibnya tatanan sosial kemasyarakatan</p>	<p>AGENDA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan kelembagaan dan profesionalisme Satpol PP 2. Pengembangan kerja sama dengan aparat kepolisian 	<p>AGENDA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengamanan aset aset Pemerintah 2. Pengembangan budaya hukum 3. Pengembangan sistim keamanan berbasis masyarakat (<i>community policing</i>) 4. Pencegahan dan 	<p>AGENDA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistim deteksi dini. 2. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban 3. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan 	<p>AGENDA</p> <p>Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban</p>

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
		pemberantasan penyalahgunaan narkoba	narkoba	
	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> • Daerah rawan konflik • Daerah dengan tingkat kriminalitas tinggi • Daerah rawan bencana 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> • Daerah rawan konflik • Daerah dengan tingkat kriminalitas tinggi • Daerah rawan bencana 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> • Daerah rawan konflik • Daerah dengan tingkat kriminalitas tinggi • Daerah rawan bencana 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> • Daerah rawan konflik • Daerah dengan tingkat kriminalitas tinggi • Daerah rawan bencana
6. Pembangunan Keuangan Daerah diarahkan pada kemandirian keuangan daerah melalui penyesuaian secara terarah dan sistematis untuk menggali sumber-sumber pembiayaan pembangunan serta dikelola dengan mengembangkan prinsip-prinsip akuntabel, transparan,	AGENDA <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan manajemen pengelolaan sumber - sumber keuangan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi dan efektifitas 2. Peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan 3. Penggalan alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan di luar PAD 	AGENDA <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan manajemen pengelolaan sumber - sumber keuangan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi dan efektifitas 2. Optimalisasi penerimaan sumber-sumber keuangan daerah 3. Peningkatan alternatif sumber-sumber pembiayaan pembanguna di luar PAD 4. Optimalisasi pembiaya- 	AGENDA <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi manajemen pengelolaan sumber - sumber keuangan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi dan efektifitas 2. Optimalisasi penerimaan sumber-sumber keuangan daerah 3. Pengembangan alternatif sumber-sumber pembiayaan pembanguna di luar PAD 4. Optimalisasi 	AGENDA <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan manajemen pengelolaan sumber - sumber keuangan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi dan efektifitas 2. Penguatan penerimaan sumber-sumber keuangan daerah 3. Optimalisas alternatif sumber-sumber pembiayaan pembanguna di luar PAD 4. Perkuatan kelembagaan

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
efisien dan efektif (<i>value for money</i>).	4. Peningkatan pembiayaan investasi non fasilitas berbasis ekspor.	an investasi non fasilitas berbasis ekspor.	pembiayaan investasi non fasilitas berbasis ekspor.	pembiayaan investasi non fasilitas berbasis ekspor.

Indikasi dari keberhasilan misi **Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik** yang ditandai meningkatnya pelayanan publik, menurunnya kerugian Negara, meningkatnya partisipasi politik masyarakat, menurunnya indeks kriminalitas.

BAB VI

PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. ARAH KEBIJAKAN PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Arah kebijakan pendanaan pembangunan daerah diarahkan dengan memanfaatkan kemampuan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel (*value for money*) melalui optimalisasi penerimaan daerah baik bersumber intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, Efektivitas dan efisiensi pemanfaatan pendanaan pembangunan, optimalisasi lembaga keuangan mikro serta zakat.

B. STRATEGI PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Optimalisasi Penerimaan Daerah

a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah

Upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan melalui upaya intensifikasi pajak maupun retribusi daerah dengan optimalisasi asset daerah, optimalisasi BUMD, optimalisasi pelayanan. Sedangkan upaya ekstensifikasi diupayakan melalui perluasan sumber-sumber pendapatan daerah tanpa harus membebani masyarakat, mengoptimalkan skema-skema bagi hasil pengelolaan minyak dan gas bumi di Jawa Timur.

b. Optimalisasi Penerimaan Pembiayaan melalui Pinjaman Daerah

Pinjaman Daerah dilakukan jika APBD dalam keadaan defisit dan dilakukan dengan kecukupan DCSR (Debt Coverage Service Ratio), hal ini dimaksudkan sebagai upaya menjaga kesehatan APBD secara lebih baik, sehingga tingkat pengembalian (*re-payment*) dapat berjalan dengan lancar. Pinjaman Daerah sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005, bahwa pinjaman daerah

merupakan

merupakan alternative sumber pembiayaan APBD dan /atau untuk menutup kekurangan kas. Pinjaman daerah sebagaimana pasal 7 PP 54 Tahun 2005 terdiri dari :

- 1) Pinjaman Jangka Pendek hanya dipergunakan untuk menutup kekurangan arus kas pada tahun anggaran yang bersangkutan.
- 2) Pinjaman Jangka Menengah dipergunakan untuk membiayai penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan.
- 3) Pinjaman Jangka Panjang dipergunakan untuk membiayai Proyek investasi yang menghasilkan penerimaan.

Sebagaimana Pasal 8 PP 54/2005, bahwa pinjaman jangka pendek bersumber dari :

- 1) Pemerintah Daerah lain;
- 2) Lembaga Keuangan Bank yang berbadan Hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- 3) Lembaga Keuangan Bukan Bank yang berbadan Hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

Sedangkan pinjaman daerah jangka menengah dan jangka panjang bersumber dari Pemerintah yang dananya berasal dari pendapatan APBN dan atau pengadaan pinjaman pemerintah dari dalam negeri ataupun luar negeri serta Pemerintah Daerah lain

c. Obligasi Daerah

Era pelaksanaan otonomi saat ini adalah saatnya bagi pemerintah dan masyarakat daerah untuk lebih kreatif dan mulai mandiri dalam mengurus dan membangun rumah tangga daerahnya. Artinya secara operasional pemerintah daerah harus mampu melaksanakan tugas-tugas berdasarkan prinsip-

prinsip

prinsip good governance dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerahnya.

Terkait hal tersebut dalam menyikapi batas kemampuan APBD dalam menyediakan dana pembangunan daerah, maka daerah perlu mencari dan memanfaatkan sumber dana pinjaman yang berasal dari masyarakat dan swasta lokal atau pinjaman yang berasal dari daerah yang lebih mampu salah satunya adalah obligasi.

Obligasi daerah adalah obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, salah satu unit organisasi di lingkungan pemerintah daerah, Badan Otorita Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau pihak lain (swasta) yang didukung atau disponsori dan atau dijamin oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, obligasi tidak harus diterbitkan oleh pemerintah daerah, tetapi dapat juga diterbitkan oleh BUMD seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atau Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau kantor-kantor dinas yang ada di daerah, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas pariwisata dan sebagainya.

Beberapa macam obligasi daerah berdasarkan jenis pinjaman atas pengembalian hutang pokok dan bunganya meliputi :

- 1) Obligasi Umum (General Bond) yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk membiayai investasi dengan jaminan atas pembayaran kembali utang pokok dan bunganya adalah seluruh penerimaan pemerintah daerah tanpa transfer ;
- 2) Obligasi pendapatan (Revenue Bond) yaitu obligasi yang diterbitkan oleh institusi pemerintah daerah atau BUMD untuk membiayai suatu proyek tertentu. Jaminan pembayaran kembali hutang pokok dan bunganya akan berasal dari penerimaan proyek tersebut ; dan

3) Obligasi

- 3) Obligasi Baralled atau Hybrid Obligation yaitu obligasi yang diterbitkan oleh institusi pemerintah daerah atau BUMD untuk membiayai suatu proyek tertentu. Jaminan pembayaran kembali hutang pokok dan bunganya akan berasal dari penerimaan daerah dan penerimaan proyek tersebut.

Selain perlu kepercayaan dari masyarakat, lingkungan yang kondusif bagi dunia usaha serta semakin efisiennya Pemerintah Provinsi juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerbitan obligasi ini antara lain adalah :

- a). Mempersiapkan regulasi dan prosedur penerbitan obligasi daerah;
- b). Mempersiapkan saluran distribusi atau outlet yang akan digunakan untuk melayani transaksi jual beli obligasi daerah ;
- c). Membuat kreteria tentang proyek-proyek yang layak didanai dengan penerbitan obligasi daerah ;
- d). Membuat kreteria tentang daerah yang layak menerbitkan obligasi daerah ;
- e). Membuat mekanisme pengawasan penerbitan obligasi daerah
- f). Mendapatkan persetujuan dari DPRD ;
- g). Analisa kemampuan pinjam ;
- h). Analisa IRR ;
- i). Analisa biaya hutang (cost of debt).

2. Efisiensi dan efektivitas Pendanaan Pembangunan.

a. Memperkuat dan Memperluas kemitraan (Public-Private Partnership)

Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Di negara berkembang saat ini peningkatan sektor perekonomian peran swasta semakin meningkat. Salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah adalah memperkuat dan memperluas kemitraan atau kerjasama. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan oleh pihak yang saling berkerjasama yaitu pemerintahan, swasta, dan masyarakat adalah :

- 1) Perumusan model kemitraan yang paling tepat dilakukan ;
- 2) Perumusan kriteria mitra yang potensial sebagai mitra pemerintah dan
- 3) Membangun model kemitraan yang efektif : kerjasama antar pemerintah–pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah dengan swasta, pemerintah dengan masyarakat dan antar swasta dengan masyarakat dalam kegiatan usaha ekonomi, penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana pelayanan.
- 4) Kemitraan / kerjasama dapat dilakukan melalui berbagai model, antara lain : Leases and Concession (LC), Built Operations and Transfer (BOT), atau Public - Private Partnership.

b. Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan komitmen suatu perusahaan untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama dengan para pihak yang

terkait, utamanya masyarakat di sekelilingnya dan lingkungan sosial dimana perusahaan tersebut berada yang dilakukan tepadu dengan kegiatan usahanya secara berkelanjutan.

Pelaksanaan CSR di dasarkan pada undang – undang no 40 tahun 2007 mengenai perseroan terbatas. Undang-undang tentang perseroan terbatas pasal 74 menyatakan bahwa perseroan wajib melaksanakan CSR bila tidak, perusahaan akan di kenai sangsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perusahaanaan yang wajib melaksanakan CSR adalah yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Sedangkan perusahaan yang tidak menyentuh sama sekali dengan sumber daya alam boleh melaksanakan CSR dengan suka rela.

Dengan mempertimbangkan program-program pembangunan di Jawa Timur, maka diharapkan adanya pemaduan program CSR dengan program pemerintah sehingga diharapkan implementasi program CSR mampu mempercepat pencapaian tujuan pembangunan di Jawa Timur.

Potensi CSR cukup besar dan efektivitas pemanfaatan CSR dapat dilakukan melalui sinkronisasi dan integrasi pola pendanaan obyek kegiatan dalam hal sinkronisasi waktu pelaksanaan, urusan dan lokasi yang akan didanani serta jangka waktu penanganan obyek/target group.

c. Pendanaan Pembangunan dengan pola cost sharing antara Pemerintah Pusat – Provinsi - Kabupaten/Kota (*Government to Government Partnership*)

Pola pembiayaan model Cost Sharing ini dilakukan melalui kesepakatan pengalokasian belanja antara Pemerintah Pusat – Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Konsep ini untuk

mengoptimalkan

mengoptimalkan efektivitas belanja yang potensinya terbatas
mengoptimalkan perluasan cakupan target group.

d. Mengembangkan Privatisasi/Swastanisasi

Untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi dengan meletakkan sektor swasta sebagai “the Engine of growth” dan mengurangi peran sektor publik dengan memberi peluang seluas-luasnya (catalytic government) peran investasi swasta/masyarakat untuk sektor usaha yang full cost recovery. Dalam rangka mendorong dan mengembangkan privatisasi/swastanisasi pelayanan umum (di bidang-bidang yang secara efisien dan dikelola sektor swasta).

Langkah-langkah awal yang perlu dilaksanakan adalah :

- 1) Penyusunan kriteria privatisasi secara transparan;
- 2) Mengidentifikasi jenis-jenis pelayanan yang dikerjakan oleh Pemerintah dan jenis pekerjaan yang dapat dilimpahkan pada swasta ;
- 3) Meningkatkan dan memperluas keikutsertaan peran swasta untuk membangun prasarana dan sarana pelayanan.

Privatisasi yang dapat dikembangkan antara lain dalam Pengelolaan Terminal Peti Kemas. Perpakiran, Persampahan, Limbah Manusia/ Tinja , Air Bersih dan Tempat Pariwisata/Rekreasi yang dapat sepenuhnya dilakukan oleh pihak swasta.

Untuk mendukung kegiatan dalam menunjang sektor swasta dalam pembangunan diperlukan langkah-langkah antara lain :

- 1) Pemerintah Provinsi membuat system peraturan perundangan (yang berkaitan dengan pemberian izin-izin usaha, lokasi, investasi) yang konsisten, mudah dilaksanakan, dan terbuka ;

- 2) Membenahi kualitas pelayan di lingkungan organisasi pemerintah dengan menetapkan standar pelayan dengan prinsip : kesederhanaan dan ketetapan waktu, kejelasan dan kepastian, keterbukaan dan penuh informasi, ekonomis dan efisiensi prosedur, keadilan dan keamanan :
- 3) Membentuk Unit Pelayanan Umum dan Perizinan terpadu (pelayan dalam satu atap) ;
- 4) Peningkatan kinerja birokrasi : penerapan inovasi berupa perampingan birokrasi, peningkatan SDM, profesionalitas aparatur
- 5) Database yang up to date mengenai kebijakan dan peta potensi daerah yang berkaitan dengan kawasan, sarana prasarana, kegiatan yang akan dilakukan privatisasi atau kerjasama dan siap untuk di akses melalui internet.

e. Pembentukan regulasi yang mendorong termobilisasinya pembiayaan oleh Swasta dan Masyarakat

Langkah ini diarahkan untuk mobilisasi potensi swasta dan masyarakat untuk pendanaan kegiatan pembangunan melalui penciptaan kerangka regulasi yang merupakan langkah strategis Pemerintah Provinsi sebagai penyediaan insentif kebijakan non fiscal.

f. Efektivitas dan Efisiensi Belanja APBD.

Efektivitas dan efisiensi pemanfaatan belanja diarahkan pada upaya untuk mengakomodasikan pelayanan social dasar dan menstimulasi pemerataan dan pertumbuhan ekonomi. Prioritas urusan dilakukan melalui belanja langsung pada SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Sedangkan kegiatan yang menjadi urusan Kabupaten/Kota maupun masyarakat dialokasikan melalui Belanja Bantuan Keuangan dan atau

Belanja Bantuan Hibah maupun Belanja Bantuan Sosial sesuai dengan kemampuan keuangan dan prioritas program yang ditetapkan.

3. Optimalisasi Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga Keuangan Mikro baik Bank dan Non Bank diarahkan untuk mampu memberikan peran intermediasi di sektor riil local pedesaan maupun kelompok marginal perkotaan. Kehati-hatian perbankan (*Prudential Banking*) yang menjadi standar operasional Bank Umum dan menjadi hambatan di sektor usaha mikro, kecil dan menengah diharapkan akan mampu diatasi oleh lembaga keuangan mikro ini. Kelembagaan keuangan mikro non Bank dapat diintroduksi dan diintensifkan seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Unit Pengelola Keuangan (UPK) di desa/kelurahan , Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam (KSP/USP). Disamping itu kelembagaan keuangan mikro dapat pula diintroduksi sesuai dengan budaya local untuk memberikan peran intermediasi secara praktis, efektif dan mudah.

Strategi optimalisasi lembaga keuangan mikro adalah :

- a. Pengakuan dan perlindungan, hal ini diwujudkan melalui pengembangan kerangka regulasi bagi keuangan mikro ;
- b. Penguatan dan peningkatan kapasitas praktek dan pengelolaan;
- c. Penguatan dan peningkatan kapasitas sumberdaya finansial

4. Optimalisasi Pemanfaatan Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS)

ZIS adalah sumberdaya masyarakat Jawa Timur yang sangat potensial untuk mampu memberikan peran dalam mendukung program-program Pemerintah Provinsi . Alternati sumberdaya dari ZIS tetap berada dalam koridor norma/kaidah – kaidah yang berlaku. Kelembagaan pengelola ZIS yang sudah ada, dioptimalkan untuk memperluas cakupan pemberi/donor ZIS serta perluasan target

group penerima. Dengan pola demikian, maka strategi sinkronisasi akan mampu mengoptimalkan peran belanja publik dan potensi ZIS masyarakat Jawa Timur.

BAB VII P E N U T U P

Pembangunan jangka panjang di Provinsi Jawa Timur sesungguhnya adalah sebuah proses sekaligus rangkaian pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang sinergis satu dengan yang lain, sehingga dapat dihasilkan keterpaduan dan daya ungkit, serta dapat diwujudkan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Disadari bahwa pelaksanaan semua program dan kegiatan pembangunan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (budget frame), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar program per daerah maupun kegiatan antarprogram dalam wilayah kota/kabupaten yang berlainan, dengan tetap memperhatikan peran, tanggungjawab dan tugas yang melekat pada Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kegiatan pembangunan di Provinsi Jawa Timur, fungsi RPJPD adalah sebagai pemandu dan sekaligus rambu-rambu yang menentukan arah jangka panjang pembangunan yang ingin dicapai atau diwujudkan. Dengan kata lain, RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 yang telah berhasil disusun ini bukan saja berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh pemangku-kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, tetapi juga sekaligus sebagai koridor dalam penyusunan visi, misi dan berbagai program pembangunan Kepala Daerah dan pedoman dalam penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Timur di setiap tahapan pembangunan jangka menengah.

A. KAIDAH

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan, sebagai landasan bagi pelaksanaan pembangunan

Provinsi

Provinsi Jawa Timur 20 tahun ke depan. RPJPD Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2025 diharapkan dapat dijadikan:

1. Acuan dalam menyusun visi, misi dan program pembangunan untuk penyusunan RPJM Daerah, Renstra SKPD, Renja SKPD dan RKPD.
2. Pedoman dalam penyusunan RPJPD Kabupaten dan kota, RPJM, Renstra SKPD, Renja SKPD dan RKPD di seluruh Provinsi Jawa Timur.
3. Menciptakan perencanaan pembangunan yang menjamin terwujudnya sinergitas, keterpaduan dan sinkronisasi dengan arah pembangunan di kabupaten dan kota serta terintegrasi dengan arah pembangunan nasional.
4. Acuan dalam memberikan arahan bagi penentu kebijakan program dan kegiatan pembangunan

B. PRASYARAT

Dalam menyusun rencana, melaksanakan dan menjamin efektivitas pelaksanaan berbagai program pembangunan di Provinsi Jawa Timur agar sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJPD, tiga pilar *Good Governance* yang mutlak dibutuhkan sebagai prasyarat keberhasilan pelaksanaan visi dan misi pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur adalah: transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dan seluruh *stakeholders*.

Yang dimaksud transparansi di sini adalah adanya jaminan dan terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap informasi pembangunan yang direncanakan, tengah dilaksanakan maupun yang sudah dilaksanakan di masyarakat. Transparansi bukan saja menuntut adanya obyektivitas, keterbukaan dan kejujuran, tetapi juga harus diimbangi dengan adanya sikap menerima berbagai kritik konstruktif dari masyarakat sebagai umpan balik untuk terus-menerus memperbaiki kinerja aparatur pemerintah, sistem birokrasi, kualitas layanan publik dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan pada umumnya.

Sedangkan

Sedangkan yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah kapasitas berbagai lembaga atau instansi pemerintah daerah untuk bertanggungjawab atas keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara periodik. Setiap instansi pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja organisasinya dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya, mulai tahap perencanaan, implementasi, sampai pada tahap pemantauan dan evaluasi.

Akuntabilitas merupakan kunci untuk memastikan bahwa kekuasaan itu dijalankan dengan baik dan sesuai dengan kepentingan publik. Untuk itu akuntabilitas mensyaratkan kejelasan tentang siapa yang bertanggungjawab kepada siapa, dan apa yang dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas bisa berarti pula penetapan sejumlah kriteria dan indikator untuk mengukur kinerja instansi pemerintah, serta mekanisme yang dapat mengontrol dan memastikan tercapainya berbagai standart yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas menuntut adanya kepastian hukum yang merupakan resultan dari hukum dan perundang-undangan yang jelas, tegas, diketahui publik di satu pihak, serta upaya penegakan hukum yang efektif, konsisten dan tanpa pandang bulu di pihak lain. Kepastian hukum juga merupakan indikator penting dalam menimbang tingkat kewibawaan suatu pemerintahan dan legitimasinya di mata rakyat.

Sementara itu, yang dimaksud partisipasi adalah perwujudan dari berubahnya paradigma mengenai peran baru masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat bukanlah sekadar penerima manfaat (*beneficiaries*) atau objek pembangunan belaka, melainkan merupakan subjek dan agen pembangunan yang mempunyai posisi yang setral, strategis dan penting.

Tiga pilar *Good* dikemukakan *Governance* sebagaimana di atas, adalah "spirit" yang semestinya dimiliki dan menjadi dasar bagi seluruh pemangku-kepentingan dan *stakeholders* terkait untuk menjamin

berbagai

berbagai program pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan benar-benar berjalan seperti yang diharapkan.

Keberhasilan pencapaian visi pembangunan jangka panjang sebagaimana telah ditetapkan akan sangat tergantung pada komitmen dari kepemimpinan daerah, konsistensi kebijakan dan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif .

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2009
NOMOR 1 TAHUN 2009 SERI E